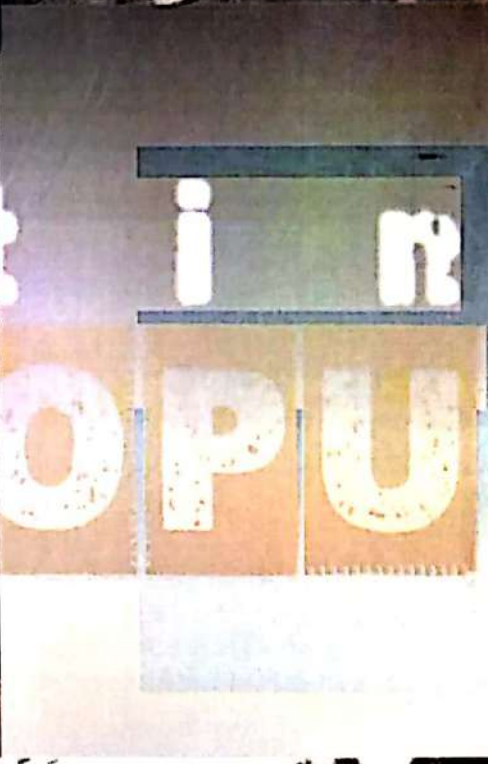
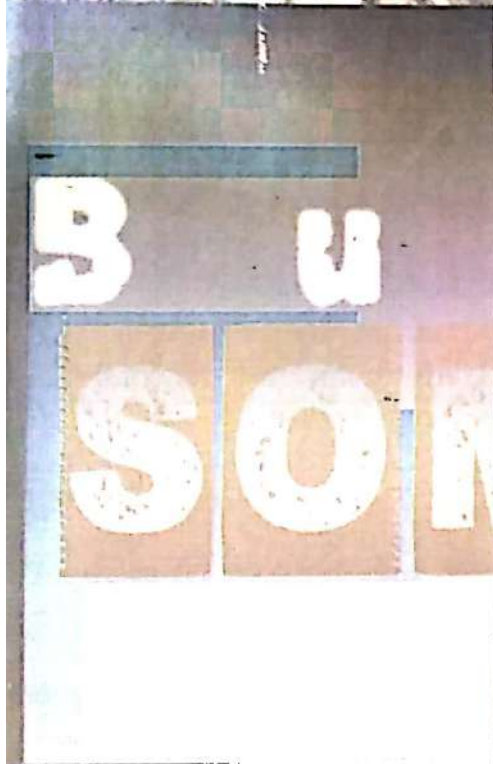
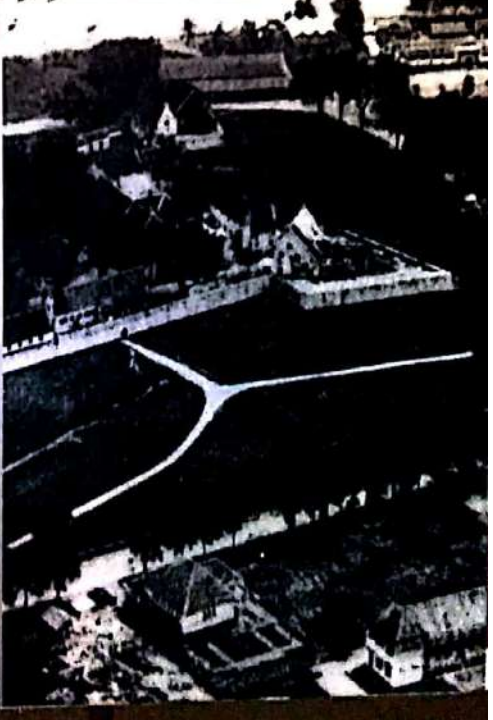


B u l e t i n S O M B A O P U

VOL. 20 No. 24 NOVEMBER 2017



Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan



**KAJIAN PELESTARIAN BUNOMER DI PATTUNUANG MAROS:
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN CAGAR BUDAYA** 1

**Model Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge,
Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan** 16

**Isu-Isu Strategis Untuk Rencana Pengelolaan
Gua-Gua Prasejarah di Wilayah Rammang-Rammang,
Kabupaten Maros** 31

**POTRET CAGAR BUDAYA
KHUSUSNYA MAKAM-MAKAM ISLAM
DI KOTA MAKASSAR** 49

Buletin SOMBA OPIU

**Serteng Ujung Pandang Cikal Bakal Kota Makassar
(Sebuah Kajian Lanskap Konflik, Sosial Budaya dan Alam)** 67

**Kajian Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air
Studi Kasus Tinggalan Pesawat
di Perairan Lae-Lae Kota Makassar** 82

**PERPUSTAKAAN KHUSUS SALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SEBAGAI MEDIA INFORMASI BUDAYA BAGI MASYARAKAT
SULAWESI SELATAN DAN SEKITARNYA** 91



SEJARAH BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN

Penanganan kepurbakalaan di Indonesia, berawal dari pembentukan suatu komisi pemerintah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bernama "Commissie in Nederlandsch Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madura" dengan wilayah kerja Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta.

14 Juni 1913 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 yang menyatakan resminya didirikan lembaga khusus yang menangani permasalahan kepurbakalaan yang bernama 'Oudheidkundige Diensten in Nederlandsch Indie'. Lembaga ini menangani wilayah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bagian timur wilayah Hindia Belanda.

1942. Oudheidkundige Diensten in Nederlandsch Indie pada masa pemerintahan Jepang kemudian berganti menjadi Jawatan Urusan barang-Barang Purbakala yang berkantor di Prambanan, Yogyakarta.

1945. Oudheidkundige Diensten dijalankan kembali oleh Belanda yang dipimpin oleh V. R. Van Romant dengan memindahkan pusat kegiatan di Makassar. Kantor cabang di Makassar dipimpin oleh J. C. Krijgsman yang dibantu oleh ahli prasejarah Van Heekeren. Selanjutnya 1950 dipindahkan ke Bali.

1951. Jawatan Purbakala diubah menjadi Dinas Purbakala di bawah Jawatan Kebudayaan Departemen Pengajaran dan Kebudayaan (P.P. dan K).

1956. Dinas Purbakala diubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K.

1973. LPPN memiliki kantor cabang di Prambanan, Jawa Tengah; Mojokerto, Jawa Timur; Gianyar, Bali dan Ujungpandang, Sulawesi.

1975. LPPN dibagi menjadi 2 cabang, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, yang sekarang bernama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, di daerah disebut dengan Balai Arkeologi; kedua, Direktorat Sejarah dan Purbakala, di daerah disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

2002. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

2012. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang sebelumnya dibawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

2015. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar namanya diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan berkantor di Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) sejak awal pembentukannya, tahun 1973.

TUGAS DAN FUNGSI

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; □
- pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan

Peranggunjani
LA ODE MUHAMMAD AL

Redaktur
ANGGI PURNAMA SARI

Penyunting
SYAHRAWI MANAN

Disain Grafis
ANZHAR

Sekretariat
SYAMSAH
ALAUDDIN
HASAN MANGENDOK

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Kompleks Benteng Ujung Pandang
Jalan Ujung Pandang No. 1
Makassar, Sulawesi Selatan 90111
e : bpcbmakassar@yahoo.com
w : kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/
Ph: 0411 3621701 Fax: 0411 3621702

B u l e t i n SOMBA OPU

VOL. 20 No. 24 NOVEMBER 2017

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah, deskripsi dan survey mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya, yang meliputi bidang-bidang: Sejarah, Arkeologi, Antropologi, Kesenian, Arsitektur, dan bidang lain yang berkaitan.

Redaksi menerima kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian Cagar Budaya dan bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan buletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris; panjang naskah 10 – 20 halaman kuarto (termasuk daftar acuan), spasi lengkap, karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, saduran asalkan disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting karangan tanpa mengubah atau menyimpang dari isi karangan. Karangan yang dimuat dalam Buletin Somba Opu walau berisi tentang suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, sehingga semua karangan yang telah dimuat oleh Buletin Somba Opu adalah pendapat pribadi dari penulis.



¹ Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat, Makassar-Sulawesi Selatan
sundabugis@gmail.com

² Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar
lwansumantri_uh@yahoo.co.id

³ Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
rustandy@archaeologist.com

⁴ Jurusan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar
asmunandar@gmail.com



1. Pendahuluan

Pemerintah saat ini tengah memacu peningkatan kualitas infrastruktur transportasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi sasarannya adalah Jalan Nasional penghubung Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, yang dianggap kurang memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan angkutan/transportasi darat. Pengerjaan jalan nasional ini terbagi ke dalam 5 segmen. Pengerjaan segmen pertama dimulai di Kampung Pattunuang ke arah Bone dengan panjang 3,5 km, dengan menggunakan sistem jalan layang (*elevated road*), dan lainnya berupa pelebaran atau perintisan jalan baru.

Dalam proses pengerjaan segmen satu ini pada titik 0+925-0+950, ditemukan struktur buatan manusia berupa bunker yang diyakini berasal dari zaman kolonial. Struktur pertahanan ini sebenarnya umum ditemukan di Wilayah Kabupaten Maros, namun demikian keberadaan di kawasan hutan cukup langka dan belum pernah dilaporkan sebelumnya. Bunker ini ditemukan pada saat area ini dibersihkan dalam rangka

PERPUSUTAKAAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA
DAN SULAWESI BARAT

DIDAFTAR TGL
NO. PENDAFTARAN
NO. KLASIFIKASI

12-2-2018
50

pengerukan tebing untuk ruas jalan baru, pada Februari 2016. Temuan bunker ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif pelestarian cagar budaya. Hal ini penting sebab, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, temuan yang diduga sebagai cagar budaya wajib dilaporkan, dilakukan kajian (pasal 23), dan selama proses tersebut diperlakukan/dilindungi sebagaimana cagar budaya (pasal 31; ayat (5)). Khusus di pasal 23 ayat 3 disebutkan bahwa instansi berwenang melakukan kajian terhadap temuan yang dilaporkan.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas secara khusus kajian pelestarian bunker di Pattunuang yang telah dilakukan tim dalam rangka menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh pihak pelaksana proyek. Rekomendasi ini menjadi sebuah *win-win solution* yang berorientasi pada pelestarian bunker sebagai cagar budaya sekaligus dapat memberi ruang pada pelaksanaan pembangunan proyek jalan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk merekam data dan melakukan analisis cagar budaya dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi penanganan bunker yang terdampak pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan (*elevated road*) Segmen 1 Pattunuang. Adapun lingkup kegiatan kajian ini berupa:

- Mengumpulkan data bunker atau pilbox pada lokasi proyek dan merekam data secara total dari bunker atau pilbox yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan jalan;
- Melakukan analisis terhadap data yang dihimpun;
- Wawancara dan diskusi terbatas;

3. Metode

Kegiatan kajian dilakukan dengan menggunakan perangkat metode yang terdiri dari : mengumpulkan data Pustaka, Wawancara, perekaman data lapangan, dan analisis. Rangkaian metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengumpulan data pustaka pada beberapa sumber, di antaranya laporan penelitian, peta dan dokumen terkait perencanaan proyek. Penelusuran data pustaka difokuskan pada data-data terkait dengan rujukan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi, data kesejarahan serta potensi dampak dari adanya proyek pembangunan jalan sebagai bahan dalam tahap analisis.
- Wawancara pada beberapa informan yang terdiri dari unsur masyarakat, perangkat pelaksana proyek dan pemerintah setempat. Wawancara difokuskan untuk melengkapi

data pustaka. selain itu, untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan keberadaan objek peninggalan yang berada pada lokasi proyek pembangunan jalan.

- c. Melakukan Perekaman data pada objek secara total. Hal ini dilakukan mengingat potensi ancaman kerusakan akibat adanya pengerjaan fisik pembangunan jalan tepat di lokasi objek kajian. Perekaman data yang dimaksud meliputi, pendeskripsian, pengukuran, penggambaran (dua dimensi dan tiga dimensi), pemetaan, pendokumentasian berupa foto. Rangkaian perekaman data tersebut meliputi aspek/dimensi bentuk, teknologi, ukuran, bahan, keletakan serta kondisi objek dan lahan.

Analisis data meliputi beberapa aspek, pertama identifikasi (definisi) dengan mengacu pada beberapa jenis peninggalan serupa, sebagaimana yang pernah ditemukan pada wilayah Maros lainnya dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan serta bersumber dari penelusuran pustaka, objek serupa merupakan sarana-prasaran militer yang diidentifikasi dalam kategori (1) Bunker (*bunker*) adalah sebuah ruangan perlindungan yang sebagian atau seluruh strukturnya terletak di bawah tanah. (2) Pilboks (*pillbox*) adalah bangunan kecil tertutup yang terbuat dari beton dan berdiri sendiri sebagai tempat berlindung untuk menembak. (3) Baterai (*batterij*) adalah bangunan pertahanan kecil yang berdiri sendiri untuk menempatkan sejumlah meriam atau senjata (4) Gua alami adalah gua yang ada secara alami kemudian dimanfaatkan, sedangkan gua buatan adalah gua yang tidak terjadi secara alami melainkan dibuat oleh manusia (anonim, 2009: 20; Hakim, 2015). Selanjutnya analisis nilai penting terkait sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial dan agama. Analisis yang tak kalah penting lainnya adalah bentuk pemanfaatan atau peruntukkan lahan dan regulasi terkait, serta urgensi dari pembangunan jalan yang sedang dikerjakan terkait penyusuaian dengan upaya pelestarian cagar budaya.

4. Deskripsi Data Temuan Bunker

Temuan bunker berada di lokasi proyek peningkatan jalan poros Maros-Bone, khususnya Segmen 1 tepatnya di km. 18 sampai km. 22, di Kampung Pattunuang Asue Desa Samangki Kecamatan Simbang. Sepanjang jalur tersebut ditemukan 3 buah struktur buatan (bunker) yang terletak di 2 titik, yaitu lokasi pertama pada titik 0+925-0+950, dan lokasi kedua pada titik 1+750-1+775. Pada lokasi pertama, temuan struktur menempati ruas jalan di ujung timur *elevated road* dan terdampak langsung pembangunan jalan. Sedangkan pada lokasi kedua, dua buah temuan struktur tidak masuk dalam area pengerjaan jalan, namun karena posisinya yang tepat pada batas pengerukan untuk pelebaran jalan, maka dikuatirkan akan terkena dampak dalam proses pengerjaan proyek jalan.



Gambar 1. Foto lokasi permanen Bunker 1 (ringkasan) di jalur perantara jalan layang
(elevated road) Segmen 1 di Kampung Pattunung Aue, diarahkan dari utara
ke selatan sepanjang (Sudut Foto dan Urutan Foto) Diklat PT. Wa

pada saat sebelum
-Hikmah 2016

Aktivitas yang sementara berpusat di lokasi pembangunan jalan layang ini menyebabkan salah satu bunker terkena dampak secara langsung oleh pengerjaan lahan untuk badan jalan. Penggalian, pengerukan, dan perataan lahan tersebut dengan alat berat menyebabkan beberapa bagian dari bunker terkikis. Sementara 2 bunker lainnya yang berada di bagian atas atau pada km 22 hingga saat ini belum ada aktivitas fisik yang secara langsung dapat mengganggu keberadaannya.

Adapun penggunaan istilah bunker dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan keberadaan struktur permanen sebagai sarana perlindungan atau pertahanan yang umum digunakan sejak masa Perang Dunia I hingga Perang Dunia II. Namun demikian, obyek yang ditemukan di lokasi survei akan dinyatakan dengan istilah yang lebih spesifik sesuai dengan hasil identifikasi dan determinasi masing-masing istilah sarana pertahanan praktis ini berdasarkan referensi yang umum digunakan. Untuk itu, dalam menguraikan tiga obyek yang ditemukan digunakan istilah *bunker*, *pillbox*, dan *baterai*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bunker 1

Struktur berdenah dasar segi empat ini berada tepat di tebing selatan jalan poros Maros-Bone Km 19, dan saat ini tepat berada di ruas rencana jalan baru (*elevated road*) pada titik koordinat $05^{\circ}03'12,4''$ LS dan $119^{\circ}43'13,1''$ BT. Posisi struktur yang tepat berada di median jalan dengan elevasi 6 meter di atas permukaan jalan lama, dalam kondisi rusak pada beberapa bagian akibat dari pengerukan tebing. Hal ini disebabkan oleh karena keberadaannya baru diketahui oleh pelaksana proyek pada saat pembersihan lahan persiapan pembangunan *elevated road* di segmen 1 berlangsung awal tahun 2016.

75 cm x 50 cm. Ukuran ini menunjukkan bahwa bukaan jendela melebar di bagian luar, yang mengindikasikan adanya upaya untuk memperluas cakupan pandang dan bidikan. Model jendela demikian diperlukan karena dengan ketebalan dinding yang mencapai 100 cm ini, jendela dengan bukaan normal mengakibatkan penyempitan pandangan ke arah samping, atas, dan bawah ke arah depan struktur. Diduga pula terdapat pintu di bagian belakang, sudut bagian timur struktur, namun sulit diidentifikasi lebih detail karena masih tertutup material tanah akibat pengerukan tebing. Berdasarkan ciri fisik yang ditemukan, maka struktur Bunker 1 ini memenuhi syarat sebagai *Pillbox*.

b. Bunker 2

Bunker ini berada sekitar 1 km di sebelah timur laut bunker 1, tepatnya pada Km. 21 dengan posisi tepat di tepi tebing jalan pada titik koordinat 05°03'02,2" LS dan 119°43'17,1" BT. Struktur ini masih utuh dengan denah segi empat tidak simetris dengan ukuran panjang sisi utara dan selatan 330 cm, namun dimensi lebar berbeda 304 cm pada sisi timur dan 295 cm pada sisi barat, dengan tinggi 90-200 cm di atas permukaan tanah yang miring. Dengan demikian, ukuran ruang dan kondisi bagian dalam bunker mengikuti, berukuran tidak simetris dengan dimensi panjang pada sisi utara dan selatan 204 cm, dan dimensi lebar pada sisi timur 200 cm dan sisi barat 133 cm dengan tinggi langit-langit dari permukaan tanah sedimen 84-125 cm. Ketebalan dinding struktur juga berbeda pada setiap sisi, yaitu 77 cm sisi barat, 47 cm sisi utara, 50 cm sisi timur, dan 48 cm pada sisi selatan, serta ketebalan bagian atas (langit-langit) adalah 70 cm. Berdasarkan letak jendela bidik sebagai pedoman orientasi, maka arah hadap bunker ini barat laut (302°). Posisi bunker saat ini menghadap ke tikungan jalan yang berada pada elevasi sekitar 6 meter di bawahnya, dan tidak berbeda dengan elevasi bunker 1 terhadap jalan lama di depannya.



Gambar 3. Bunker 2 (Batara): Tampak dari arah timur dimana pintu masuk berada (foto kiri atas), dinding bagian selatan (kanan atas), jendela bidik pada dinding barat (foto kiri bawah), dan dinding sebelah selatan yang sebagian tertutup dengan material tanah, dan tampak permukaan atas yang dikamufase dengan boulder becauder batu kali (foto kanan bawah).

75 cm x 50 cm. Ukuran ini menunjukkan bahwa bukaan jendela melebar di bagian luar, yang mengindikasikan adanya upaya untuk memperluas cakupan pandang dan bidikan. Model jendela demikian diperlukan karena dengan ketebalan dinding yang mencapai 100 cm ini, jendela dengan bukaan normal mengakibatkan penyempitan pandangan ke arah samping, atas, dan bawah ke arah depan struktur. Diduga pula terdapat pintu di bagian belakang, sudut bagian timur struktur, namun sulit diidentifikasi lebih detail karena masih tertutup material tanah akibat pengerukan tebing. Berdasarkan ciri fisik yang ditemukan, maka struktur Bunker 1 ini memenuhi syarat sebagai *Pillbox*.

b. Bunker 2

Bunker ini berada sekitar 1 km di sebelah timur laut bunker 1, tepatnya pada Km. 21 dengan posisi tepat di tepi tebing jalan pada titik koordinat 05°03'02,2" LS dan 119°43'17,1" BT. Struktur ini masih utuh dengan denah segi empat tidak simetris dengan ukuran panjang sisi utara dan selatan 330 cm, namun dimensi lebar berbeda 304 cm pada sisi timur dan 295 cm pada sisi barat, dengan tinggi 90-200 cm di atas permukaan tanah yang miring. Dengan demikian, ukuran ruang dan kondisi bagian dalam bunker mengikuti, berukuran tidak simetris dengan dimensi panjang pada sisi utara dan selatan 204 cm, dan dimensi lebar pada sisi timur 200 cm dan sisi barat 133 cm dengan tinggi langit-langit dari permukaan tanah sedimen 84-125 cm. Ketebalan dinding struktur juga berbeda pada setiap sisi, yaitu 77 cm sisi barat, 47 cm sisi utara, 50 cm sisi timur, dan 48 cm pada sisi selatan, serta ketebalan bagian atas (langit-langit) adalah 70 cm. Berdasarkan letak jendela bidik sebagai pedoman orientasi, maka arah hadap bunker ini barat laut (302°). Posisi bunker saat ini menghadap ke tikungan jalan yang berada pada elevasi sekitar 6 meter di bawahnya, dan tidak berbeda dengan elevasi bunker 1 terhadap jalan lama di depannya.



Gambar 3. Bunker 2 (Batara): Tampak dari arah timur dimana pintu masuk berada (foto kiri atas), dinding bagian selatan (kanan atas), jendela bidik pada dinding barat (foto kiri bawah), dan dinding sebelah selatan yang sebagian tertutup dengan material tanah, dan tampak permukaan atas yang dikamufase dengan boulder becauder batu kali (foto kanan bawah).

Jendela bidik yang berada pada dinding sisi barat bunker berbentuk segi empat panjang dengan ukuran 84 cm x 52 cm di bagian dalam dan 46 cm x 30 cm di bagian luar dengan ketebalan dinding 77 cm. Dengan ukuran ini maka tampak bahwa ruang jendela melebar ke dalam, kebalikan dari model jendela bidik Bunker 1. Sementara pada dinding sisi timur (timur laut) terdapat pintu masuk ke dalam bunker, dengan posisi dekat sudut pertemuan dinding timur dan dinding utara. Pintu masuk ini berukuran lebar 69 cm x tinggi 108 cm, diukur dari permukaan tanah (bukan lantai) karena tidak dilakukan pengupasan sedimen. Di dekat sudut pertemuan dinding timur dengan dinding selatan terdapat lubang dengan penampang segi empat berukuran 7x5 cm, tembus ke bagian dalam bunker, tepat di bawah langit-langit. Permukaan dinding dan langit-langit di bagian dalam cukup halus dengan bekas-bekas papan cetakan beton masih tampak jelas. Permukaan bagian atas struktur ini dihampari dengan bolder-bolder batu kali dan terpasang secara permanen menyatu dengan beton. Berdasarkan ciri fisik yang ditemukan, maka struktur ini lebih tepat sebagai *baterai*.

c. Bunker 3

Berada sekitar 15 meter di sebelah barat laut Bunker 2, atau posisinya hanya dipisahkan oleh jalan poros, dengan keletakan di sebelah barat laut jalan pada posisi 05°03'01,7" LS dan 119°43'16,1" BT. Struktur ini merupakan gua alam yang bagian dalamnya dimodifikasi membentuk ruang segi empat berukuran 150 cm x 160 cm dengan ketinggian langit-langit 140 cm dari permukaan lantai alami gua. Jendela bidik berbentuk segi empat dengan ukuran bagian dalam 56 cm x 42 cm. Lubang ventilasi berpenampang segi empat berukuran 14 cm x 14 cm ini mengarah ke atas agak condong ke arah barat sepanjang 119 cm, dan bagian atasnya telah tertutup dengan material batuan. Satu-satunya bagian yang memperlihatkan adanya struktur artifisial dari luar adalah dinding sisi utara (barat laut) sebagai bagian depan tempat jendela bidik berada, dan bagian beton artifisial lainnya hanya dapat dilihat dari bagian dalam bunker.

Arah hadap berdasarkan keletakan jendela bidik adalah barat (309°), dan dilengkapi dengan pintu masuk yang tidak dibentuk secara khusus karena mulut dan lorong gua merupakan akses satu-satunya. Akses untuk memasuki bunker dari arah tenggara atau dari arah jalan poros dengan menuruni permukaan lereng cukup terjal, sejauh sekitar 10 meter hingga mulut gua alam yang posisinya mengikuti kelerengan permukaan lahan. Dari mulut gua, tidak tampak adanya indikasi struktur artifisial hingga sekitar 3 meter memasuki ruang gua yang permukaannya menurun. Setelah mencapai lantai ruang gua yang rata, tampak interior bunker tidak berbeda dengan interior bunker pada umumnya, tidak ada kesan bahwa bunker berada dalam gua alam.

5. Pelestarian Bunker

Analisis nilai penting dalam konteks pelestarian Bunker di Pattunuang tidak dapat dilepaskan dari perspektif kawasan. Oleh karena itu uraian mengenai nilai penting ini

meliputi ketiga objek sebagai satu kesatuan yang dipaparkan sebagai berikut.

a. *Nilai Penting Sejarah*

Keberadaan pillbox, baterai dan bunker di kawasan Pattunuang Maros ini merupakan penanda sejarah yang menggambarkan bagaimana penerapan strategi pertahanan dalam kurun waktu perang dunia kedua. Sumberdaya arkeologi berupa sarana pertahanan ini juga merupakan bukti bahwa Jepang dalam hal ini telah menyiapkan sistem pertahanan darat yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek alam. Sistem pertahanan ditempatkan menyusuri areal perbukitan dan mulai dibangun sekitar tahun 1930-an bertujuan untuk menghadang ancaman. Semua peristiwa yang dijelaskan diatas, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama tentang sejarah perang dan bunker sebagai bagian dari strategi pertahanan. Kedua, keberadaan ketiga struktur pertahanan itu tidak dapat dilepaskan dari struktur pertahanan lain yang tersebar di wilayah Maros dan menjadi penanda adanya objek vital yang harus dilindungi di wilayah ini.

b. *Nilai Penting Ilmu Pengetahuan*

Sumber daya budaya merupakan representasi dari budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, sumberdaya budaya mempunyai potensi tinggi untuk kegiatan penelitian. Nilai penting ilmu pengetahuan adalah manfaat atau kegunaan sebagai media atau wahana pembelajaran terhadap berbagai disiplin ilmu terkait (Hall and McArthur, 1993; Pearson and Sullivan, 1995 dalam Timothy dan Boyd, 2003: 90).

Berdasarkan hasil identifikasi, keberadaan struktur cagar budaya di Pattunuang berupa fasilitas pertahanan dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah arkeologi, teknik sipil, dan ilmu tentang perang. Nilai penting arkeologi dapat dilihat dari penelitian arkeologis yang dilakukan di kawasan ini. Penelitian yang dilakukan baik secara institusional maupun penelitian yang dilakukan secara individu. Penelitian juga mencakup peneliti dari dalam maupun luar negeri. Penelitian secara institusional dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang meneliti untuk kepentingan pendataan dan penetapan. Penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pada 2012 tentang aspek keruangan pola tata kota Kolonial di Makassar dan Maros. Penelitian secara individu misalnya dilakukan oleh beberapa mahasiswa arkeologi dan sejarah Universitas Hasanuddin tentang tinggalan bunker di Maros. Penelitian ini mencakup pendataan bunker di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa kawasan ini menjadi daya tarik bagi peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Baik yang dilakukan secara institusional maupun secara individu.

Dari perspektif Teknik Sipil, keberadaan bunker, pillbox dan baterai dengan teknologi konstruksi untuk kepentingan pertahanan dan perang merupakan objek kajian yang menarik. Jenis konstruksi ini memerlukan penelitian lebih jauh untuk melihat jenis

konstruksi yang digunakan pada tujuan dan kondisi tertentu. Dalam ilmu kemiliteran, keberadaan fasilitas pertahanan tersebut baik jenis maupun tata letaknya menarik untuk menjadi bahan penelitian. Jenis fasilitas dan tata letaknya dapat memberikan gambaran tentang strategi perang yang digunakan dalam menghadapi musuh. Termasuk potensi-potensi ancaman dari pihak lawan.

c. *Nilai Penting Pendidikan*

Sebagai struktur cagar budaya yang masih *in situ*, tinggalan bunker di Kawasan Pattunuang berpotensi untuk dijadikan *Site Museum*. Sebagai museum, keberadaannya selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Paling tidak dalam satu periode kesejarahan nusantara maupun dalam konteks perang fasifik pada saat perang dunia ke II.

d. *Nilai Penting Kebudayaan*

Dari sisi kebudayaan, cagar budaya di Pattunuang ini mencerminkan hasil kebudayaan khususnya teknologi perang pada awal abad 20. Sistem pertahanan berupa bunker dengan konstruksi beton bertulang serta jenis persenjataan berupa meriam artileri pantai merupakan pencapaian teknologi. Dalam sejarah perang dunia, peperangan tidak hanya pertempuran antara serdadu, tetapi juga pada persaingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antara dua negara yang berperang.

Cagar Budaya adalah bagian dari sistem budaya masa lampau, tetapi keberadaannya di masa kini sehingga juga menjadi bagian dari sistem budaya masa kini. Pendekatan budaya melihat kebudayaan masa kini adalah kelanjutan masa lampau yang tentu berkaitan erat. Karena itu, pendekatan budaya lebih menekankan pada konsep pelestarian yang dinamis (Mason, 2002). Pestaarian adalah upaya mempertahankan agar tetap Cagar Budaya itu berada dalam sistem budaya masa kini dengan selalu memberi makna baru yang sesuai. Karena itu, pada dasarnya, makna Cagar Budaya itu harus tetap relevan di masa kini. Di dalam semua proses kegiatan pelestarian tersebut, ada dua hal penting harus mendapat perhatian utama, yaitu **keaslian** (*originality*) dan **keterpaduan** (*integrity*).

Oleh karena itu, dalam konsep pelestarian Cagar Budaya perlu juga diperhitungkan keadaan kawasannya. Salah satu hal yang belum banyak dilakukan dalam upaya pelestarian Cagar Budaya adalah tahapan penyajian nilai penting kepada masyarakat luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelestarian bukan merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang tengah mengalami perubahan besar. Harus ada keyakinan sekecil apapun langkah upaya pelestarian yang dimulai dari diri kita sendiri suatu saat akan dapat kita syukuri. Walaupun kini belum kita rasakan manfaatnya secara nyata, setidaknya upaya ini dapat dipandang sebagai investasi untuk

generasi penerus (Tanudirjo, 2004). Dalam konteks ini, perlu dipertegas bahwa pelestarian Cagar Budaya merupakan bagian dari proses pewarisan budaya yang membuktikan bahwa generasi masa kini peduli terhadap generasi selanjutnya (Yadi Mulyadi, 2015).

Pelaksanaan pelestarian dalam kasus bunker Pattunuang di Samangki Maros ini masuk dalam katagori perlindungan. Hal ini mengingat tinggalan tersebut memenuhi kriteria sebagai cagar budaya sebagaimana peraturan perundangan cagar budaya. Berdasarkan aspek tipologi bunker tersebut berupa pillbox, baterai dan bunker. Masing-masing dari tinggalan tersebut memerlukan upaya perlindungan yang berbeda sesuai dengan kondisinya, hal ini berdampak langsung pada model pelindungannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pelestarian Pillbox 1

Pillbox terletak di titik 05°03'12,4" LS dan 119°43'13,1" BT—setelah dioverlay dengan peta jalur jalan *elevated road*—berada persis pada jalur jalan tersebut, sehingga aktifitas pembangunan jalan tersebut berdampak langsung pada kelestarian Pillbox tersebut. Berdasarkan hasil analisis arkeologis maupun teknis, Pillbox tersebut terancam rusak, hancur atau musnah akibat pembangunan jalan layang, di satu sisi jalur jalan layang tersebut telah melalui kajian teknis sehingga tidak memungkinkan untuk memindahkan jalur jalan layang tersebut. Mengacu pada kondisi itu, perlu adanya tindakan penyelamatan Pillbox sebagai cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada Pasal 57 "Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan". Lebih lanjut terkait dengan dasar hukum mengenai upaya penyelamatan cagar budaya diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 58 ayat (1) bahwa Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

- (a) mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
- (b) mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 59 yaitu ayat:

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian

- 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Merujuk pada Pasal 57-59, Pillbox direkomendasikan untuk dipindahkan ke tempat lain yang aman karena merupakan cagar budaya yang terancam rusak akibat adanya pembangunan jalan layang yang juga merupakan hal penting untuk masyarakat sebagaimana pelestarian cagar budaya. Proses pemindahan cagar budaya Pillbox tersebut harus dilakukan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) yaitu pemindahan cagar budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian dalam hal ini Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 bahwa "Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai".

Berdasarkan pertimbangan tersebut tim pada saat survei lapangan, melaksanakan prosedur standar dalam penyelamatan yaitu perekaman data total terhadap bangunan pillbox, sebagai salah satu langkah antisipatif dalam ranah *save by record*. Hasil perekaman data total tersebut, menjadi dokumen acuan dalam proses pemindahan pillbox tersebut. Penentuan lokasi baru untuk Pillbox, harus mempertimbangkan aspek pelestarian Pillbox sebagai cagar budaya. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan data Pillbox dan pertimbangan teknis, perlu dilakukan kajian teknis terkait dengan metode dan teknologi pemindahan Pillbox tersebut, untuk menjamin keutuhan dan keselamatannya.

Penentuan lokasi baru untuk penempatan struktur Pillbox harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Proses pemindahan Pillbox mulai dari tahap awal sampai akhir didokumentasikan secara menyeluruh. Apabila terdapat bagian dari material Pillbox yang lepas dari struktur, dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maros untuk dijadikan sebagai koleksi museum. Apabila proses pemindahan Pillbox berdampak pada kerusakan strukturnya maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya pemugaran sebagaimana diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- b. Pelestarian Baterai dan Bunker

Baterai terletak di titik 05°03'02,2" LS dan 119°43'17,1" BT sedangkan Bunker terletak di titik 05°03'01,7" LS dan 119°43'16,1" BT, setelah dioverlay dengan peta jalur jalan *elevated road* kedua struktur cagar budaya ini tidak berada pada jalur jalan tersebut. Dengan demikian potensi keterancamannya akibat dampak pembangunan jalan *elevated road* relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Pillbox. Oleh karena itu upaya pelestarian Baterai dan Bunker tidak perlu

dilakukan dalam bentuk pemindahan. Kedua struktur cagar budaya ini tersebut dapat dipertahankan keberadaannya di lokasi tersebut mengingat penempatan Baterai dan Bunker dalam konteks strategi pertahanan tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang.

Upaya pelestarian yang perlu dilakukan yaitu pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 76:

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

Selain itu, tetap perlu tindakan preventif untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi merusak struktur Baterai dan Bunker pada saat aktifitas pembangunan jalan *elevated road* berlangsung. Hal ini mengingat jarak antara area yang menjadi jalur jalan cukup dekat dengan lokasi kedua pillbox tersebut. Oleh karena itu, selama proses pembangunan jalan di sekitar area Pillbox perlu pengawasan dari tenaga ahli arkeologi dan atau tenaga ahli pelestarian yang memiliki sertifikasi kompetensi, serta koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros.

6. Pengembangan dan Pemanfaatan Bunker sebagai cagar budaya

Tahapan selanjutnya dalam pelestarian cagar budaya, yaitu berupa pengembangan dan pemanfaatan. Secara tegas hal ini diamanahkan dalam undang-undang cagar budaya yaitu bahwa pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan bunker di Patunuang Maros ini tentunya harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan cagar budaya yaitu sebagai objek pariwisata budaya.

Kegiatan pemanfaatan bunker sebagai cagar budaya harus mempertimbangkan aspek perlindungan warisan budaya (*tangible*) dan (*intangible*) atau yang masih hidup (*living heritage*), hal ini didukung pula oleh kondisi lingkungannya yang layak untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata. Namun jika, hal itu tidak diiringi dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, maka dikuatirkan akan berdampak pada kelestarian cagar budaya ataupun akan ditinggalkan oleh wisatawan.

Pemanfaatan cagar budaya dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi, dengan memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk mengelola sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata tersebut (Sektiadi, dkk, 2009 dalam Sumiati As dan Adrisijanti M.R, 2012:330).

Poin penting dari pengertian di atas, bahwa dalam hal perencanaan pengelolaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan pariwisata seharusnya melibatkan masyarakat, begitu juga dengan pemanfaatannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut. Selanjutnya, Ardika (2012), menawarkan sebuah konsep pengembangan pariwisata berbasis arkeologi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian (*community based conservation*) untuk mendapatkan manfaat dalam kegiatan pelestarian dan pariwisata. Di lain pihak situs memiliki potensi ekonomis khususnya pariwisata, yang dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat bila dikembangkan dan dikelola dengan baik (Bowlder, 1984).

7. Penutup

Kajian pelestarian Bunker Pattunuang ini meliputi areal yang dilintasi pembangunan jalan poros Maros-Bone, khususnya segmen 1 sepanjang 3.500 m. Kegiatan survei yang dilakukan tim di lapangan mengidentifikasi 3 (tiga) buah struktur dengan indikasi kuat dan meyakinkan memenuhi kriteria sebagai struktur cagar budaya, berupa sarana militer untuk perlindungan atau pertahanan yang penting dari masa-masa kolonial, dan pelindungannya dijamin oleh negara dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keberadaan obyek-obyek serupa di daerah ini dikaitkan dengan salah satu periode sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa, khususnya periode pra-kemerdekaan Indonesia dalam konteks Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda dan Jepang di Indonesia.

Di Sulawesi, Maros termasuk wilayah yang paling strategis dalam konteks politik dan militer, dan temuan ketiga obyek ini semakin memperkuat peran tersebut. Temuan sarana pertahanan tersebar di beberapa titik strategis di Maros, salah satunya yang paling intens ditemukan di sekitar lapangan terbang lama Kadieng-Mandai. Dengan demikian ketiga obyek tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem dan strategi pertahanan yang memperkuat nilai kesejarahan sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, maka 3 temuan struktur perlindungan atau pertahanan peninggalan kolonial tersebut termasuk dalam kategori: **Pillbox**, untuk temuan pertama pada titik 0+925-0+950, **Baterai**, untuk temuan kedua pada titik 1+825 sebelah selatan jalan, dan **Bunker**, untuk temuan ketiga pada titik 1+825 sebelah utara jalan. **Pillbox** tersebut (Obyek 1) berada tepat di lokasi pembangunan jalan (*elevated road*) Segmen 1, dan berdasarkan data teknis yang diperoleh, letak, arah, atau elevasi ruas jalan yang direncanakan tidak mungkin untuk direvisi dengan berbagai pertimbangan. Dengan demikian dipastikan bahwa pillbox ini

terdampak langsung oleh pembangunan jalan, dan perlu solusi yang memadai. **Baterai** (Obyek 2) berada sangat dekat dengan lokasi pelebaran jalan (titik 1+825) sisi selatan ruas jalan, tidak terdampak langsung tetapi terancam kelestariannya apabila proses pengerjaan jalan tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pengerukan tebing untuk pelebaran jalan dapat menggerus lahan tempat berdirinya struktur baterai ini, sebab lokasinya berada di tepi atas tebing. **Bunker** (Obyek 3) berada dekat dengan lokasi pelebaran jalan (titik 1+825) sisi utara ruas jalan, tidak terdampak langsung tetapi dapat terancam kelestariannya apabila terdapat kelalaian dalam proses pengerjaan jalan tersebut. Aktivitas proyek, pembuatan tanggul penahan (*retaining wall*), penimbunan, dan lain-lain dapat mengganggu bunker yang berada di dalam gua alam yang posisinya di bawah lereng jalan.

Dengan mempertimbangkan poin-poin kesimpulan tersebut di atas, dan memperhatikan berbagai kondisi nyata di lapangan, maka beberapa tindakan yang perlu dilakukan agar pembangunan jalan sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak mengorbankan cagar budaya, maka temuan 3 buah struktur ini (pillbox, baterai, dan bunker) perlu untuk segera dilakukan penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros. Ketiga struktur cagar budaya ini perlu segera dilakukan upaya perlindungan selain ditetapkan sebagai cagar budaya. Terkait dengan kepentingan kelanjutan pembangunan *elevated road* yang sangat penting bagi masyarakat umum, dan dengan pertimbangan bahwa secara teknis tidak memungkinkan untuk dipertahankan, maka Pillbox **dipindahkan** ke tempat yang keamanannya terjamin, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (1).

Pemindahan Pillbox harus memperhatikan aspek teknis terkait dengan upaya untuk meminimalisasi potensi kerusakan struktur pillbox, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (2). Proses pemindahan Pillbox berlangsung di bawah pengawasan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah dan didokumentasikan secara total, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 59 ayat (2). Setelah pemindahan, pembangunan jalan (*elevated road*) dapat dilanjutkan dengan ketentuan kewajiban memasang penanda permanen di atas bekas tapak struktur Pillbox sebagai bukti keberadaannya.

Adapun lokasi pemindahan yang direkomendasikan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan arkeologis. Pada lokasi baru yang disepakati untuk tempat pemindahan Pillbox perlu ditata sedemikian rupa dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya sesuai dengan petunjuk dari tenaga ahli pelestarian, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anonim, 2009. *Pelatihan Surveyor: Inventarisasi dan Identifikasi Benteng-Benteng di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- , 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Jakarta.
- Ardika, I Gede. 2012. Pariwisata Minat Khusus Berbasis Arkeologi: Dalam Buku Arkeologi Untuk Publik. IAAI. Jakarta.
- Bowlder, Sandra. 1984. *Archaeological Significance as a Mutable Quality*. Dalam Sharon Sullivan & Sandra Bowlder (ed.), *Site Surveys and Significance Assessment in Australian Archaeology*. Canberra: The Australian National University.
- Hakim Lukman, 2015. *Bangunan-Bangunan Peninggalan Jepang Di kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*. **Skripsi**. Makassar. Universitas Hasanuddin
- Mason, Randall. 2002. "Assesing Values in Conservation Planning: Methodological Issue and Choice. Dalam Marta de la Torre (ed). 2002. "Assessing the Values of Cultural Heritage". *Research Report*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute
- Sumiati As dan Adrisijanti M.R, 2012. Pelestarian Tongkonan Antara Kenyataan dan Harapan: Studi Kasus Tongkonan Situs Kande Api. Dalam Buku Arkeologi Untuk Publik. IAAI. Jakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya", *Makalah* dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.
- Yadi Mulyadi. 2015. Cagar Budaya untuk Masyarakat, dalam bulletin Kudungga Volume 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur



Uham Abdullah

Model Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

Abstrak

Kawasan Situs Cabbenge merupakan lokasi penemuan fosil binatang purba dan alat batu manusia purba pada lapisan-lapisan tanah berusia ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Temuan-temuan tersebut memiliki nilai yang sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Selama ini pengelolaan yang dilakukan terhadap Kawasan Situs Cabbenge oleh instansi pemerintah terkait, terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga permasalahan pelestarian Kawasan Situs Cabbenge membutuhkan keterlibatan dan sinergi antara instansi pemerintah dengan seluruh stakeholders yang ada. Model pengelolaan yang ditawarkan berupa pengelolaan terintegrasi yang diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi.

A. Latar Belakang

Kandungan fosil fauna, artefak batu, dan endapan purba yang dimiliki Kawasan Situs Cabbenge merupakan potensi yang mengandung nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal tersebut menjadikan Kawasan Situs Cabbenge sebagai salah satu situs yang mesti dilestarikan (dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan).

Penelitian dan pengkajian Arkeologi, Sejarah dan Geologi telah dilakukan di daerah Kawasan Situs Cabbenge sejak tahun 1947an hingga saat ini tahun 2016, penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh Kawasan Situs Cabbenge. Potensi yang terdapat di Kawasan Situs Cabbenge telah mampu menggambarkan sebuah ceritera masa lalu tentang kehidupan manusia, budaya, dan lingkungan di Sulawesi. Hal itu merupakan sebuah fakta bahwa Kawasan Situs Cabbenge dengan kandungan Sumber Daya Arkelogi yang dimilikinya memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan pendidikan. Namun Kawasan Situs Cabbenge masih menyisahkan beberapa permasalahan dibidang pengembangan pengetahuan, bidang pelindungan, dan bidang pemanfaatan.

Permasalahan dibidang pengembangan pengetahuan, yakni:

1. Manusia pendukung: hingga saat ini belum ditemukan spesimen fosil manusia pendukung, pembuat dan pengguna dari alat-alat batu yang ditemukan di Kawasan Situs Cabbenge. Hal tersebut sangat menarik untuk dibicarakan, karena sejarah telah menunjukkan bahwa di Situs Sangiran yang ditemukan pertama adalah artefak batunya baru kemudian menyusul temuan fosil manusianya, demikian juga di situs-situs sejenis di Pulau Jawa. Pertanyaannya kemudian adalah apakah fosil manusia di Kawasan Situs Cabbenge telah ditemukan, tetapi tidak teridentifikasi ataukah memang belum ditemukan.
2. Kronologi dan konteks stratigrafi temuan: temuan-temuan artefak dan temuan-temuan fosil fauna di Kawasan Situs Cabbenge sebagian besar merupakan temuan permukaan. Temuan kontekstual stratigrafi yang signifikan adalah temuan ekskavasi di Talepu berupa artefak batu yang berasosiasi dengan fosil hewan vertebrata dengan usia absolute sekitar 200.000 kyr - 118.000 tahun yang lalu atau Kala Pleistosen Tengah (Bergh, 2001). Sementara usia relatif hewan berada diantara 2,5 mya hingga 0,18 mya atau Kala Pliosen Akhir – Kala Pleistosen Tengah (Bergh, 1999:178). Masih dibutuhkan temuan-temuan kontekstual yang lain untuk mengkonfirmasi dan menambah data yang telah ada tersebut. :
3. Pengelolaan data dan koleksi temuan: kegiatan survei dan ekskavasi telah banyak dilakukan di Kawasan Situs Cabbenge namun data temuan tidak dapat dikonfirmasi dan sebagian besar temuan tersebar ditempat penyimpanan masing-masing, para peneliti sering membawa temuan ketempat asal mereka. Hanya sebagian kecil temuan yang masih tersimpan di tempat penyimpanan di Rumah penyimpanan Calio dan di Museum Villa Yuliana Soppeng.
4. Masih banyak persoalan-persoalan yang belum terungkap terkait dengan pengetahuan tentang manusia, budaya, dan lingkungan purba di Kawasan Situs Cabbenge. Contohnya: sampai sekarang belum diketahui siapa manusia pembuat alat batu yang ditemukan di lokasi-lokasi ini.



Permasalahan dibidang pelindungan, yakni:

1. Status cagar budaya secara hukum: hingga saat ini lokasi-lokasi pengandung tinggalan arkeologis dan singkapan lapisan tanah berusia Pleistosen sekitar Sungai Walanae di Kabupaten Soppeng belum memiliki status sebagai cagar budaya.
2. Sebaran temuan / luas areal situs-situs di Kawasan Situs Cabbenge membutuhkan kepastian sehingga dapat dibuatkan zonasi untuk pelestariannya.
3. Belum terlihat keterlibatan warga dalam pelestarian Kawasan Situs Cabbenge.
4. Kepemilikan lahan perlu segera diinventarisir karena lokasi temuan-temuan artefak, fosil fauna dan singkapan lapisan tanah di Kawasan Situs Cabbenge sebagian besar berada diatas tanah milik warga. Hal tersebut memungkinkan terjadi konflik kepentingan, apabila tidak mendahulukan upaya pencegahan sejak awal.

Permasalahan dibidang pemanfaatan, yakni:



salah satu display di Museum Calio, perlu perbaruan (koleksi pribadi, 8 April 2016)

1. Ruang pamer sebagai representasi nilai penting: ruang pamer hasil-hasil penelitian sebagai representasi nilai penting Kawasan Situs cabbenge sekarang telah ada, yaitu Rumah/Pondok/Museum Calio, tetapi belum dikelola secara maksimal.
2. Keterlibatan warga dalam memanfaatkan Sumberdaya Arkeologi belum terlihat.

Menurut hemat kami, permasalahan-permasalahan seperti uraian diatas terjadi karena semua pihak yang berkepentingan terhadap Kawasan Situs Cabbenge belum fokus dan terkesan bekerja sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Untuk itu, kami memandang perlu diadakannya atau diwujudkan sebuah wadah yang dapat menyatukan persepsi semua pihak terkait tersebut. Wadah tersebut dapat berupa forum komunikasi rutin. Wadah tersebut nantinya akan bekerja untuk mengatasi semua permasalahan yang ada sehingga semua kandungan potensi di Kawasan Situs Cabbenge dapat dikembangkan, terlindungi dan terjaga kelestariannya, serta bermanfaat bagi masyarakat.

B. Kawasan Situs Cabbenge

a. Lokasi dan aksesibilitas

Kawasan Situs Cabbenge berada di wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng merupakan salah satu diantara 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian tengah dan disebelah utara Kota Makassar. Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang tidak mempunyai garis pantai dan seluruh wilayahnya berada di daratan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Kawasan Situs Cabbenge meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, dan Kecamatan Citta. Wilayah Desa/Kelurahan di ketiga kecamatan tersebut yang termasuk dalam wilayah Kawasan Situs Cabbenge untuk sementara ini adalah sebagian wilayah Kelurahan Cabbenge (Dusun Talepu), sebagian wilayah Kelurahan Ujung (Lingkungan Berru, Lingkungan Salaonro), sebagian wilayah Desa Paroto (Dusun Batu Asangge, Dusun Kaju Bitti, Dusun Kecce, Dusun Marale) di Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Desa Jampu (Dusun Lenrang, Dusun Jampu, dan Dusun Lenrang) di Kecamatan Liliraja, dan sebagian wilayah Desa Tinco (Dusun Lakibong) Kecamatan Citta.

BPCB Makassar telah membagi Kawasan Situs Cabbenge menjadi 10 lokalitas berdasarkan konsentrasi temuan, yaitu: 1. Situs Berru / Calio, 2. Situs Salaonro, 3. Situs Kecce, 4. Situs Paroto, 5. Situs Marale, 6. Situs Lakibong, 7. Situs Talepu, 8. Situs Lenrang, 9. Situs Lonrong, dan 10. Situs Jampu (Rustan, 2013).

b. Kondisi sosial masyarakat

Penduduk di wilayah Kawasan Situs Cabbenge mayoritas Suku Bugis sebagai penduduk asli, mereka mayoritas beragama Islam, dalam keseharian mereka lebih banyak menggunakan Bahasa Bugis selain Bahasa Indonesia. Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kawasan Situs Cabbenge adalah sebanyak 10.085 jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai 171 jiwa dalam satu km² dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar -0,26 % pertahun.

Ritual yang merupakan kepercayaan lokal yang berasal dari nenek moyak sebelum masuknya Islam di Soppeng dan secara khusus di wilayah sekitar Kawasan Situs Cabbenge yang terlihat dilakukan oleh masyarakat. Ritual tersebut berkaitan dengan rutinitas keseharian dengan skala tertentu, yaitu ritual yang berkaitan dengan pribadi seseorang, ritual yang berkaitan dengan rumah tangga, dan ritual yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar.

Bentuk-bentuk ritual yang telah ada sebelum Islam masih sering dijumpai dilakukan oleh masyarakat sekitar Kawasan Situs Cabbenge antara lain melarung di sungai,

B. Kawasan Situs Cabbenge

a. Lokasi dan aksesibilitas

Kawasan Situs Cabbenge berada di wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng merupakan salah satu diantara 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian tengah dan disebelah utara Kota Makassar. Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang tidak mempunyai garis pantai dan seluruh wilayahnya berada di daratan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Kawasan Situs Cabbenge meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, dan Kecamatan Citta. Wilayah Desa/Kelurahan di ketiga kecamatan tersebut yang termasuk dalam wilayah Kawasan Situs Cabbenge untuk sementara ini adalah sebagian wilayah Kelurahan Cabbenge (Dusun Talepu), sebagian wilayah Kelurahan Ujung (Lingkungan Berru, Lingkungan Salaonro), sebagian wilayah Desa Paroto (Dusun Batu Asangge, Dusun Kaju Bitti, Dusun Kecce, Dusun Marale) di Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Desa Jampu (Dusun Lenrang, Dusun Jampu, dan Dusun Lenrang) di Kecamatan Liliriaja, dan sebagian wilayah Desa Tinco (Dusun Lakibong) Kecamatan Citta.

BPCB Makassar telah membagi Kawasan Situs Cabbenge menjadi 10 lokalitas berdasarkan konsentrasi temuan, yaitu: 1. Situs Berru / Calio, 2. Situs Salaonro, 3. Situs Kecce, 4. Situs Paroto, 5. Situs Marale, 6. Situs Lakibong, 7. Situs Talepu, 8. Situs Lenrang, 9. Situs Lonrong, dan 10. Situs Jampu (Rustan, 2013).

b. Kondisi sosial masyarakat

Penduduk di wilayah Kawasan Situs Cabbenge mayoritas Suku Bugis sebagai penduduk asli, mereka mayoritas beragama Islam, dalam keseharian mereka lebih banyak menggunakan Bahasa Bugis selain Bahasa Indonesia. Jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kawasan Situs Cabbenge adalah sebanyak 10.085 jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai 171 jiwa dalam satu km² dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar -0,26 % pertahun.

Ritual yang merupakan kepercayaan lokal yang berasal dari nenek moyak sebelum masuknya Islam di Soppeng dan secara khusus di wilayah sekitar Kawasan Situs Cabbenge yang terlihat dilakukan oleh masyarakat. Ritual tersebut berkaitan dengan rutinitas keseharian dengan skala tertentu, yaitu ritual yang berkaitan dengan pribadi seseorang, ritual yang berkaitan dengan rumah tangga, dan ritual yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar.

Bentuk-bentuk ritual yang telah ada sebelum Islam masih sering dijumpai dilakukan oleh masyarakat sekitar Kawasan Situs Cabbenge antara lain melarung di sungai,

menanam ari-ari bayi kemudian ditanami pohon kelapa diatasnya, memberikan persembahan pada tempat yang dianggap keramat. Semua bentuk kegiatan ritual tersebut selalu dimulai dengan musyawarah diantara para tetua warga.

C. Potensi, Nilai Penting, dan Ancaman Kawasan Situs Cabbenge

a. Potensi Kawasan Situs Cabbenge

• Potensi yang dimiliki oleh Kawasan Situs Cabbenge

• 1. Potensi cagar budaya

Kawasan Situs Cabbenge merupakan kawasan dengan lapisan tanah yang mengandung sumber daya arkeologi berupa temuan fosil berbagai jenis hewan purba, berbagai jenis peralatan manusia yang terbuat dari batu. Hingga saat ini, tercatat tak kurang dari 5.000 (lima ribu temuan) telah diambil dari Kawasan Situs Cabbenge. Temuan-temuan tersebut sebagian besar merupakan temuan yang berasal dari permukaan tanah dan sebagian kecil merupakan temuan hasil penggalian (ekskavasi).

Alat batu inti yang dihasilkan adalah kapak perimbas (*chopper*), kapak penetak (*chopping tool*), kapak genggam (*hand axe*), pahat genggam (*hand adze*), sedangkan alat serpih yang dihasilkan adalah bilah (*blade*), dan serut (*scraper*). Bahan batuan yang digunakan sebagai alat batu adalah batu chert, Gamping kersikan, Jasper, Kalsedon, Tufakersikan, Vulkanik, dan Kuarsa, serta bahan yang berasal dari fosil kayu.

Beberapa jenis fauna yang ditemukan di Kawasan Situs Cabbenge antara lain Babi raksasa (*Celebochoesourus heekereni*), Babi Sulawesi (*Sus celebensis*), Babirusa (*Babyrousa babyrussa*), Gajah kerdil/pigmi endemik sompe (*Stegodon sompoensis*), Gajah Sulawesi (*Elephas celebensis* / *Archidiskodon* sp.), Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), Kura-kura darat raksasa (*Geochelone atlas* / *Testudo margae*), Buaya (*Crocodylus* sp.), Hiu (*Carcharnius* sp.), dan Ikan Pari (*Dasyatis* sp.) (Whitten, 1987 dan Bellwood, 2000)

Temuan peralatan batu tersebut berasal dari masa 200.000 tahun Kala Pleistosen Tengah yang mewakili periode peradaban manusia paling tua di Sulawesi. Sementara fosil hewan temuan dari situs ini merupakan fosil-fosil hewan yang bersal dari masa yang sangat tua, yaitu sekitar 2,5 juta tahun hingga skitar 10.000 tahun lalu. Endapan lapisan tanah di Kawasan Situs Cabbenge selain mengandung temuan alat batu dan fosil hewan purba, juga mengandung informasi tentang perubahan lingkungan yang terjadi pada lokasi tersebut dari masa ke masa, yakni:

• (1) Dimulai pada sekitar 5 juta tahun lalu atau Miosen Akhir hingga sekitar 2,5 juta tahun lalu atau Plosen Akhir, lingkungan pada masa itu di Kawasan Cabbenge berupa laut dangkal terbuka. (2) Kemudian berubah menjadi lingkungan pantai-

laguna (transisi antara lingkungan fluvial-lakustrin dengan laguna/estuarine didaerah perbatasan laut dengan darat), berlangsung sekitar 2,5 juta tahun lalu hingga sekitar 1 juta tahun lalu atau Pliosen Akhir hingga Pleistosen Awal. (3) lingkungan sungai yang terbentuk sekitar 1 juta tahun lalu atau Pleistosen awal. (4) lingkungan teras yang terbentuk sejak sekitar 900.000 tahun lalu hingga sekarang atau Pleistosen Tengah hingga Holosen (Suyono dan Kusnama, 2010; Wibowo, 2016:25-26 dalam Hasanuddin, 2016).

2. Potensi yang berasal dari warga

Warga yang berdomisili di dalam Kawasan pastinya memiliki potensi yang dapat digali dan dikembangkan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge. Potensi tersebut dapat berupa adat istiadat, lembaga musyawarah, atraksi atau pertunjukan seni, kerajinan tangan, kuliner khas, hasil pertanian, hasil peternakan, dan lain sebagainya. Namun potensi yang dimiliki warga di dalam Kawasan Situs Cabbenge belum diidentifikasi untuk pengembangan dan pengelolaan.

Selain mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, juga dilakukan identifikasi terhadap potensi konflik kepentingan yang kemungkinan terdapat pada warga setempat.

3. Potensi lingkungan alam

Kawasan Situs Cabbenge yang terletak pada di sebuah lembah merupakan sebuah potensi yang dapat menjadi peluang untuk pengembangan objek wisata alam yang diintegrasikan dengan pengelolaan potensi sumberdaya Arkeologi dan potensi yang dimiliki oleh warga. Sungai Walanae beserta anak sungainya dan bentang lahan perbukitan bergelombang lemah-sedang dengan lereng yang landai merupakan sebuah perpaduan yang cocok untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Namun potensi-potensi yang bersumber dari lingkungan alam yang terdapat di Kawasan Situs Cabbenge belum teridentifikasi.

b. Nilai Penting Kawasan Situs Cabbenge

Nilai penting yang dikandung oleh Kawasan Situs Cabbenge adalah nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan, nilai penting pendidikan dan nilai penting kebudayaan (Rustan, dkk. 2013). Nilai penting tersebut dibagi menjadi nilai penting masa lalu dan nilai penting masa sekarang dan masa yang akan datang. Berikut uraian nilai penting Kawasan Situs Cabbenge:

1. Nilai penting masa lalu

a. Nilai penting sejarah

Nilai Penting Sejarah, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah,

berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu (Tanudirjo, 2004; 6-7).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting sejarah karena hasil penelitian yang pernah dilakukan para ahli telah berhasil menempatkan situs kawasan ini sebagai salah satu dari sedikit situs paleolitik di Indonesia, dan bahkan menjadi situs paleolitik tertua di Pulau Sulawesi. Meskipun tanpa pertanggalan absolut, industri alat batu yang dikandung oleh Kawasan Situs Cabbenge membuktikan perkembangan industri alat batu purba yang menjadi dasar pemahaman teknologi alat batu pada masa selanjutnya. Kawasan Situs Cabbenge adalah penyumbang dua tahapan awal dari beberapa tahapan sejarah kebudayaan di Pulau Sulawesi.

b. Nilai penting ilmu pengetahuan

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, apabila sumberdaya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu (Tanudirjo, 2004; 6-7).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan masih menyimpan pengetahuan yang belum terungkap. Pengetahuan-pengetahuan tersebut diantaranya berkaitan ilmu arkeologi, sejarah, geologi (sedimentologi, paleontologi, dan paleoantropologi), dan biologi. Nilai penting arkeologi, dapat mencakup jaringan persebaran artefak dan manusia pendukungnya di Asia Tenggara bahkan Dunia.

2. Nilai penting masa kini dan masa yang akan datang

a. Nilai penting pendidikan

Nilai Penting Pendidikan, sumberdaya arkeologi memegang peranan yang penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting pendidikan karena pengetahuan yang dikandungnya merupakan sumber pembelajaran atau pendidikan yang terkait dengan arkeologi, sejarah, geologi, biologi, dll. Sejak ditemukannya, data yang berasal dari Kawasan Situs Cabbenge telah dicantumkan dalam banyak buku karya peneliti / ilmuwan terdepan, misalnya van Heekeren dalam bukunya *The Stone Age of Indonesia* (1972), R.P. Soejono dalam *Sejarah Nasional Indonesia I* (1991), Peter Bellwood dalam *Prehistory of The Indo-Malaysian Archipelago* (1985), Bulbeck dalam *Austronesian in Sulawesi* (2008), dll.

b. Nilai penting kebudayaan

Nilai Penting Kebudayaan, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu

berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu (Tanudirjo, 2004; 6-7).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting sejarah karena hasil penelitian yang pernah dilakukan para ahli telah berhasil menempatkan situs kawasan ini sebagai salah satu dari sedikit situs paleolitik di Indonesia, dan bahkan menjadi situs paleolitik tertua di Pulau Sulawesi. Meskipun tanpa pertanggalan absolut, industri alat batu yang dikandung oleh Kawasan Situs Cabbenge membuktikan perkembangan industri alat batu purba yang menjadi dasar pemahaman teknologi alat batu pada masa selanjutnya. Kawasan Situs Cabbenge adalah penyumbang dua tahapan awal dari beberapa tahapan sejarah kebudayaan di Pulau Sulawesi.

b. Nilai penting ilmu pengetahuan

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, apabila sumberdaya budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu (Tanudirjo, 2004; 6-7).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan masih menyimpan pengetahuan yang belum terungkap. Pengetahuan-pengetahuan tersebut diantaranya berkaitan ilmu arkeologi, sejarah, geologi (sedimentologi, paleontologi, dan paleoantropologi), dan biologi. Nilai penting arkeologi, dapat mencakup jaringan persebaran artefak dan manusia pendukungnya di Asia Tenggara bahkan Dunia.

2. Nilai penting masa kini dan masa yang akan datang

a. Nilai penting pendidikan

Nilai Penting Pendidikan, sumberdaya arkeologi memegang peranan yang penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting pendidikan karena pengetahuan yang dikandungnya merupakan sumber pembelajaran atau pendidikan yang terkait dengan arkeologi, sejarah, geologi, biologi, dll. Sejak ditemukannya, data yang berasal dari Kawasan Situs Cabbenge telah dicantumkan dalam banyak buku karya peneliti / ilmuwan terdepan, misalnya van Heekeren dalam bukunya *The Stone Age of Indonesia* (1972), R.P. Soejono dalam *Sejarah Nasional Indonesia I* (1991), Peter Bellwood dalam *Prehistory of The Indo-Malaysian Archipelago* (1985), Bulbeck dalam *Austronesian in Sulawesi* (2008), dll.

b. Nilai penting kebudayaan

Nilai Penting Kebudayaan, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu

(Tanudirjo, 2004; 8).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting kebudayaan karena akan memperkaya identitas sejarah kebudayaan Sulawesi Selatan. Situs Kawasan ini mewakili hasil pencapaian budaya purba jaman Paleolitik Sulawesi Selatan. Tentunya, keberadaannya telah membawa kebanggaan masyarakat yang secara otomatis akan menguatkan budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam konteks waktu sekarang dan masa yang akan datang.

c. Nilai penting pariwisata

Nilai Penting Kebudayaan, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo, 2004; 8).

Kawasan Situs Cabbenge diasumsikan mengandung nilai penting pariwisata karena sumber daya arkeologi yang ditampilkan di Museum Calio dapat menarik pengunjung. Data ini menunjukkan nilai penting pariwisata yang tinggi dan sangat potensial dikembangkan di masa mendatang.

C Ancaman Terhadap Potensi dan Nilai Penting Sumberdaya Arkeologi di Kawasan Situs Cabbenge

Ancaman terhadap potensi dan nilai penting sumber daya arkeologi di Kawasan Situs Cabbenge berasal dari aktifitas manusia dan aktifitas alamiah. Perubahan lahan yang disebabkan oleh kejadian alamiah (murni tanpa campur tangan manusia), misalnya banjir dan pelipatan tanah. Menurut kami, hal tersebut tidak perlu dicegah karena kami menganggap hal tersebut bukan ancaman terhadap sumberdaya arkeologi di Kawasan Situs Cabbenge, melainkan merupakan bagian dari pengetahuan yang terkait dengan proses transportasi dan proses pengendapan temuan.

Secara alamiah, lahan yang berada di Kawasan Situs Cabbenge secara terus-menerus mengalami perubahan mengikuti hukum-hukum alam. Sejarah genesa terciptanya lembah memperlihatkan betapa pembalikan-pembalikan lapisan tanah terus berlangsung, sejak munculnya lembah ini sebagai daratan pada Kala Pliosen Akhir (sekitar 3 juta tahun lalu) hingga saat ini, baik secara perlahan maupun secara tiba-tiba. Kondisi ini jelas merupakan ancaman bagi situs yang temuannya bersifat bergerak dan nilai-nilai pentingnya tidak terlepas dari konteksnya; stratigrafi maupun sebarannya. Kondisi labil ini apabila tidak diidentifikasi dan dikenali dengan baik akan menghasilkan informasi yang bias, namun upaya stabilisasi lahan tanpa mempertimbangkan siklus geologis juga akan mengabaikan informasi kronologisnya.

Lokasi-lokasi yang memiliki potensi perubahan alamian dapat dijadikan lokasi penelitian terkait dengan transportasi dan sedimentasi, dll.

Sementara ancaman yang berasal dari aktifitas warga di Kawasan Situs Cabbenge merupakan ancaman yang dapat dicegah. Aktifitas tersebut berupa aktifitas pengolahan lahan. Beberapa aktifitas warga di Kawasan Situs Cabbenge yang telah diamati dan dianggap berpotensi mengancam nilai penting adalah: tambang pasir, pembangunan rumah baru, pencetakan sawah baru, pembiaran/kebun lahan terbuka, dan pembuatan jalan tani.

Selain aktifitas warga, ancaman juga datang dari peneliti/pengkaji dan Pemerintah Daerah Soppeng. Penelitian yang dilakukan tanpa prosedur jelas akan menimbulkan dampak yang sangat serius pada penurunan nilai Kawasan Situs Cabbenge, misalnya: para peneliti mengambil temuan dari lokasi dan selanjutnya temuan tersebut disimpan ditempat masing-masing dan terkadang peneliti yang bersangkutan tidak membuat laporan penelitian, sementara laporan yang dibuat hanya dikonsumsi sendiri-sendiri tanpa dipublikasikan. Pemerintah Daerah Soppeng juga sangat berperan dalam penurunan nilai Kawasan Situs Cabbenge dengan memberikan izin untuk penambangan pasir di Sungai Walanae, Izin mendirikan bangunan di dalam Kawasan, pencetakan sawah, dan izin pembuatan jalan tani.

D. Model Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge

Selama ini pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait masih bersifat terpisah secara sendiri-sendiri dan terkesan tidak fokus. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap potensi dan nilai penting Kawasan Situs Cabbenge. Hingga saat ini, potensi dan nilai penting yang terkandung di Kawasan Situs Cabbenge belum banyak diketahui oleh publik, terutama warga setempat.

Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge didasarkan pada kondisinya saat ini dan selanjutnya diarahkan untuk mencapai kondisi ideal pada masa yang akan datang. Keterlibatan semua pihak yang terkait secara aktif sangat menentukan pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge kedepan. Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola.

a. Kebijakan Pengelolaan

1. Dasar kebijakan pengelolaan

Dasar kebijakan pengelolaan bersumber pada dua sumber hukum yaitu UU No. 11 tahun 2010 dan Perda Soppeng No. 8 tahun 2012 tentang RTRW Soppeng. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan melibatkan semua pihak yang terkait sejak dari awal perencanaan. Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge mempunyai tujuan yang mengakomodasi kepentingan pelestarian cagar budaya, pemanfaatan oleh publik, dan peningkatan kesejahteraan warga.

Berikut uraian mengenai dasar kebijakan pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge:

a. Dasar hukum

1. UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terutama landasan filosofis dan landasan sosiologis.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng. Yang tertuang pada pasal 7 huruf g, pasal 7 huruf j, dan pasal 8 ayat 7.

b. Pelibatan semua pihak

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelibatan semua pihak adalah sebuah keharusan, pelibatan dimulai dari awal. Pihak-pihak yang terkait adalah warga setempat, LSM setempat, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Soppeng (IMPS), Pemda Soppeng (SKPD terkait: Kebudayaan dan Lingkungan Hidup), BAPEDA Soppeng, DPRD Soppeng, BPCB Makassar, Puslit Arkenas, Balar Makassar, Jurusan Arkeologi FIB Unhas, Jurusan Sejarah FIB Unhas, Jurusan Sejarah UNM, Jurusan Geologi FT. Unhas, Jurusan Antropologi Unhas, Jurusan Biologi Unhas, Jurusan Pertanian Unhas, Akademi Pariwisata Makassar, Pusat Survei Geologi Bandung, dan BPSMP Sangiran.

c. Tujuan Pengelolaan

1. Melestarikan benda dan nilai budaya masa lalu, nilai penting saat ini dan potensi yang akan datang di Kawasan Situs Cabbenge.
2. Menjadikan Kawasan Situs Cabbenge sebagai sarana pendidikan dan penelitian.
3. Menjadikan Kawasan Situs Cabbenge sebagai destinasi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

b. Strategi Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge

Strategi jangka pendek pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge dimulai dengan kegiatan pendaftaran sebagai Cagar Budaya, bersamaan dengan pendaftaran dilakukan inventarisasi potensi yang terdapat atau dimiliki oleh warga di kawasan Situs Cabbenge, bersamaan dengan kedua kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan sosialisasi potensi, nilai penting, ancaman, dan rencana pengelolaan kepada semua pihak terkait, kegiatan berikutnya melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diarahkan untuk pembuatan dokumen pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge.

Berikut uraian strategi jangka pendek rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge:

1. Pendaftaran

Usulan nama yang digunakan untuk menyebut lokasi temuan artefak batu dan fosil hewan di Kabupaten Soppeng ini adalah Kawasan Situs Cabbenge. Sering dijumpai penamaan dan penulisan Situs Paleolitik Lembah Walanae, Situs Paleolitik Cabbengge, Situs Kawasan Lembah Walanae. Apabila menggunakan kata paleolitik, seakan-akan mengabaikan keberadaan fosil hewan. Lembah Walanae merupakan penamaan areal lembah yang mencakup wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Nama Kawasan Situs Cabbenge merujuk pada UU No. 11 tahun 2010, pasal 10.

Untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya harus memiliki kepastian hukum. Untuk memperoleh kepastian sebagai cagar budaya maka Kawasan Situs Cabbenge terlebih dahulu harus didaftarkan sehingga memperoleh status cagar budaya yang sah dan dilindungi oleh UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebagaimana diatur pada pasal 28 dan pasal 29

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya berkas usulan cagar budaya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, pasal 31 dan pasal 33.

Kemudian didalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng. Telah disebutkan 9 (sembilan) situs yang merupakan bagian dari Kawasan Situs Cabbengge, terdapat satu situs yang belum disebutkan dalam RTRW Soppeng yakni Situs Salaonro. Situs-situs tersebut disebutkan pada pasal 30 ayat 4 poin (a) sebagai bangunan dan lingkungan arkeologi ditetapkan di: Situs Paleolitik Jampu, Situs Kecce, Situs Marale, dan Situs Paroto di Kecamatan Lilirilau; kawasan situs Talepu, Lonrong, Lenrang Liliraja; situs Paleolitik Lakibong di Kecamatan Citta; dan pasal 30 ayat 4 point (b) sebagai bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di: Museum Calio, di Kecamatan Lilirilau.

2. Inventarisasi potensi yang dimiliki oleh warga di Kawasan Situs Cabbenge

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh warga, misalnya Untuk itu dibutuhkan kegiatan identifikasi dan kajian guna menentukan layak atau tidaknya dan jenis kegiatan apa yang dapat dikembangkan di Kawasan Situs Cabbenge sebagai bagian terintegrasi dalam kegiatan Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge.

3. Publikasi dan sosialisasi

Potensi, nilai penting, ancaman, dan rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge di publikasikan dan disosialisasikan kepada pihak terkait. Bentuk dan cara publikasi akan disesuaikan dengan kebutuhan, demikian halnya dengan bentuk dan cara sosialisasi. Bentuk dan cara publikasi dan sosialisasi akan ditentukan setelah dilakukan kajian.

4. FGD untuk pembuatan dokumen pengelolaan jangka panjang

Materi yang dibahas pada pelaksanaan FGD adalah hal-hal yang berkaitan dengan: a. Nilai penting Kawasan Situs Cabbenge, b. Potensi yang dapat dikembangkan, c. Ancaman dan solusi, d. Peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan, e. Badan (organisasi) pengelola, f. Rumusan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge, g. Pembuatan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge.

c. Dokumen Pengelolaan (Rencana Induk Pengelolaan) Kawasan Situs Cabbenge

Strategi pengelolaan jangka panjang (Rencana Induk Pengelolaan) Kawasan Situs Cabbenge akan dituangkan dalam sebuah dokumen. Didalam dokumen pengelolaan tersebut akan tertuang hal-hal yang terkait dengan organisasi pengelola dan kegiatannya. Dokumen pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge akan menjadi panduan pada setiap kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

Kebijakan, Strategi, Pengelola dan kegiatannya

a. Organisasi pengelola

Terdapat beberapa model organisasi pengelola yang dapat diterapkan pada kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya. Contoh model-model tersebut, yakni: 1. Unit Pelaksana Tekhnis sebagai perpanjangan tangan Dirjen Kebudayaan dengan tupoksi pelestarian: contohnya Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran, 2. Unit pengelola yang dibawah oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar, 3. Badan pengelola lintas instansi dengan bentuk Forum Komunikasi. Model organisasi pengelola yang kami sarankan untuk digunakan pada Kawasan Situs Cabbenge adalah Forum komunikasi.

Struktur organisasi Forum Komunikasi terdiri dari:

1. Dewan Pengarah

Dewan pengarah dikoordinir oleh Bupati Soppeng, dengan anggota: Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kepala Dinas Kebudayaan Soppeng, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, Kepala Balai Arkeologi Makassar

2. Koordinator pelaksana: Pengkaji pengembangan Cagar Budaya (pejabat yang setara)

3. Staf pelaksana:

- a. Urusan Tata Usaha dan sarana dan prasarana: dikoordinir oleh pejabat dari Dinas Kebudayaan Soppeng, dengan 3 (tiga) orang staff administrasi dan keuangan, serta juru pelihara, satpam dan cleaning servis sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok kerja Pelindungan: dikoordinir oleh pejabat pengkaji pelindungan Cagar Budaya (yang setara) dari BPCB Makassar, dengan anggota 3 (tiga) orang staff administrasi dan juru pelihara lokasi sebanyak 10 orang.
- c. Kelompok kerja Pengembangan: dikoordinir oleh pejabat peneliti dari Balar Makassar, dengan 3 (tiga) orang peneliti junior atau calon peneliti.
- d. Kelompok kerja Pemanfaatan: dikoordinir oleh pejabat dari SKPD terkait, dengan anggota 3 (tiga) orang staff yang terdiri dari 1 (satu) dari SKPD sebagai tenaga administrasi, dan 2 (dua) orang perwakilan warga setempat (urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan humas)

b. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana

1. Mengusulkan pembuatan bangunan sebagai sarana dan prasarana representasi nilai penting; Ruang Pamer, Ruang Kerja (kantor, perpustakaan, laboratorium, bengkel preparasi temuan, dan ruang penyimpanan koleksi), Lahan parkir, Kios souvenir, Taman, dan Sarana penunjang lainnya.
2. Mengusulkan pengadaan mebeler dan peralatan yang dibutuhkan
3. Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasara

c. Kegiatan Pelindungan

1. Melakukan dan mengkordinasikan kajian pelindungan
2. Membuat zonasi Kawasan Situs Cabbenge.

Usulan model zonasi untuk Kawasan Situs Cabbenge adalah model sel (bercak). Zonasi model sel sesuai dengan kondisi Kawasan Situs cabbenge, yakni sebaran konsentrasi temuan yang terdiri dari 10 lokasi (situs) yang terpisah satu sama lain dengan jarak yang bervariasi. Lokasi konsentrasi temuan secara umum terletak di belakang pemukiman penduduk, sehingga memungkinkan untuk tidak memasukkan area pemukiman kedalam zona inti.

3. Membuat dan melakukan sistem konservasi lahan dan konservasi temuan/koleksi

Metode konservasi lahan yang dapat digunakan adalah metode vegetative dan metode mekanik. Metode vegetative: konservasi dengan menggunakan tanaman. Metode mekanik: penerapan teknologi rekayasa lahan.

d. Kegiatan pengembangan

1. Melakukan dan mengkordinasikan pendalaman nilai budaya
2. Membuat dan melakukan manajemen koleksi temuan
3. Melakukan sosialisasi tentang nilai penting kawasan kepada masyarakat.

e. Kegiatan Pemanfaatan

1. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemanfaatan
2. Melakukan publikasi informasi
3. Melakukan sosialisasi tentang nilai penting kawasan kepada masyarakat.

f. Sistem monitoring dan evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan insidentil sesuai kebutuhan.

E. Penutup

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan uraian rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge, kami membuat beberapa kesimpulan untuk dijadikan acuan kegiatan pengelolaan. Berikut kesimpulan yang telah kami buat:

1. Berdasarkan potensi dan nilai penting yang dikandung oleh Kawasan Situs Cabbenge, maka dibuatlah rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge.
2. Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge bersifat integratif dan melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya.
3. Pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim didalam kawasan.
4. Rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge ini merupakan sebuah draft yang bersifat sementara dan bukan sebuah ketetapan.
5. Rencana pengelolaan Kawasan Situs Cabbenge ini dapat dijadikan panduan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta. DepDikNas.
- _____, 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Soppeng.
- Bellwood, Peter 2000, *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaya*, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Berg, Gert van den 1999, The Late Neogene elephantoid-bearing faunas of Indonesia. *Scripta Geol.*, 117
- Berg, Gert van den, et al. 2001, The Late Quaternary Paleogeography of Mammal Evolution in The Indonesian Archipelago, dalam *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 171, 2001, 385-408.
- Darvill, Timothy. 1995. *Managing Archaeology*. Cooper dkk. (ed). New York: Routledge Press Ltd.
- Hasanuddin (ed) 2016, *Lembah Walanae, Lingkungan Purba Dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Balai Arkeologi Makassar, Makassar.
- Rustan, dkk, 2013. Laporan Survei Penyelamatan Situs Paleolitik di Lembah Walanae, Cabbenge, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Tanudirjo, Daud Aris, 2004, Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya, Makalah dalam *Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya* di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.
- Whitten, Anthony. J. 1987. *Ekologi Sulawesi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.



Isu-Isu Strategis Untuk Rencana Pengelolaan Gua-Gua Prasejarah di Wilayah Rammang-Rammang, Kabupaten Maros

A. Mah. Saiful

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rammang-Rammang adalah salah satu bagian penting dalam kawasan gua prasejarah Maros dan Pangkep. Wilayah ini dikelilingi perbukitan kars yang di dalamnya juga memiliki gua prasejarah peninggalan manusia di masa lalu. Bukti keberadaan manusia pada masa lalu di gua-gua Rammang-Rammang ditunjukkan dengan adanya lukisan, sisa makanan, alat tulang serta artefak batu (Mas'ud, 2006; Syahdar, 2010; Hakim dkk, 2009). Dengan temuan tersebut penting kiranya jika gua-gua yang terdapat di wilayah itu mendapat pengelolaan yang serius.

Pengelolaan yang serius perlu diupayakan karena wilayah Rammang-Rammang kini telah menjadi objek wisata *eco tourism*¹ yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Meskipun telah ada pengelolaan masyarakat tetapi belum berada pada tataran manajemen yang terorganisasi dengan baik. Agar manajemen yang baik itu tercapai, maka perlu dilakukan kebijakan yang dihasilkan secara bersama-sama agar menemukan jalan yang terbaik (Carman, 1995, p. 18) untuk masyarakat Rammang-Rammang.

Pada persoalan ini, gua-gua prasejarah yang terdapat di Rammang-Rammang perlu mendapatkan orientasi nilai dengan mencari dan menerapkan sistem nilai yang lebih baru

¹ Wisata dengan mengandalkan lingkungan alami yang bertujuan mengkonservasi lingkungan setempat serta mensejahterakan penduduk setempat

dan dianggap menarik (Darvill, 1995, p. 40). Untuk mewujudkannya, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan pelestarian dalam hal ini pemanfaatan agar apa yang betul-betul diharapkan dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat Rammang-Rammang.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah Rammang-Rammang yang kini telah menjadi objek *eco tourism*, dahulu hanya dikenal sebagai lokasi situs arkeologi. Orang-orang yang mengunjunginya hanya yang bergelut dalam bidang arkeologi. selanjutnya komunitas pencinta alam mulai menjadikannya sebagai lokasi berwisata, disusul komunitas fotografi, lalu wisatawan minat khusus. Sejak 3 tahun belakangan ini, melalui media sosial Rammang-Rammang mulai menjadi destinasi untuk wisatawan semua kalangan.

Momen seperti itu merupakan kesempatan yang baik untuk memanfaatkan sumberdaya arkeologi di Rammang-Rammang, apalagi konsep wisata yang diusung oleh pemerintah setempat adalah wisata berbasis masyarakat. Dengan momen tersebut peluang untuk memberikan manfaat sumberdaya arkeologi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar sangat terbuka. Meskipun peluang itu ada, tetapi hingga hari ini pengelolaan sumberdaya arkeologi di Rammang-Rammang belum dilaksanakan sepenuhnya, maka dari itu kiranya perlu dilakukan pengelolaan untuk pemanfaatan sumberdaya arkeologi dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar. Untuk itu, salah satu bagian dalam rangka mencapai pengelolaan sumber daya akeologi adalah perlu mengetahui isu strategis di wilayah tersebut, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah yang diangkat adalah:

Isu-Isu Strategis apa yang terdapat di kawasan prasejarah Rammang-Rammang yang akan menjadi pertimbangan utama untuk rencana pengelolaan?

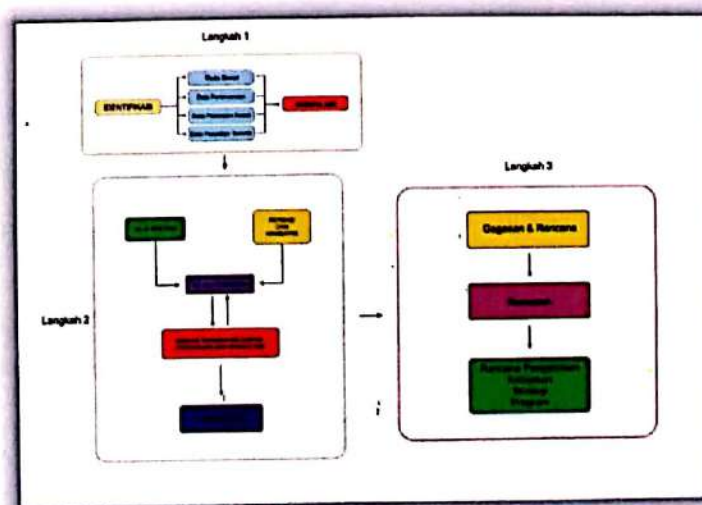
1.3 Landasan Konseptual

Arah perubahan pengelolaan sumber budaya di tanah air sudah seharusnya dilakukan dengan merubah persepsi bahwa pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki otoritas penuh terhadap langkah pengelolaan. Pandangan ini sudah seharusnya kita tinggalkan dengan melihat kembali peran pemerintah bahwa pemerintah harus mendukung dan memberikan fasilitas bagi program-program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan apresiasi terhadap sumberdaya budayaan, dengan demikian maka masyarakatlah yang akan memberi arti dan memberi nilai bagi suatu sumber daya yang dipandang sebagai bagian dari industri pariwisata atau dipandang dalam arti yang lebih dalam lagi seperti wahana pendidikan, wahana kajian ilmu, model inspirasi untuk masa kini atau bahkan dipandang sebagai jati diri suatu komunitas atau kelompok masyarakat (Tanudirjo, 2005: 1). Dengan melibatkan masyarakat lokal, mereka akan melihat sumber budaya sebagai bagian aset lingkungan mereka, sebagai sumber budaya yang berharga, yang harus dipelihara dan dilindungi, oleh karena itu masyarakat dapat

diakui sebagai kunci pelestarian untuk berbagai jenis sumber budaya (McManamon & Hatton, 2000: 11)

Pandangan yang telah diuraikan diatas sejalan dengan arti pelestarian itu sendiri. Tanudirjo (2003) mendefenisikan pelestarian sebagai upaya untuk mengaktualkan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang yang dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena itu pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri. Cleere (1990) menjelaskan bahwa manajemen warisan budaya arkeologis mempunyai dasar filosofi yang mengkaitkan kegunaan warisan budaya itu untuk jati diri (*cultural identity*) yang dikaitkan dengan fungsi pendidikan, manfaat ekonomis lewat kepariwisataan, dan fungsi akademis untuk menjaga dan menyelamatkan basis data tentang sumberdaya tersebut (Tanudirjo, 2004: 2).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan tindakan berupa tahapan kegiatan mulai dari awal hingga mencapai tujuan yang disepakati secara bersama. Adapun tahapan pengelolaan sumber daya budaya yang dirumuskan Tanudirjo (2016) memiliki tiga langkah sebagai berikut: Langkah 1, yaitu (1) Identifikasi yang terdiri atas: a) data dasar: situs dan lingkungan situs, b) data perencanaan yang dibuat oleh pihak lain seperti komunitas ataupun *stakeholder* didalamnya, c) Data pemetaan sosial: persepsi masyarakat tentang warisan budaya, konflik didalamnya, d) data penelitian tematik: hasil penelitian dari berbagai bidang ilmu dengan fokus pada tema tertentu, e) Kompilasi: risalah data sekunder dan data primer. Berikutnya langkah 2, yaitu 1) penyusunan nilai penting, 2) potensi dan hambatan, tahap (3) isu-isu strategis, dan terakhir (4) sintesis. Setelah menyusun ini, selanjutnya melakukan langkah ke 3. Langkah 3 berisi tentang hasil sintesis yang telah didiskusikans secara terarah dengan *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Langkah ke 3 bermuatan: 1) Gagasan-gagasan rencana, 2) rumusan, dan 3) Rencana pengelolaan, kebijakan, strategi, dan program.

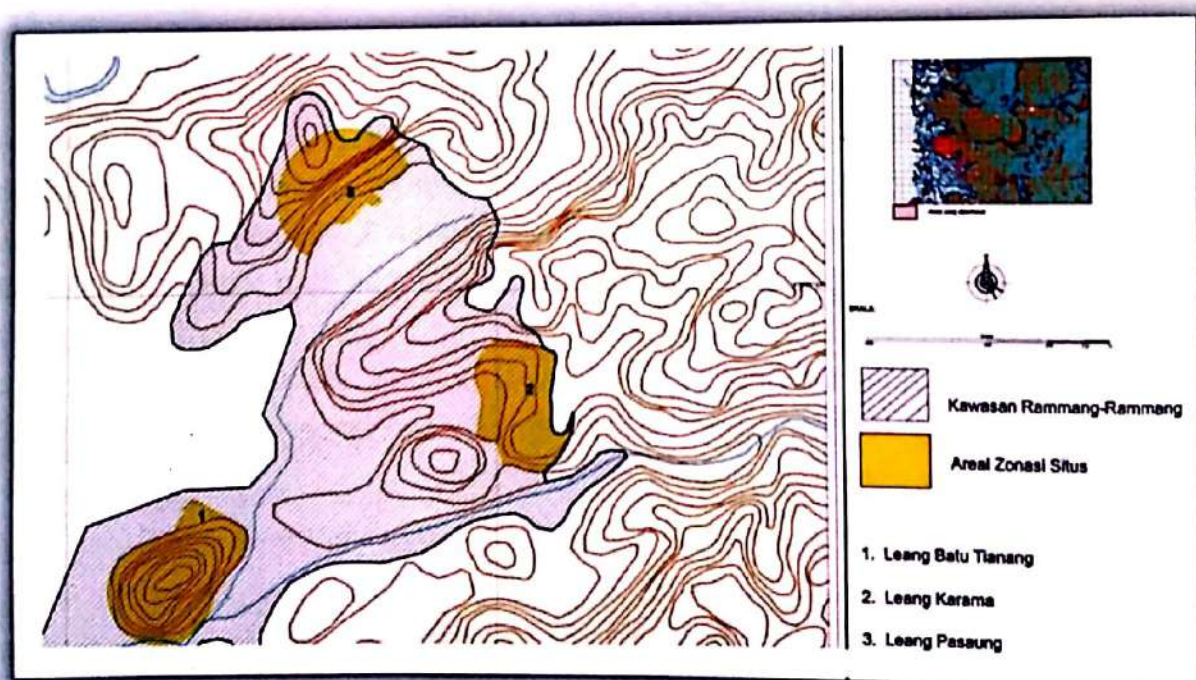


Gambar: Langkah-langkah pengelolaan Sumberdaya budaya Sumber:
Tanudirjo (materi perkuliahan tanggal 2 November 2016)

II. LOKASI

Rammang-Rammang merupakan nama dusun di desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Akse menuju tempat ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki melewati perkampungan *Batu Napara* (Desa Salenrang Kec. Bontoa) sejauh 1 Km, kemudian melewati hutan batu dan rawa hingga tiba di kaki bukit sebelah selatan karst *Bulu Baraka*. Akses lainnya dapat ditempuh melalui jalur air dengan mengendarai perahu motor menyusuri sungai Pute dengan waktu tempuh ± 30 menit.

Perkampungan Rammang-Rammang merupakan dataran yang menjadi lahan pertanian persawahan dan tambak. Dataran tersebut dikelilingi perbukitan karst serta dilintasi sungai Pute yang bermuara di selat Makassar. Flora yang dominan disekitar kampung adalah jenis palem perairan (pohon nipa) yang tumbuh disepanjang tepi sungai Pute, pohon enau, dan rotan yang tumbuh di kaki-kaki perbukitan karst. Fauna yang hidup disekitar perkampungan yaitu hewan peliharaan penduduk diantaranya, ayam, bebek, anjing, sapi, dan ikan. Sedangkan fauna liar adalah kelelawar, kuskus, monyet, ular, musang, tarsius, kupu-kupu, dan berbagai jenis burung lainnya.



Gambar 1: Peta Kawasan Gua Prasejarah Rammang-Rammang
Sumber Peta BPCB Makassar
Dimodifikasi oleh A. Muh. Saiful

III RENCANA PENGELOLAAN

3.1 Identifikasi

3.1.1 Data Arkeologi

a. Leang Batu Tianang

Leang² Batu Tianang merupakan gabungan gua dan ceruk yang terletak tepat di sisi selatan kaki bukit karst (*Clift Foot Cave*) *Bulu' Baraka*. Gua terletak pada ketinggian 6 Mdpl, Morfologi dasar gua berbentuk kekar tiang (*Columnar Joint*), menjadikan tingginya jarak antara lantai dan atap gua yaitu sekitar 20 meter. Situs gua berorientasi utara. Sepanjang bidang lantai gua sisi timur bagian atas, banyak ditemui ekofak jenis moluska dan arthropoda, adapun jenis moluska yang berhasil diidentifikasi yaitu : *Ostreidae*, *Turbinellidae*, *Ampullariidae*, *Neritidae*, *Veneridae*, *Potamididae*, *Terebridae*, *Cymatiidae*, *Melampidae*, *Archidae*, *Pyramidallidae*, *Cerithidae* dan *Mytilidae* selain itu juga ditemukan *Arthropoda* dari species *Brachyura* dalam jumlah yang cukup banyak. Bersama deposit molusca ini, ditemukan alat serpih dan batu yang diduga sisa pembuatan (*Waste Product*) serta fragmen gerabah.

Gambar cadas yang berada pada situs ini berjumlah cukup banyak dengan warna dasar merah dan hitam, adapun beberapa bentuk gambar cadas yang berhasil diidentifikasi pada gua ini yaitu, gambar tangan, gambar manusia, gambar ikan, penyu, teripang dan gambar perahu.



Gambar 2: Gambar prasejarah yang belum teridentifikasi
Foto: A. Muh. Saiful

² Bahasa masyarakat lokal untuk menyebutkan objek gua atau ceruk

b. Leang Pasaung

Leang Pasaung berada pada kaki Bulu Mabaleang yang merupakan hasil bentukan alam pegunungan gamping. Leang Pasaung merupakan situs yang berbentuk ceruk karena hanya merupakan pelataran. Tidak mempunyai ruang berupa lorong-lorong. Situs ini berada pada ketinggian 30 meter dari permukaan laut. Dengan arah hadap gua ke timur ($N 90^{\circ} E$). Ukuran panjang ceruk 54 meter, lebar 6 meter dan tinggi lantai ke langit-langit gua ± 7 meter.

Temuan arkeologi terdapat pada lantai gua berupa fragmen kerang, sisa pembakaran, serta lukisan pada dinding gua. Temuan hasil ekskavasi terdiri atas temuan kerang jenis *Amphineura*, *Gastropoda*, *Pelecypoda*, *Cephalopoda* dan *Scaphopoda*. Artefak batu dengan tipe serpih, bilah, dan maros poin. Adapun temuan tulang terdiri atas tulang babi rusa, ikan, dan kepiting. Temuan lainnya adalah alat tulang, oker, dan alat kerang.

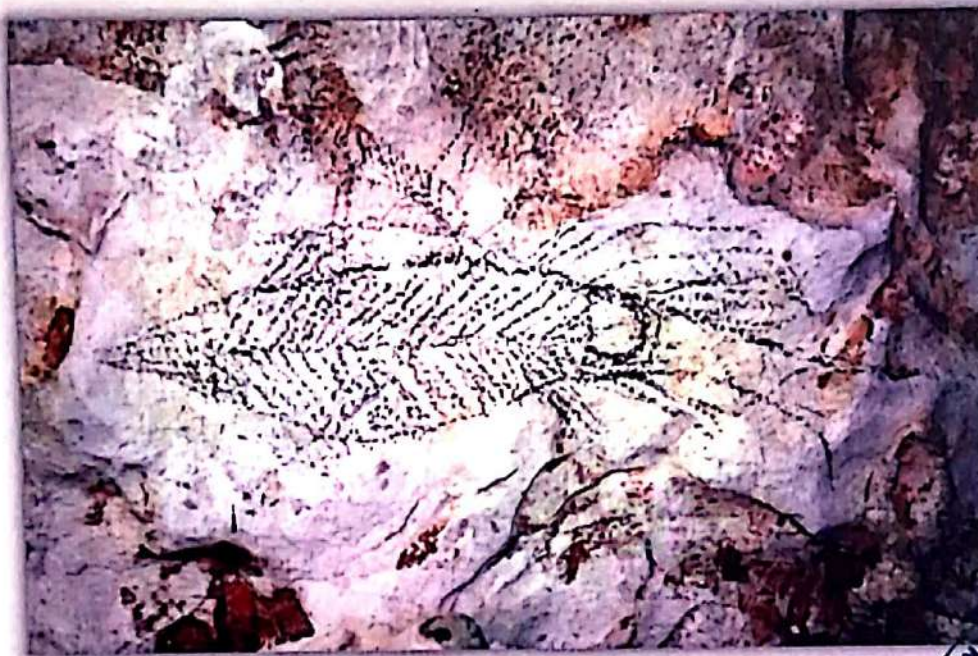


Gambar 3: Temuan ekskavasi alat tulang
Foto: Balar Makassar/Zubair Mas'ud

c. Leang Karama

Leang Karama merupakan gua yang memiliki arah hadap barat laut. Lebar mulut gua 13 meter, panjang lorong 9 meter dan langit-langit tertinggi 5,30 meter. Gua ini memiliki ornamen berupa stalagtit, stalagmit, dan pilar yang dijumpai pada atap, lantai, dan lorong gua.

Temuan arkeologi yang ditemukan pada situs ini terdiri atas gambar cadas berupa telapak tangan yang berjumlah 9 dengan warna hitam dan merah. Selain gambar telapak tangan ditemukan pula gambar yang menyerupai sosok manusia berkelompok. Jenis gambar lainnya adalah gambar geometris dan bentuk lain yang belum dapat diidentifikasi.



Gambar 4: Gambar prasejarah yang belum teridentifikasi
Foto: A. Muh. Saiful



3.1.2 Program Stakeholder

Eco Tourism merupakan lembaga yang mengusung konsep *community base tourism* (CBT). Lembaga ini sudah satu tahun melakukan aktifitasnya di wilayah Rammang-Rammang dengan memfokuskan kegiatannya terhadap kehidupan fauna-fauna endemik yang hidup di sekitarnya. *Eco Tourism* menawarkan paket wisata kepada pengunjung yang tertarik dan ingin melihat secara langsung kehidupan dan tingkahlaku fauna endemik. Lembaga ini baru membina satu warga sebagai *guide*.

Kelompok lainnya yang terdapat di Rammang-Rammang adalah Komunitas Hutan Batu. Komunitas ini dikelola oleh masyarakat setempat yang bergerak pada pengelolaan sampah masyarakat dan retribusi pengunjung. Selain kelompok ini, terdapat juga kelompok-kelompok *pa'jolloro*³ yang belum terorganisasi. Kelompok inilah yang mengantarkan pengunjung serta memberikan informasi yang terkait dengan Rammang-Rammang sekaligus terkadang juga menjadi *guide*.

³Jolloro adalah bahasa lokal untuk menyebutkan objek perahu kecil yang menggunakan mesin. Sedangkan penambahan kata "pa" merujuk pada subjek, menjadi *pa'jolloro* berarti orang yang mengemudikan perahu mesin.

Dinas Pariwisata Maros telah memulai kegiatannya di Rammang-Rammang pada tahun 2014 dengan menyusun RIPO (Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata). Konsep yang diusung adalah *eco tourism* yang berbasis masyarakat. Program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Maros adalah pembangunan infrastruktur berkebutuhan dasar, seperti dermaga. Arah terhadap pembangunan infrastruktur sangat dibatasi, hal ini terkait dengan konsep *Eco Tourism*. Program yang diutamakan lebih pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, diantaranya pelatihan pemandu wisata, menginisiasi kelompok sadar wisata, dan menginisiasi pembuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan, seperti aturan pengelolaan sampah dan sungai, dan mendorong pemerintah daerah membuat RTDPL (Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan). Selain Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga terlibat pada pembinaan masyarakat menyangkut produksi UKM (Usaha Kecil Menengah) dan Dinas Pemuda Olah Raga terlibat dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris Masyarakat.

Stakeholder yang akan terlibat lagi adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Instansi ini yang punya kewajiban dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Selanjutnya Balai Arkeologi Sulawesi Selatan akan terlibat dalam hal menyebarkan hasil penelitiannya di situs Rammang-Rammang. Universitas Hasanuddin, khususnya jurusan arkeologi disini punya tanggung jawab dalam mengaplikasikan *Tridarma* perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuannya dan juga BOSOWA Maros pada kegiatan CSR Perusahaan.

3.1.3 Pengetahuan Masyarakat Tentang Warisan Budaya dan Masalahnya

Hingga hari ini, masyarakat Rammang-Rammang mengetahui tentang gua-gua yang terdapat di sekitar lingkungannya. Mereka bisa menyampaikan pada pengunjung bahwa gua tersebut adalah gua prasejarah yang dulunya pernah dihuni oleh manusia, harus dilindungi, dan berpotensi jika dikembangkan. Letak permasalahan masyarakat adalah mereka belum bisa menjelaskan tentang sejarah kehidupan ataupun tingkahlaku kehidupan masa lalu yang pernah terjadi di gua tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimilikinya hanya sebatas pengetahuan permukaan saja.

Para *pa'jolloro* yang terkadang menjadi *guide* pengunjung hanya sebatas menyampaikan tentang keberadaan gua prasejarah tersebut dan sebatas mengantar pengunjung yang berminat mendatanginya. Mereka belum bisa menyampaikan kepada pengunjung informasi-informasi yang lebih detail tentang apa yang terjadi di gua tersebut pada masa lalu.

Meskipun demikian, masyarakat telah menyadari bahwa gua prasejarah itu adalah pelindung lingkungan mereka dari perusahaan-perusahaan tambang yang mengincar wilayah rammang-Rammang. Mereka juga mengetahui bahwa gua-gua prasejarah yang terdapat disekitarnya itu perlu dipertahankan.

Masalah-masalah lainnya yang terjadi sekarang dalam masyarakat diantaranya munculnya konflik monopoli pengunjung, belum terjalinya komunikasi yang baik antara komunitas yang terlibat didalamnya, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan belum benar-benar diterapkan.

3.1.4 Hasil Penelitian Tematik

a. Deliniasi dan Zonasi

BPCB Makassar telah melakukan dua kegiatan penelitian yaitu penelitian Deliniasi dan Zonasi. Kegiatan Deliniasi dilakukan pada tahun 2011. Hasil deliniasi menetapkan tiga situs yang terdapat di wilayah Rammang-Rammang sebagai sub kawasan cagar budaya. Batas sub kawasan ditentukan dengan mengikuti batas zonasi yang dikombinasikan dengan batas-batas geografis, diantaranya garis kontur 125-175 meter, sisi barat sungai Pute dan sisi barat kaki Bulu Barakka, sisi tenggara mengikuti lereng sebelah barat perbukitan karst utama. Kegiatan zonasi juga dilakukan pada tahun 2011 dengan memfokuskan pada zonasi Leang Batu Tianang. Kegiatan ini menghasilkan batas zona inti dan zona penyangga situs leang Batu Tianang. Zona inti mencakup keseluruhan rongga gua, dan akses menuju gua yang berada pada lereng tebing (pelataran) depan gua dengan luas total 620 m² (0,062 Ha). Zona penyangga ditentukan berdasarkan dua pertimbangan utama yakni aspek keamanan dan aspek keserasian lingkungan. Zona ini mencakup keseluruhan bukit kars (Bulu Barakka) dan empang yang berada di depan mulut gua. Luas total zona ini yaitu 20,7 ha.

b. Penelitian Arkeologi Murni

Penelitian arkeologi murni dilakukan oleh Balai Arkeologi Makassar di tahun 2002. Tahun 2007, Balai Arkeologi bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Universitas Wollongong, Australia juga melakukan penelitian di Leang Pasaung. Selanjutnya, di situs yang sama Zubair Mas'ud (2006) melakukan penelitian sebagai tugas akhir kuliah dengan memfokuskan penelitiannya pada makanan yang menjadi pendukung kebudayaan di Leang Pasaung. Selanjutnya Fardi Ali Syahdar (2010) melakukan penelitian sebagai tugas akhir kuliah yang memfokuskan pada gambar cadas yang terdapat di Leang Batu Tianang.

c. Penelitian Fauna Endemik

Lembaga *Eco Tourism* membangun usahanya di Rammang-Rammang sejak satu tahun yang lalu. Lembaga ini sudah melakukan observasi terkait potensi

yang menarik di kawasan Rammang-Rammang. Salah satu sumber daya yang sangat berpotensi di Rammang-Rammang adalah keberadaan fauna-fauna endemik Sulawesi, diantaranya burung, burung hantu, elang, dan kelelawar. Lembaga ini telah bekerjasama dengan orang Belanda membuat film dokumenter tentang hewan endemik tersebut.

3.1.5 Kompilasi

Rammang-Rammang sebagai kawasan Prasejarah dan Kawasan wisata lingkungan telah berjalan selama dua tahun dalam konsep *eco tourism* yang dikelola oleh masyarakat Rammang-Rammang. Meskipun pengelolaannya dibawah tangan masyarakat tetapi tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah. Terdapat tiga jenis wisata dalam lingkungan Rammang-Rammang, yaitu wisata lanskap, wisata flora fauna, dan wisata budaya. Jika wisata flora fauna telah dikelola oleh *eco tourism* Sulawesi selatan, tidak demikian dengan wisata budaya. Wisata budaya yang diangkat di Rammang-Rammang adalah wisata gua-gua prasejarah. Jenis wisata ini belum dikelola oleh masyarakat.

Ada tiga lembaga di Sulawesi Selatan yang terkait dengan gua-gua prasejarah tersebut, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Balai Arkeologi Makassar, dan Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin. Ketiga lembaga tersebut telah bekerja di kawasan Rammang-Rammang jauh sebelum Rammang-Rammang menjadi objek wisata *eco tourism*. Oleh karena itu jika ketiga lembaga ini kembali berperan aktif dalam hal pelestarian, khususnya pada aspek pemanfaatan gua-gua prasejarah, maka tentunya akan berdampak positif, baik itu terhadap situs gua-gua prasejarah ataupun terhadap masyarakat.

3.2 Nilai Penting

Tanudirjo (2004 dalam modul 1.2) membagi nilai penting menjadi tiga, yaitu nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai penting kebudayaan. Nilai sejarah adalah sumber daya yang dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berkaitan erat dengan tahap perkembangan suatu kehidupan tertentu atau tinggalan yang mewakili salah satu tahapan tersebut. Nilai ilmu pengetahuan adalah sumberdaya budaya yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Nilai kebudayaan adalah sumber budaya yang dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri bangsa atau komunitas tertentu. dalam nilai kebudayaan ini terdapat, 1) etnik, yaitu memberikan pemahaman latar belakang sosial, sistem kepercayaan dan mitologi yang semuanya merupakan jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. 2) estetik, yaitu

kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangunan, seni suara maupun bentuk kesenian lainnya, termasuk keserasian antara bentang alam dan karya budaya: menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan mendatang. 3) publik, yaitu berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya, menyadarkan tentang keberadaan masyarakat sekarang, berpotensi menjadi sarana fasilitas rekreasi, dan berpotensi telah menjadi sumber daya yang dapat menambah penghasilan masyarakat, salah satunya lewat pariwisata. 4) politis, yaitu ketika warisan budaya dipakai sebagai legitimasi politis kelompok atau negara tertentu.

1. Nilai Penting Sejarah

Jazirah sulawesi selatan telah didiami oleh manusia sejak 118 kyr di situs Talepu, Lembah Walanae dengan temuan artefak batu yang berasosiasi bersama fosil vertebrata (Bergh, et al., 2016). Di kawasan karst Maros dan Pangkep, kebudayaan tertua di temukan di Leang Timpuseng, yaitu berusia 39.900 berdasarkan penanggalan dengan metode *uranium-series* terhadap lukisan babi dan telapak tangan (Aubert, et al., 2014). Kehidupan pada masa akhir pleistosen manusia pendukung di kawasan ini dicirikan dengan aktifitas berburu binatang yang berukuran besar seperti anoa dan kelompok suidae (*Sus celebensis sp.* dan *Babirusa sp.*). Dalam periode tersebut, manusia lebih mudah mendapatkan *sus celebensis sp* dibanding dengan *anoa sp.* Disamping itu mereka juga mendapatkan binatang seperti musang dan mamalia kecil lainnya. (Simons & Bulbeck, 2004, pp. 177, 184). Kehidupan akhir pleistosen lainnya di kawasan ini ditemukan di Leang Burung dengan usia tertua 31.000 BP (Glover, 1975) dan di Leang Sakapao berusia 28.000 BP (Bulbeck, Sumantri, & Hiscock, 2004).

Berdasarkan hasil penanggalan, aktifitas manusia selain berburu adalah membuat gambar pada langit dan dinding gua. Kebudayaan membuat gambar merupakan aktualisasi tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kepercayaan. Mereka menggambar telapak tangan dan hewan sebagai bentuk *sympatethic magic* yang berhubungan dengan ritual perburuan (Permana, 2008). Di situs lainnya, gambar telapak tangan dan hewan pada gua merupakan bentuk perwujudan kehidupan sehari-hari mereka yang berkaitan dengan suka dan duka dalam melakukan aktifitas perburuan (Saiful, 2016). Kehadiran gambar telapak tangan tersebut membuktikan bahwa manusia pada masa akhir pleistosen telah mengenal kepercayaan, diari kehidupan dan seni menggambar.

Pada Awal Holosen, kehidupan di gua-gua Maros dan Pangkep mengalami perubahan dalam pembuatan artefak batu. Perubahan tersebut dibuktikan dengan hadirnya kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan di masa pleistosen. Kebudayaan ini disebut sebagai Toalian yang dicirikan dengan hasil kebudayaan

yang hidup di lingkungan gelap seperti di dalam gua juga memiliki potensi ke depan.

Sebagai kawasan yang dikelilingi bukit karst, keberadaan gua-gua di lingkungan ini cukup terbuka. Baru-baru ini, masyarakat telah mempublikasikan satu gua yang didalamnya memiliki ornamen yang aktif dan kondisi dalam gua yang bersih. Mungkin jika dieksplorasi lebih luas dengan fokus pada eksplorasi gua, tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah gua di kawasan ini. Keberadaan gua di kawasan ini, baik itu yang telah diokupasi oleh manusia di masa lalu ataupun yang tidak, memberi ruang kepada speleologi untuk diteliti. Tidak hanya berkaitan dengan morfologi gua, tetapi sumber daya dari gua itu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Gambar cadas yang terdapat pada tiga gua prasejarah di Rammang-Rammang memiliki potensi untuk diteliti oleh bidang kajian seni rupa, baik itu aspek teknik menggambar ataupun mungkin aspek kognitif, khususnya gambar cadas yang terdapat di Leang Bulu Tianang dan Leang Karama.

Dalam beberapa tahun belakangan ini Rammang-Rammang cukup dikenal oleh masyarakat Makassar. Bahkan para wisatawan lokal yang datang berasal dari luar Sulawesi Selatan, tidak sedikit pula wisatawan mancanegara yang datang. Rammang-Rammang dikenal oleh masyarakat luar dengan sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu lanskap bukit karst. Para pengunjung, komunitas, belakangan ini rutin mempublikasikannya, baik itu melalui media sosial ataupun melalui papan iklan di beberapa tempat. Hingga saat ini Rammang-Rammang dikelola oleh masyarakat setempat, baik itu yang terorganisasi atau yang tidak terorganisasi. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang kepariwisataan ditempat ini cukup terbuka, khususnya dalam penelitian untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat, wisata berbasis lingkungan ataupun wisata petualangan.

3. Nilai Penting Kebudayaan

Nilai penting kebudayaan yang terdapat di kawasan prasejarah Rammang-Rammang adalah nilai estetik, publik, dan politis. Nilai estetik dapat disaksikan berdasarkan keberadaan gambar cadas di ketiga gua tersebut. Gambar cadas tersebut dapat menjadi sumber inspirasi, baik itu di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Nilai estetik lainnya adalah keindahan lanskap Rammang-Rammang yaitu sungai yang di tepi kiri dan kanannya hidup pohon nipa, gugusan perbukitan karst yang mengelilingi perkampungan Rammang-Rammang, serta suasana *sunset* dan menyaksikan kelelawar terbang keluar dari sarangnya di sore hari.



Gambar 5: Lanskap alam Rammang-Rammang
Foto: Ifulk Fullah

Nilai publik yang dikandungnya adalah sebagai wahana pendidikan dan wahana wisata. Keberadaan gua-gua prasejarah dapat menjadi laboratorium lapangan untuk mahasiswa arkeologi dan seni. Selain itu menjadi sarana pendidikan untuk para pengunjung tentang kebudayaan prasejarah terkait seni, kepercayaan, dan kehidupan sosialnya. Disamping ilmu arkeologi dan seni, Rammang-Rammang dapat juga menjadi laboratorium lapangan untuk mahasiswa biologi khususnya yang mempelajari fauna dan flora endemik Sulawesi. Mahasiswa Akademi Pariwisata dapat pula menjadikannya sebagai media pendidikan lapangan mereka untuk pariwisata berbasis masyarakat.

Kawasan Rammang-Rammang dengan segala potensi yang dimilikinya dapat menjadi suatu kawasan yang terbebas terhadap ancaman dari pihak luar yang berniat mengeksploitasi sumber daya alamnya. Kawasan Rammang-Rammang dilindungi oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Masyarakat yang telah merasakan sisi ekonomi dan memiliki kesadaran terhadap potensi lingkungannya tentu akan bersatu berjuang keras mempertahankan apa bila ada pihak luar yang bermaksud merusak sumber daya kawasannya. Oleh karena itu undang-undang tersebut dapat menjadi kekuatan melawan hal-hal yang bersifat politis.

1.3 Potensi dan Hambatan

Secara garis besar potensi yang dimiliki kawasan prasejarah Rammang-Rammang terdiri atas dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya. Potensi sumber daya alam terdiri atas habitat endemik Sulawesi, habitat tumbuhan perairan dan tumbuhan karst, lanskap karst, gua, dan material tambang. Sedangkan potensi sumber daya budaya adalah gua-gua prasejarah yang memiliki gambar cadas.

Potensi sumber daya alam telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai objek pariwisata. Aspek pariwisata tersebut telah mendatangkan keuntungan finansial masyarakat sekitar. Keuntungan masyarakat diperoleh dari penyewaan lahan parkir, penyewaan perahu motor, penyewaan topi, penginapan, dan *guide* perjalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai dinas Pariwisata Kabupaten Maros, yaitu bapak Yusriadi mengatakan bahwa selama tahun 2016 jumlah pengunjung yang datang mencapai ± 40.000 orang, ± 2000 orang diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Hasil wawancara dengan masyarakat setempat, Darwis (31) pada umumnya pengunjung yang datang ke Rammang-Rammang memiliki tujuan menikmati lanskap alam. Sedangkan Udin (46) mengatakan bahwa wisatawan yang datang ke Rammang-Rammang untuk melihat fauna endemik yang pada umumnya adalah wisatawan mancanegara.

Gua prasejarah yang terdapat di Rammang-Rammang merupakan salah satu bagian paket wisata yang ditawarkan Rammang-Rammang. Hanya saja peminat wisata budaya ini masih sangat minim. Padahal sebagian besar pengunjung tahu keberadaan gua prasejarah di Rammang-Rammang, baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara. Dari hasil wawancara terhadap tiga responden, mereka menyampaikan bahwa kendala utama masyarakat disini karena belum bisa menjelaskan gua prasejarah tersebut dengan cara yang lebih informatif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan hambatan yang terkait dengan pemanfaatan gua prasejarah adalah wawasan kearkeologian masyarakat yang masih sangat terbatas. Belum terdapat komunitas masyarakat yang mendapat pendampingan secara khusus tentang sumber daya budaya prasejarah. Sehingga daya tarik budaya prasejarah tersebut belum mampu ditampilkan, baik itu peristiwanya ataupun kondisi situsya. Di sisi lain, menurut Yusriadi, hambatan-hambatan lainnya yang mungkin mempengaruhi wisatawan tidak berminat mengunjunginya adalah aksesibilitas yang belum memadai, seperti keamanan pengunjung ketika menuju situs dan aminitas seperti kenyamanan dan layanan untuk pengunjung.

Hambatan lainnya yang bisa mempengaruhi pengelolaan gua prasejarah adalah munculnya masalah dalam masyarakat terkait monopoli pengunjung, sampah pengunjung yang belum teratasi semuanya, dan polusi suara mesin-mesin *jolloro*. Tetapi hambatan paling mendasar adalah belum dilakukannya penelitian secara keseluruhan terhadap gambar yang ada, khususnya dalam identifikasi gambar cadas sehingga makna dan maksud gambar tersebut belum terungkap.

3.3 Isu-Isu Strategis

Merujuk pada data wisatawan yang datang ke Rammang-Rammang selama tahun 2016 berjumlah ± 40.000 , dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa wisatawan yang datang tidak seluruhnya terdampingi oleh *guide* sehingga wisatawan tersebut bisa menjadi ancaman terhadap keamanan situs, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap gua-gua prasejarah di kawasan ini. Penelitian terhadap lukisan yang terdapat pada seluruh gua di kawasan ini perlu dilakukan guna menambah informasi dan sebagai bahan publikasi untuk masyarakat dan pengunjung. Adapun hal yang paling utama dilakukan dalam pelestarian di kawasan prasejarah Rammang-Rammang adalah mengelola konsep pemanfaatan. Oleh karena itu isu strategis pada wilayah prasejarah Rammang-Rammang adalah pengelolaan cagar budaya berbasis masyarakat melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang memfokuskan pada konsep budaya prasejarah khususnya yang berkaitan dengan gambar prasejarah.

Untuk mengembangkan isu strategis di atas kiranya harus dilakukan pertemuan yang rutin oleh beberapa *stakeholder* yang terlibat di Rammang-Rammang. *Stakeholder* yang kiranya harus terlibat adalah Masyarakat Rammang-Rammang, Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, Balai Arkeologi Makassar, Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin, Komunitas Hutân Batu, dan *Eco Tourism* Sulawesi Selatan. Hasil pertemuan yang rutin dilakukan oleh *stakeholder* tersebut nantinya akan menghasilkan sintesis sebagai landasan dalam memulai rencana pengelolaan kebijakan strategi program.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hasil identifikasi terhadap kawasan prasejarah Rammang-Rammang menunjukkan bahwa Rammang-Rammang sebagai objek *eco tourism* memiliki jumlah wisatawan yang cukup banyak, yaitu ± 40.000 orang selama tahun 2016. Meskipun demikian, para wisatawan umumnya datang dengan tujuan menikmati lansekap alam Rammang-Rammang. Adapun wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi situs gua prasejarah masih terbilang sedikit. Jika melihat jumlah wisatawan yang berkunjung, maka tentunya ini menjadi masalah, dalam artian sebagai objek wisata yang awalnya dikenal dengan situs gua prasejarah, seolah potensi yang dimilikinya belum benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Rammang-Rammang ataupun pengunjung yang datang.

Persoalan yang dihadapi sekarang tidak lagi terletak pada masyarakatnya karena masyarakat Rammang-Rammang telah menyadari bahwa gua-gua prasejarah yang terdapat di lingkungannya harus dilindungi dan memiliki potensi untuk dikembangkan lagi. Hanya saja masyarakat belum menemukan solusi bagaimana gua-gua prasejarah bisa lebih ditingkatkan lagi manfaatnya.

Isu strategis yang ditemukan adalah pengelolaan cagar budaya berbasis masyarakat melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang memfokuskan pada konsep budaya prasejarah khususnya yang berkaitan dengan gambar prasejarah.

Daftar Pustaka

- Aubert, M., Brumm, A., Ramli, M., Sutikna, T. T., Saptomo, E. W., Hakim, B., et al. (2014). Pleistocene Cave Art From Sulawesi, Indonesia. *Nature* 13422.
- BALAR. (2002). *Laporan Ekskavasi Gua Pasaung*. Makassar: Balai Arkeologi.
- Bergh, G. D., Li, B., Brumm, A., Grün, R., Yurnaldi, D., Moore, M. W., et al. (2016). Early Hominin Occupation of Sulawesi, Indonesia. *Nature Volume* 529.
- BPCB. (2011). *Deliniasi Kawasan Cagar Budaya Gua Prasejarah Kars Maros-Pangkep*. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala .
- BPCB. (2011). *Kajian arkeologi di situs Leang Batu Tianang, Kampung Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Makassar.
- BPPP. (2011). *Laporan Zonasi Gua-Gua Prasejarah Kabupaten Maros*. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
- Bulbeck, D., Pasqua, M., & Lello, A. D. (2001). Culture History of the Toalean of South Sulawesi, Indonesia. *Asian Perspectives*, Vol 39, No. 1-2, University of Hawai'i Press.
- Bulbeck, D., Sumantri, I., & Hiscock, P. (2004). Leang Sakapao 1, a second dated Pleistocene Site from South Sulawesi, Indonesia. In S. G. Keate, & J. M. Pasvee, *Quaternary Research in Indonesia*. London, UK: Taylor and Francis Group plc.
- Carman, J. (1995). The Importance of Things. In M. A. Cooper, A. Firth, J. Carman, & D. Wheatley, *Managing Archaeology*. London: Routledge.
- Darvill, T. (1995). Value System in Archaeology. In M. A. Cooper, A. Firth, J. Carman, & D. Wheatley, *Managing Archaeology*. London: Routledge.
- Glover, I. (1975). *Survey and Excavation in the Maros District, South Sulawesi, Indonesia*. London: Institute of Archaeology.
- Hakim, B., Nur, M., & Rustam. (2009). The Site of Gua Pasaung (Rammang-Rammang) and Mallawa: Indicators of Cultural Contact Between the Toalian and Neolithic Complexes in South Sulawesi. *IPPA BULLETIN* 29, 45-52.
- Mas'ud, Z. (2006). *Ketersediaan Sumber Pangan dan Daya Dukung Lingkungan Dalam Upaya Perolehan Makan Pada Pendukung Kebudayaan Gua Pasaung*. Makassar: Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin.
- McManamon, F. P., & Hatton, A. (2000). Introduction: Considering Cultural Resource Management in Modern Society. In F. P. McManamon, *Cultural Resource Management in Contemporary Society*. London: Routledge.
- Permana, R. C. (2008). *Pola Gambar Tangan Pada Gua-Gua Prasejarah Di Wilayah Pangkep-Maros Sulawesi Selatan*. Jakarta.
- Saiful, A. M. (2016). Makna dibalik Lukisan Gua Uhalie: Pendekatan Sturktural Levi Strauss. belum

terbit

- Simons, A., & Bulbeck, D. (2004). Late Quaternary Faunal Succession in South Sulawesi, Indonesia. In S. G. Keate, & J. M. Pasvee, *Quaternary Research in Indonesia* (pp. 177, 184). London, UK: Taylor and Francis Group plc.
- Syahdar, F. A. (2010). *Gambar Cadas Perahu Pada Bidang Gua-Gua Prasejarah Maros-Pangkep*. Makassar: Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin.
- Tanudirjo, D. A. (2003). Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang. *Kongres Kebudayaan V, Bukit Tinggi, Sumatra Barat*.
- Tanudirjo, D. A. (2004). Manajemen Sumber daya Budaya Kepurbakalaan. *Penataran Tenaga Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya*. Bogor.
- Tanudirjo, D. A. (2005). Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Bangunan Dan Kawasan Bersejarah. *Penguatan Pelestarian Warisan Budaya dan Alam*. Jakarta.
- Tanudirjo, D. A. (2016). Rencana Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi. *Materi Perkuliah Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi*. Yogyakarta: Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada.

Responden

Nama : Yusriadi
Usia : ± 43 tahun
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pariwisata Maros (Kepala Seksi Program)

Nama : Udin
Usia : 46 tahun
Wakil Presiden *Eco Tourism Sulawesi Selatan* dan pengelola wisata fauna di Rammang-Rammang

Nama : Darwis
Usia : 31 tahun
Pekerjaan : Pa'Jolloro
Masyarakat Rammang-Rammang, kampung Berua, sesekali menjadi *guide* wisatawan



POTRET CAGAR BUDAYA KHUSUSNYA MAKAM-MAKAM ISLAM DI KOTA MAKASSAR

Irwani Rosyid

A. Pendahuluan

Kota Makassar yang menjadi ibukota dari Propinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kota/ kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya budaya yang sangat beragam baik yang berupa sumber daya yang berwujud benda (*tangible*) maupun yang tak benda (*intangible*) yang berasal dari periode Islam hingga masa kolonial.

Keberadaan sumber daya budaya ini tentunya menjadi bukti bahwa Kota Makassar telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Hal ini tidak terlepas dari posisinya yang pernah menjadi wilayah 2 kerajaan besar yaitu Kerajaan Gowa dan Tallo sejak abad ke 15 M.

Sebagai salah satu kota bersejarah maka peninggalan sejarah dan budaya yang masih dapat disaksikan hingga saat ini haruslah terus diupayakan pelestariannya selain sebagai bukti sejarah dan wujud budaya masa lalu juga merupakan cagar budaya yang perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan agar nilai

sejarahnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kini dan di masa yang akan datang, dan oleh pemerintah daerah tinggalan budaya tersebut dapat dijadikan obyek pariwisata yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dimana muaranya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Salah satu peninggalan sejarah yang banyak terdapat di kota Makassar adalah Makam-makam kuno, sebagai salah satu sumber daya budaya seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan karena sifatnya yang rapuh (*fragile*), terbatas (*finite*), tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) tidak dapat dikembalikan keasliannya (*irreversible*) dan Kontekstual (Tanudirjo, 2004).

Berkaitan dengan sifat cagar budaya tersebut maka dalam pengelolaannya hendaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian. Hal mendasar yang sangat penting untuk dilakukan di dalam pengelolaan tinggalan budaya adalah kegiatan penetapan. Ada dua hal yang bisa didapatkan dari penetapan ini adalah terkait dengan status suatu tinggalan budaya apakah bisa dikategorikan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya, selanjutnya hasil penetapan ini dapat dijadikan dasar/acuan didalam menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya.

Berkenaan dengan upaya pelestarian terhadap tinggalan budaya di Kota Makassar khususnya berupa makam-makam kuno yang tersebar di beberapa lokasi termasuk yang berlokasi di pulau-pulau sebelum dilakukan penetapan maka langkah awal yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data cagar budaya yang dimaksudkan untuk menginventarisir seluruh potensi tinggalan budaya yang dimiliki oleh Kota Makassar dan selanjutnya dicatat dalam Register Nasional maupun data base cagar budaya.

B. Deskripsi Tinggalan Budaya di Kota Makassar

1. Kompleks Makam Raja-Raja Tallo

Secara administratif Kompleks makam Raja-Raja Tallo berlokasi di Jalan Sultan Abdullah III, kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Batas areanya meliputi, sebelah selatan dengan jalan setapak dan pergudangan, sebelah barat dengan jalan Sultan Abdullah, sebelah timur dan utara berbatasan dengan pemukiman penduduk. Aksesibilitas menuju lokasi objek relatif mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat karena hanya berjarak sekitar 7 km ke utara dari pusat Kota Makassar.

Kompleks makam telah dilakukan penataan lingkungan dengan memberi pagar tembok pada sekeliling areal kompleks makam dengan pintu utama berada di bagian sisi barat. Terhitung luas areal pada bagian dalam pagar adalah 7.535,7 M². Penataan lainnya berupa taman di dalam areal makam dengan jalan-jalan setapak yang saling terhubung dan tanaman bunga-bunga dan tanaman pelindung lainnya.



Foto kompleks makam Raja-Raja Tallo

Adapun Jumlah makam yang dapat diidentifikasi sebanyak 96 buah. Berdasarkan ukurannya makam tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga tipe yaitu, makam berukuran besar sebanyak 5 buah, makam berukuran sedang 55 buah dan makam berukuran kecil sebanyak 36 buah. Secara keseluruhan makam-makam yang ada mewakili bentuk – bentuk makam abad ke17 hingga abad ke 18 masehi. Adapun Berdasarkan bentuknya makam-makam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe yaitu :



Tipe Kubang (susun-timbun), yakni tipe makam yang terbuat dari susunan balok batu berbentuk persegi, berundak 3 dan 4. Pada undakan teratas ditancapkan 2 buah nisan semu. bentuknya hampir menyerupai bentuk susunan balok-balok candi di Jawa. Secara vertikal terdiri dari dasar, badan dan atap. Tipe makam juga disebut dengan istilah jirat semu karena

pada bagian dasar/kaki memiliki ruang (rongga) yang didalamnya terdapat struktur terdiri dari jirat dan nisan yang merupakan makam utama. Ada 2 buah bangunan makam seperti ini dan merupakan makam dengan ukuran paling besar. Makam tipe ini adalah Salah Salahsatunya makam I Mallawakang Daeng Mattinri Karaeng Kanjilo dengan gelar Karaeng Tu menanga Ri Passiringanna putra dari Raja Tallo " I Mappaiyo Daeng Manyanru Sultan Harun Al Rasyid " . Adapun ukuran makam 1 dan 2 sebagai berikut : Ukuran Makam

Makam	Dimensi (cm)					Kondisi
	Panjang	Lebar	Tebal	Tinggi	Diameter	
Makam 1	485	415	-	375		Utuh
Makam 2	432	510	-	394		Utuh

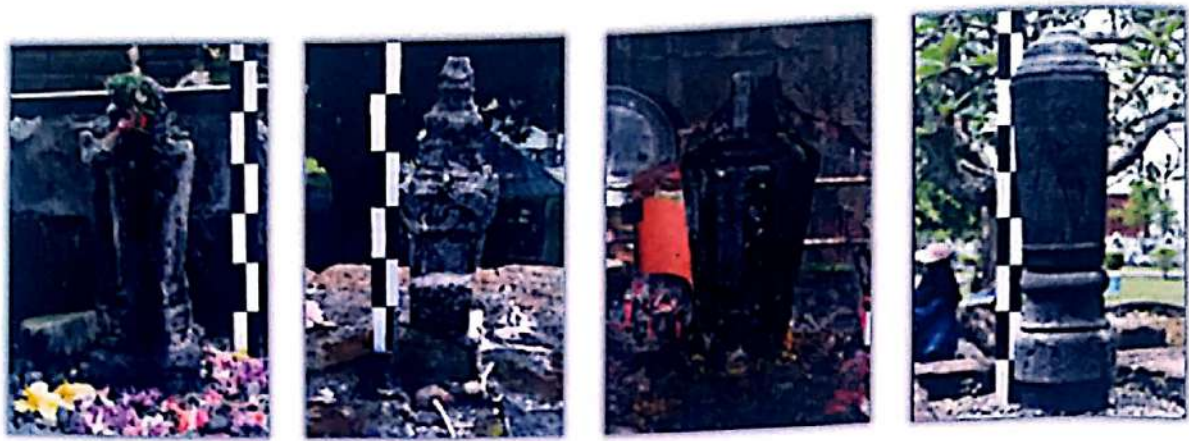


Foto beberapa variasi nisan tipe gadah dan balok pada kompleks makam Raja-raja Tallo
(Dok. Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2017)

Ragam hias sebagai salah unsur yang sering ditemukan pada sebuah makam/ jirat, di Kompleks makam ini terdapat pula beberapa makam/ jirat diberi pula ragam hias ukiran berupa inskripsi dalam kalimat syahadat "**Lailaha illallah Muhammadan Rasulullah**" dan hiasan floraistis berupa sulur-suluran daun dan motif geometris dengan pola tumpal yang distilir seperti pada beberapa makam/ jirat, nisan serta gunungan makam. Selain itu terdapat sebuah nisan yang dipenuhi dengan inkripsi ukiran yang berisi doa untuk si mayat pada satu sisi serta identitas yang dimakamkan pada sisi lainnya.



Foto beberapa ragam hias di kompleks makam raja-raja Tallo

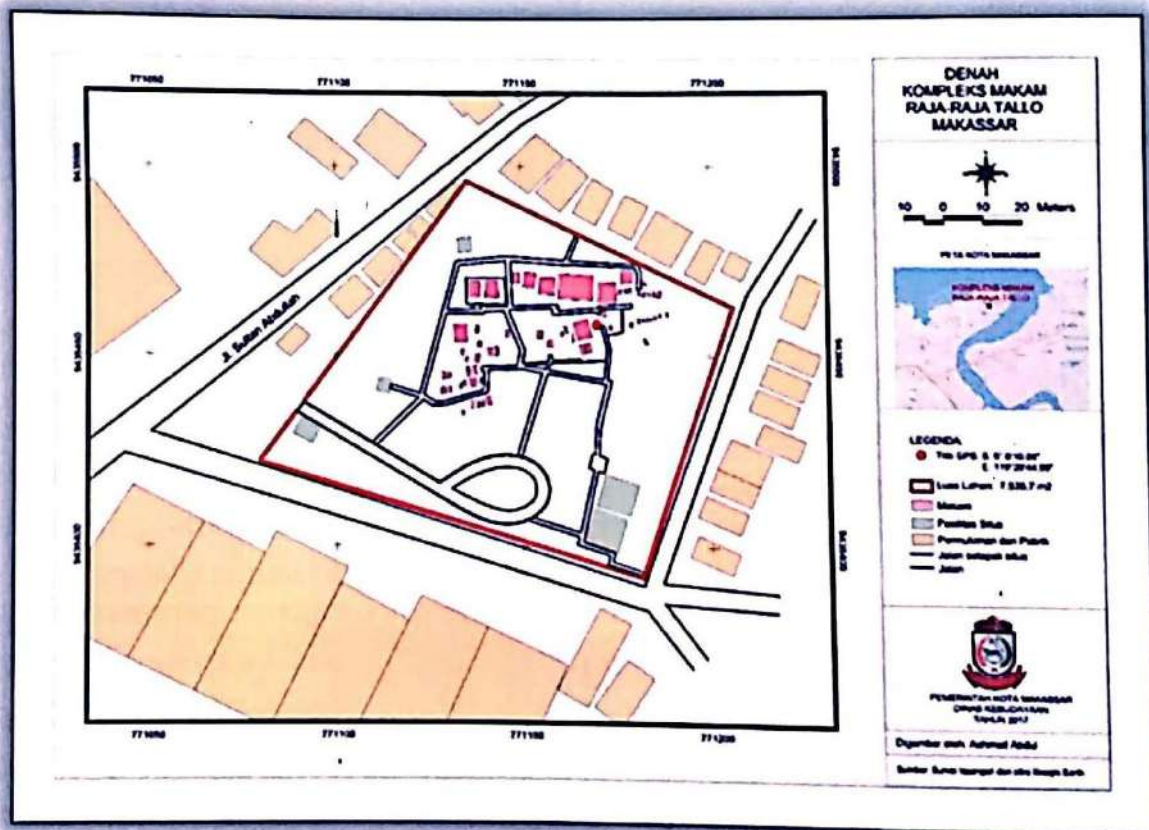
Dari 96 makam yang berada di lokasi hanya sebahagian kecil yang diketahui identitasnya yaitu :

- Sultan Mudafar (Imanginyarrang Dg Makkiyo, Raja Tallo VII, 1598 – 1640),
- Sawerannu (istri Raja Tallo VII),
- Sultan Abd. Kadir (Mallawakkang Dg Matinri, Raja Tallo IX),
- Sultan Syaifuddin (Imakkasumang Dg Mangurangi, Raja Tallo XII, 1770 – 1778),
- Sultana Sitti Saleha (Madulung, Raja Tallo XIII),
- Sultan Muh Zainal Abidin (La Oddang Riu Dg Mengeppe, Raja Tallo XV, Raja Gowa XXX),
- Yandulu (Krg Sinrijala),
- Pakanna (Raja Sanrobone XI),
- Sultana Sitti Aisyah (Mangati Dg Kenna),
- I Malawakkang Dg Sisila (Abd Kadir),
- Abdullah Bin Abd Gaffar (Duta Bima di Tallo),
- Linta Dg Tasangning (Krg Bonto Sunggua Tumabicara Butta Gowa),

- Abdullah Daeng Riboko,
- Arif Krg Labbakang,
- Imanuntungi Dg Mattola,
- Karaeng Parang-Parang (Krg Bainea Ri Tallo),
- Saribulang (Krg Campagana Tallo),
- Mang Towayya,
- Sinta (Karaeng Samanggi),
- Karaenta Yabang Dg Talomo (Krg Campagaya Krg Bainea Ri Tallo),
- Karaeng Mangarabombang (Krg Bainea Ritallo).

Secara umum kondisi makam dan lingkungan makam sangat terawat karena sejak tahun 1980-an Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan telah menempatkan beberapa juru pelihara baik organik (PNS) maupun non organik.

Denah kompleks makam Raja-Raja Tallo



2. Kompleks Makam Datuk Ri Bandang

Kompleks makam Datuk Ribandang berlokasi di Jalan Sinassara, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi makam ini berbatasan, sebelah utara dengan Jalan Sinassara, sebelah selatan dengan pemukiman penduduk, sebelah barat dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sebelah timur dengan rumah warga dengan luas lokasi 376 M²

Secara umum kondisi Makam dan lingkungannya terpelihara karena Balai Pelestarian Cagar Budaya telah menempatkan juru pelihara pada obyek tersebut. Terdaftar dalam *database* cagar budaya dengan No Inventaris. Kompleks makam ini telah diberi pengaman atau pagar dari tembok permanen dengan pintu masuk terbuat dari besi yang berada dibagian sisi utara makam. Secara umum kondisi makam sangat terawat karena Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan telah menempatkan juru pelihara pada lokasi tersebut.



Kompleks makam Datuk Ribandang sisi utara (depan).
(Dok. Dinas Kebudayaan kota Makassar. 2017)

Makam Datuk Ribandang berada dalam sebuah bangunan permanen/tembok berukuran panjang 735 cm dan lebar 440 cm dengan lantai *floor* dan atap seng. Bangunan ini diberi teras dibagian selatan dan lantainya terbuat dari keramik berwarna putih dengan pintu masuk berada pada bagian selatan dengan ukuran lebar 100 cm dan tinggi 185 cm. Makam Datuk Ribandang terbuat dari semen /tembok berorientasi utara selatan dengan ukuran panjang jirat 280 cm, lebar 20 cm dengan ketebalan badan jirat 49 cm. Pada bagian kepala ketebalannya hanya 20 cm. Bagian sisi utara dan selatan jirat diberi gunungan berukuran lebar 120 cm, tinggi 40 cm dan tebal 17 cm. Ditengah jirat ditancapkan sebuah nisan dari batu persegi empat dengan kepala nisan berupa mahkota bersusun 2 dengan ukuran nisan tinggi 68 cm, lebar 20 cm dan ketebalan 12 cm, Nisan ini ditempatkan dibagian utara jirat. Dikiri kanan kepala jirat terdapat lagi 2 buah nisan kecil terbuat dari batu berukuran tinggi 35 cm dan lebar 17 cm. Saat ini jirat /makam Datuk Ribandang diberi kelambu berwarna putih yang ditopang oleh 4 buah balok kayu yang dicat berwarna putih.

Melihat banyaknya lelehan lilin merah dan kondisi nisan yang menghitam menunjukkan bahwa makam ini sering mendapat kunjungan peziarah disaat-saat tertentu baik dari masyarakat kota Makassar maupun masyarakat dari luar Kota Makassar bahkan dari keturunan Tionghoa banyak yang berkunjung untuk berziarah karena di bagian selatan yang nempel diteras bangunan terdapat sebuah makam yang menurut informasi merupakan makam orang Tionghoa yang pertama masuk Islam di Kota Makassar (Informasi H. Darwis).



Foto makam Datuk Ri Bandang (Dok. Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2017)

Selain makam Datuk Ribandang di Kompleks makam ini terdapat pula sejumlah makam. Makam-makan tersebut dapat identifikasi sebanyak 62 makam, namun identitasnya tidak diketahui. Tipe makam yaitu yang dimaksud terdiri dari:

1. Makam yang terbuat dari papan batu padas dibentuk menjadi persegi panjang dengan orientasi utara selatan dan ditengahnya diberi 1 atau 2 buah nisan.
2. Makam yang terbuat dari papan batu padas dibentuk menjadi empat persegi panjang berundak dan dibagian utara dan selatan jirat diberi gunungan.
3. Makam terbuat dari balok batu dibentuk persegi



Foto beberapa tipe makam di Kompleks makam Datuk Ri Bandang

Melihat banyaknya lelehan lilin merah dan kondisi nisan yang menghitam menunjukkan bahwa makam ini sering mendapat kunjungan peziarah disaat-saat tertentu baik dari masyarakat kota Makassar maupun masyarakat dari luar Kota Makassar bahkan dari keturunan Tionghoa banyak yang berkunjung untuk berziarah karena di bagian selatan yang nempel diteras bangunan terdapat sebuah makam yang menurut informasi merupakan makam orang Tionghoa yang pertama masuk Islam di Kota Makassar (Informasi H. Darwis).



Foto makam Datuk Ri Bandang (Dok. Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2017)

Selain makam Datuk Ribandang di Kompleks makam ini terdapat pula sejumlah makam. Makam-makan tersebut dapat identifikasi sebanyak 62 makam, namun identitasnya tidak diketahui. Tipe makam yaitu yang dimaksud terdiri dari:

1. Makam yang terbuat dari papan batu padas dibentuk menjadi persegi panjang dengan orientasi utara selatan dan ditengahnya diberi 1 atau 2 buah nisan.
2. Makam yang terbuat dari papan batu padas dibentuk menjadi empat persegi panjang berundak dan dibagian utara dan selatan jirat diberi gunungan.
3. Makam terbuat dari balok batu dibentuk persegi

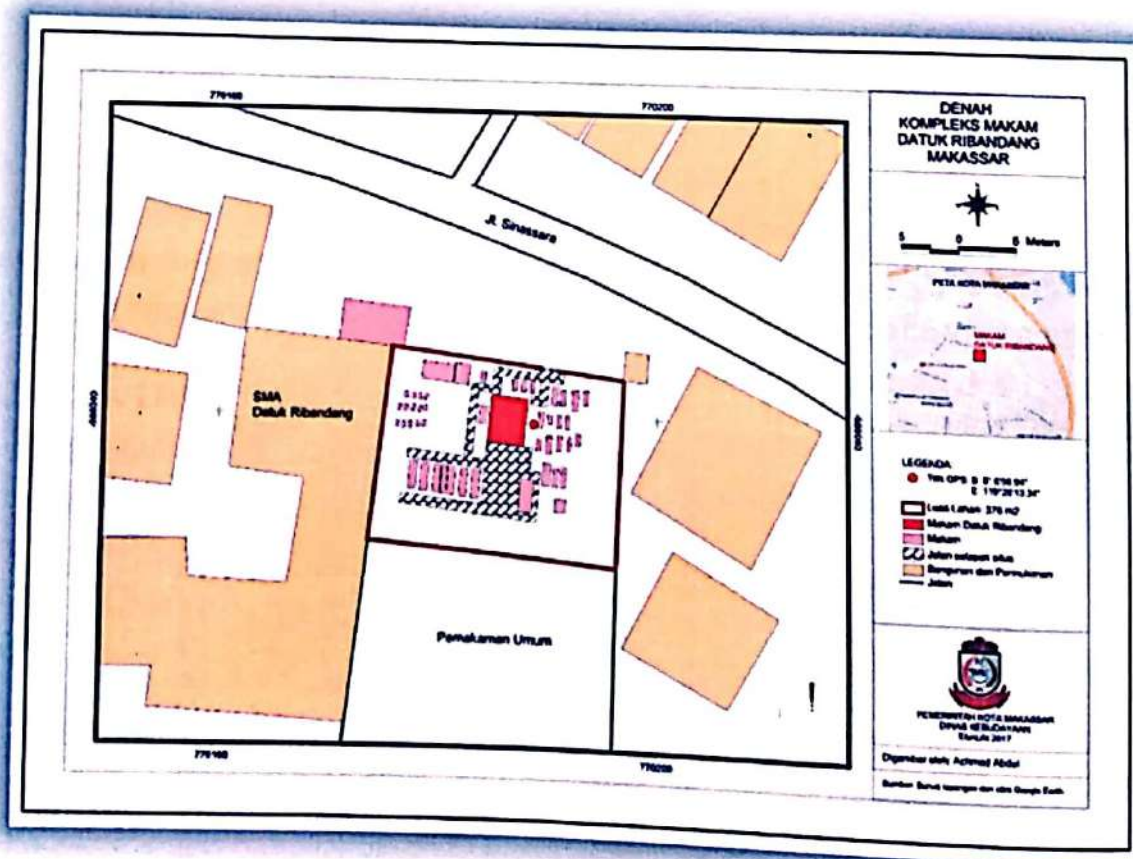


Foto beberapa tipe makam di Kompleks makam Datuk Ri Bandang

Sebagian besar makam yang ada tidak mempunyai nisan lagi hanya beberapa yang mempunyai nisan berbentuk pipih dan balok yang terbuat dari batu.



Foto beberapa bentuk nisan di Kompleks makam Datuk Ri Bandang



Denah Kompleks Makam Datuk Ri Bandang

3. Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

Kompleks Makam Pangeran Diponegoro berlokasi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Terletak pada kordinat 7° 36'.93" LS - 119° 24' 53.55" BT. Berbatasan sebelah utara dengan pemukiman warga, sebelah timur dengan jalan setapak, sebelah barat dengan pertokoan dan sebelah selatan dengan badan jalan Diponegoro. Lokasinya sangat mudah dijangkau dari arah Pelabuhan Sukarno Hatta hanya berjarak sekitar 1 km dan dari lapangan Karebosi kearah Jalan Irian berjarak sekitar 1,5 km.



Foto Gerbang (sisi selatan) Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

Secara umum kondisi kompleks makam terawat dan tertata dengan baik. Di dalamnya telah dibangun sebuah pendopo untuk beristirahat bagi para peziarah dibagian utara kompleks makam serta dilengkapi dengan sebuah Mushallah kecil dibagian utara makam. Kompleks Makam Pangeran Diponegoro telah terdaftar di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dengan nomor inventaris 340. Selain Makam Pangeran Diponegoro dan istrinya di Kompleks makam ini terdapat 99 makam lain yang merupakan makam para keluarga atau keturunan Pangeran Diponegoro.



Foto kondisi Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

3. Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

Kompleks Makam Pangeran Diponegoro berlokasi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Terletak pada kordinat 7° 36'.93" LS - 119° 24' 53.55" BT. Berbatasan sebelah utara dengan pemukiman warga, sebelah timur dengan jalan setapak, sebelah barat dengan pertokoan dan sebelah selatan dengan badan jalan Diponegoro. Lokasinya sangat mudah dijangkau dari arah Pelabuhan Sukarno Hatta hanya berjarak sekitar 1 km dan dari lapangan Karebosi kearah Jalan Irian berjarak sekitar 1,5 km.



Foto Gerbang (sisi selatan) Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

Secara umum kondisi kompleks makam terawat dan tertata dengan baik. Di dalamnya telah dibangun sebuah pendopo untuk beristirahat bagi para peziarah dibagian utara kompleks makam serta dilengkapi dengan sebuah Mushallah kecil dibagian utara makam. Kompleks Makam Pangeran Diponegoro telah terdaftar di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dengan nomor inventaris 340. Selain Makam Pangeran Diponegoro dan istrinya di Kompleks makam ini terdapat 99 makam lain yang merupakan makam para keluarga atau keturunan Pangeran Diponegoro.



Foto kondisi Kompleks Makam Pangeran Diponegoro

Makam Pangeran Diponegoro berada dalam sebuah cungkup beratap Joglo yang ditopang oleh 4 buah pilar beton berwarna putih berdampingan dengan makam istrinya yang bernama Raden Ajeng Ratu Ratna Ningsih yang wafat pada tahun 1885 M. Bentuk makam Pangeran Diponegoro dan istrinya sangat mudah dikenali karena bentuknya sangat berbeda dengan makam yang lainnya. Makamnya berupa bangunan tembok dibuat berundak 7 dan diundakan teratas pada bagian utara dan selatan jirat diberi gunungan yang menyerupai model pot dan bunga yang bagian dalam gunungan baik yang sisi utara maupun yang sisi utara dihias dengan inskripsi yang bertuliskan huruf pegon (aksara Arab Jawa) yang isinya merupakan identitas Pangeran Diponegoro dan tahun wafatnya, dan dibagian dalam gunungan terdapat 2 buah nisan bentuk pipih. yang diberi pola hias floraistis berupa kelopak bunga dan dedaunan dibagian atas dan bagian bawah dengan hiasan bunga dan lengkungan atau geometris dengan ukuran tinggi 72 cm, lebar 30 cm dan tebal 8 cm.



Foto makam dan detail nisan pangeran diponegoro beserta Istri

Adapun ukuran jirat makam Pangeran Diponegoro Sebagai berikut

No	Undakan	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
1	1	341	177	72
2	2	318	157	78
3	3	298	137	84
4	4	278	117	92
5	5	258	97	100
6	6	237	76	107
7	7	215	56	117

Ukuran gunungan Makam yaitu tinggi 63cm, lebar 80 cm dan ketebalan batu 26 cm
Makam lainnya yaitu makam istri Pangeran Pangeran Diponegoro yang berada tepat

disamping makam Pangeran Diponegoro, bentuk makamnya hampir sama dengan makam Paneran Diponegoro yang membedakan hanya pada bentuk gunung dan kaki jirat makam sisi timur dan barat yang dibentuk setengah lingkaran diantara struktur penyanggah bangunan makam.

Ukuran Makam Istri Pangeran Diponegoro.

No	Undakan	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
1	1	355	152	84
2	2	332	129	91
3	3	310	108	98
4	4	288	86	104
5	5	265	61	117

Ukuran Gunungan Makam

No	Undakan	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
1	1	38	62	48
2	2	30	48	
3	3	28	30,5	

Gunungan makam ini tidak terdapat hiasan dan inskripsi sama sekali hanya pada nisan yang berukuran tinggi 63 cm, lebar 30 cm dan tebal 8 cm diberi hiasan seperti pada nisan Pangeran Diponegoro berupa hiasan floraistik dalam bentuk sulur-suluran daun.

Data Sejarah Pangeran Diponegoro.

Pangeran diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono ke III dari perkawinannya dengan putri dari Bupati Pacitan yang bernama Raden Ayu Ratna Ningsih. Beliau lahir 11 November 1785 dengan nama kecil Ontowiryo dengan gelar Adipati Anom. Beliau termasuk orang yang taat menjalankan perintah agama namun tetap berpegang teguh pada adat istiadat. Kehadiran colonial Belanda memicu perlawanan Pangeran Diponegoro yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda, dan dibawa ke Batavia kemudian untuk menjauhkan dari pendukung dan pengikut yang masih loyal kemudian diasingkan ke Menado dan ditempatkan dalam Benteng Nieuw Amsterdam. Selanjutnya beliau dibawa ke Makassar pada tahun 1834 dan ditempatkan di Benteng Fort Rotterdam hingga beliau wafat pada tahun 1855 dan dimakamkan di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar yang sekarang Jalan Diponegoro Kota Makassar.

4. Kompleks Makam Abdullah Dg. Patompo

Kompleks Makam Abdullah Dg. Patompo berada ditengah pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Barukang, Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya dibelakang Mesjid Nurul Mujtahid untuk mencapainya harus melewati jalan setapak atau lorong persis disebelah selatan masjid. Batas areal meliputi, sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak dan pemukiman, sebelah timur dengan Mesjid dan pemukiman serta sebelah barat dan utara juga berbatasan dengan pemukiman warga.

Area makam telah diberi pagar besi BRC dengan pintu masuk berada disebelah selatan makam. Jumlah makam yang ada dilokasi ini sebanyak 6 buah makam yang berada dalam 3 buah bangunan kubah dengan konstruksi bangunan Eropa. Abad ke 19 M.



Foto Kondisi kompleks Kompleks Makam Abdullah Dg. Patompo

Makam Abdullah Daeng Patompo berada dalam sebuah bangunan (kubah) yang paling besar berukuran tinggi 535 cm terdapt 8 relung (jendela) terbuka berbentuk tapak kuda dengan pengaman dari balok dan kayu. Dua buah relung disisi selatan berukuran 143 cm dan lebar 62 cm sementara 6 relung yang berada dibagian timur barat dan utara mempunyai ukuran yang sama yaitu tinggi 136 cm dan lebar 105 cm dengan pintu masuk kubah dibagian selatan dengan ukuran tinggi 208 cm dan lebar 135 cm. Pada bagian atas pintu masuk terdapat inskripsi dalam hurup serang yang menyebutkan identitas yang dimakamkan yang berbunyi " inilah kuburan Abdullah Daeng Patompo Anaknya Daeng Siruwa yang meninggal pada hari selasa tanggal 22 Bulan Jumadil Ula pada tahun 1291 tahun Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 7 Juli Tahun 1874 Masehi "

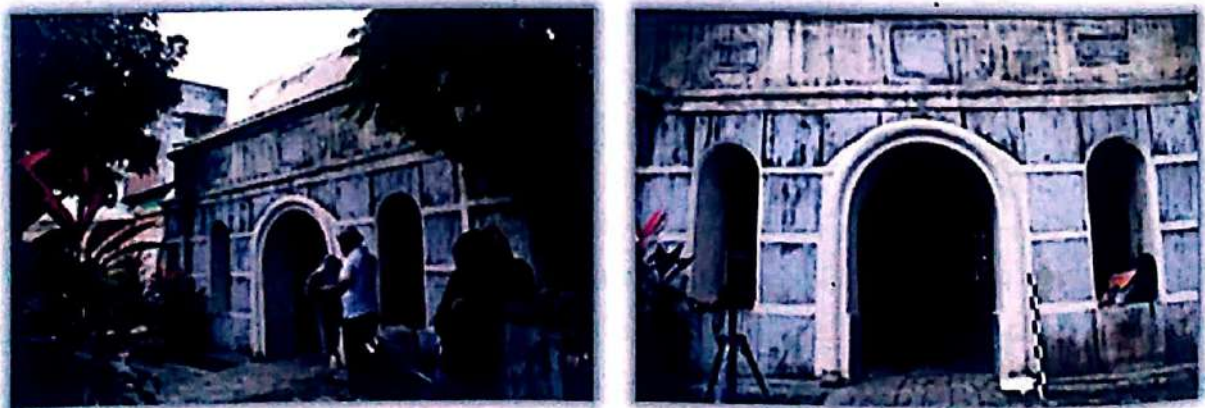


Foto Bangunan kubah makam Abdullah Daeng Patompo

Bentuk Makam Abdullah Daeng Patompo yang berada disisi barat atau sebelah kiri dari pintu masuk berupa bangunan berundak/bersusun tiga 2 undakan dengan konstruksi beton dan undakan ketiga terbuat dari papan batu dilengkapi dengan gunungan pada sisi utara dan selatan makam berukuran tinggi 68 cm, lebar 83 cm dan tebal batu 8 cm. Ditengah jirat diberi 3 buah nisan , 2 buah dibagian utara dan 1 buah dibagian selatan. Jirat dan gunungan dari papan batu dipenuhi oleh hiasan floraistis dalam bentuk sulur-suluran dan bunga teratai.

Ukuran Jirat makam

No	Undakan	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Kondisi
1	1	307	153	61	Utuh
2	2	285	131		Utuh
3	3	239	86		Utuh

Adapun nisan Abdullah Daeng Patompo berupa nisan model guci dan nisan pipih dengan ujung atas berbentuk songkok dan disisi luar dipenuhi inskripsi dalam bahasa arab dari batu pada sisi utara atau bagian kepala dan nisan model guci dibagian kaki jirat

Ukuran nisan

No	Nisan	Tinggi (cm)	Lebar (cm)	Diameter (cm)	Kondisi
1	Model guci	54		16	Baik
2	Model pipih	97	24,5	18	Baik



Adapun makam yang berada disamping makam Abdullah Daeng Patompo dibangun seperti makam Abdullah Daeng Patompo yang membedakan hanya nisannya yaitu selain nisan pipih dengan bagian kepala menyerupai songkok yang dipenuhi dengan kaligrafi arab maka nisan lainnya berbentuk pipih yang dihias dengan motif floraistis dalam bentuk suslu-suluran daun.

Pada bangunan kubah yang lain yang berada disamping kubah 1 terdapat pula 2 buah makam, didalamnya yang berdasarkan inskripsi yang ada merupakan makam Daeng Masu dan Daeng Lewa. Pintu masuk bangunan berukuran tinggi 212 cm dan lebar 180 cm terbuat dari besi.

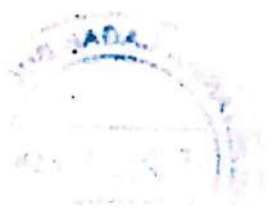
Kedua jirat makam ini ditempatkan pada sebuah pondasi makam berundak 2 yang terbuat dari semen dan diatasnya di buat 2 buah jirat dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 78 cm dan tinggi 11 cm, makam ini juga diberi gunungan dengan ukuran tinggi 28 cm, lebar 87 cm dan tebal 10 cm. Dibagian tengah jirat ditempatkan 2 buah nisan pipih dengan ujung atas menyerupai mahkota, dengan ukuran tinggi 75 cm, lebar 24 cm dan tebal 5 cm. Pada nisan makam Daeng Lewa dilengkapi dengan nisan berukuran kecil dengan model balok menyerupai botol terbuat dari kayu, berukuran tinggi 34 cm, diameter atas 8 cm dan diameter badan 6 cm sisi luar nisan terdapat inskripsi yang ditempatkan dalam sebuah lingkaran yang berisi identitas yang dimakamkan. Kondisi kedua makam seperti baru diberi plesteran semen, nampak dari lelehan semen yang tidak merata pada beberapa bagian makam.

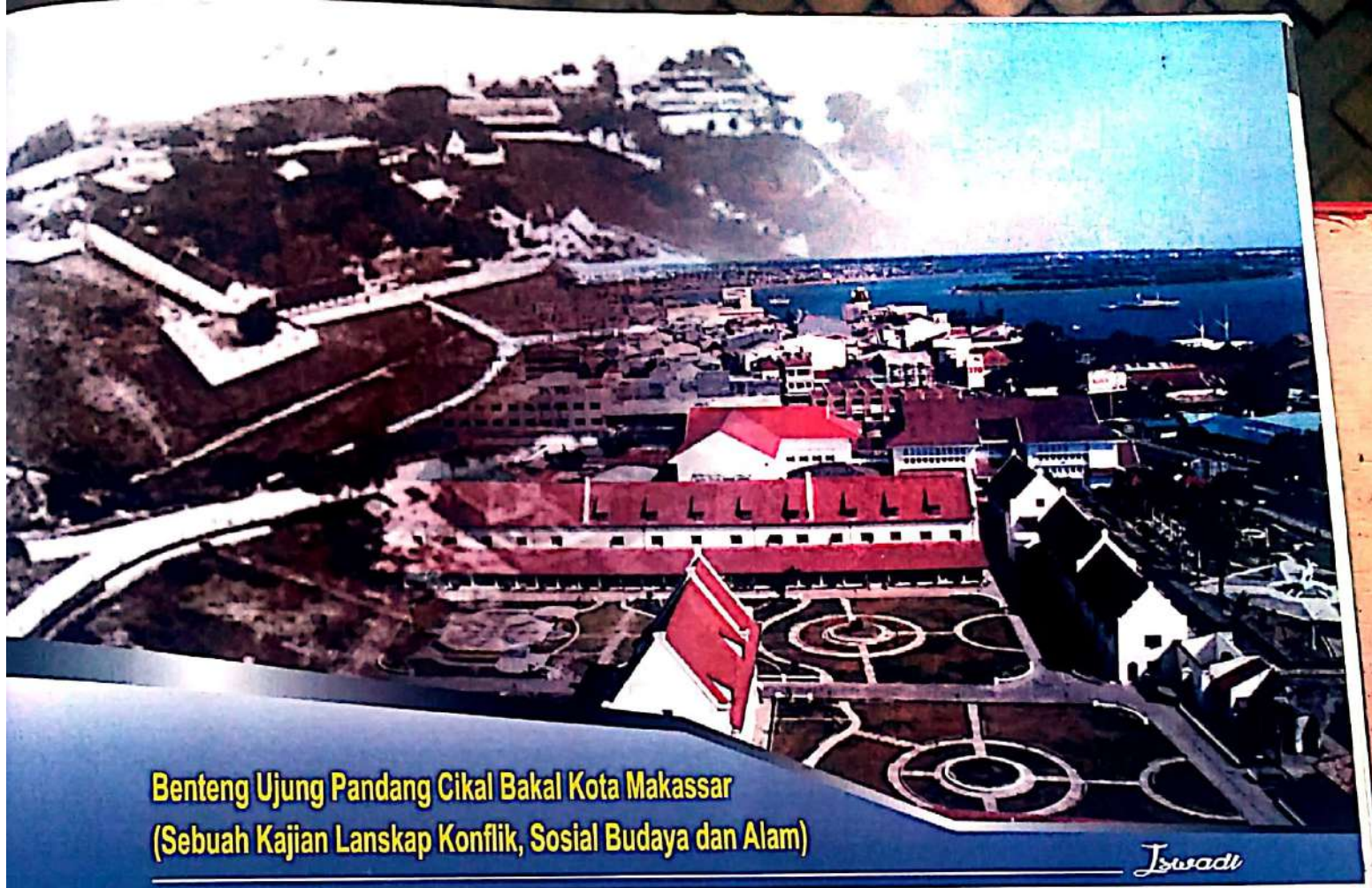
Kubah yang ketiga berukuran tinggi 430 cm, panjang 460 cm dan lebar 470 cm, bangunan ini mempunyai 4 buah relung berbentuk tapak kuda yang berfungsi sebagai jendela. Didalam bangunan ini terdapat pula 2 buah makam dengan bentuk berundak 3 dan pada undakan ketiga terbuat dari papan batu dan diberi gunungan namun 1 jirat gunungan tidak utuh lagi dengan ukuran tinggi 23 cm lebar 90 cm dan tebal 15 cm, ditengah jirat ditempatkan nisan untuk makam yang berada pada sisi kiri pintu masuk nisannya 3 buah yaitu, 2 buah dibagian kepala berupa nisan balok terbuat dari batu dan nisan dari kayu berbentuk balok segi 4, dan 1 buah dibagian kaki berupa nisan balok dari batu.

Ukuran Jirat No 5

No	Undakan	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)	Kondisi
1	1	258	194		Baik
2	2	235	110		Baik
3	3	206	79	15	Tidak utuh

Walaupun beberapa makam telah mendapatkan penanganan dalam konteks pelestarian cagar budaya seperti pemagaran, pemugaran hingga penataan lingkungan dan penempatan juru pelihara pada situs-situs tersebut namun ada satu situs yaitu Kompleks makam di Barrang Lompo yang sama sekali tidak terurus namun potensi arkeologisnya sangat banyak berupa model makam dan ragam hias yang sangat variatif. Terkait dengan kondisi tersebut maka perlu adanya langkah terpadu antara Balai Pelestarian cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan stakeholder lainnya untuk segera sesegera mungkin menangani obyek tersebut agar dapat terhindar dari kerusakan yang lebih parah dan tentunya agar obyek tersebut masih dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.





**Benteng Ujung Pandang Cikal Bakal Kota Makassar
(Sebuah Kajian Lanskap Konflik, Sosial Budaya dan Alam)**

Jswadi

A. Latar Belakang

Berkembangnya kota-kota besar di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari peranan bangsa Eropa terutama Belanda, pada saat mereka menguasai hampir seluruh wilayah kepulauan Nusantara yang memulai perkembangannya dengan kehidupan dalam benteng (intra muros). Ini dibuktikan dengan masih dominannya struktur fisik kota-kota di Indonesia yang pernah dirancang oleh bangsa Eropa, seperti yang tampak pada kota Jakarta, Surabaya, Makassar bahkan Semarang disebut sebagai "*Little Netherlands*" dan Bandung sebagai "*Paris van Java*". Beberapa contoh bangunan benteng tersebut adalah Fort Jacatra di Batavia, Fort Vastenburg di Solo, Fort Vredeburg di Yogyakarta, Fort Belvedere di Surabaya dan Fort Rotterdam di Makassar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cikal bakal kota-kota di Indonesia sebagai kota kolonial memiliki persamaan yaitu berawal dari bangunan benteng (Mansyur, 2002).

Menurut Peter J.M. Nas, kota Indis muncul bersamaan dengan awal kedatangan bangsa Eropa yang menyebabkan adanya perpaduan budaya barat (Eropa) dan timur (lokal), kota Kolonial terbentuk karena adanya pemisahan budaya yang terjadi secara perlahan-lahan karena besarnya arus pendatang yang memperkuat administrasi pemerintahan dan perusahaan swasta. (Nas dalam Soekiman, 2000:193). Dari bangunan benteng itulah Belanda kemudian melakukan pengawasan terhadap daerah

kekuasaannya. Selain itu, benteng juga menjadi kawasan permukiman Belanda dan berfungsi antara lain sebagai pusat pemerintahan, militer dan pertahanan bahkan ada juga yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan (Sumalyo, 1999:303).

Pendirian benteng juga berfungsi sebagai alat pengamanan hidup dan tempat beraktifitas atau bermukim (Mujib, 1995: 227), maka kemampuan sumber daya lingkungan dalam penempatannya akan berpengaruh, seperti kondisi lahan dan kemampuan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi untuk meminimaisasi kerja dan memaksimaisasi keuntungan (Mundarjito, 1999 :72) Menurut Sonda (1999), pada awal pertumbuhan kerajaan Gowa langkah pembangunan benteng merupakan usaha memberi ciri dan corak pada wilayah kekuasaannya, sekaligus ciri ekspansif yang tinggi dalam menghadapi kerajaan di sekitarnya baik dalam kalangan etnis Makassar maupun mengantisipasi perkembangan kerajaan Bugis di Teluk Bone dan sekitarnya. Itulah sebabnya pada daerah yang dikalahkan dibangun benteng baik sebagai pemukiman maupun alat perekat terciptanya jaringan kewilayahan yang terintegrasi atau berkonfederasi di bawah kharisma hegemoni kerajaan Gowa-Tallo (Sonda 1999 : 176).

Keletakan benteng-benteng kerajaan Gowa secara ekonomis memudahkan jalur hubungan eksternal dan antar benteng sebagai sebuah kerajaan berbasis maritim yang memprioritaskan pertahanan dan keamanan yang dipusatkan pada daerah sekitar pantai dan muara sungai. Hal ini dapat disaksikan pada keletakan beberapa benteng yang umumnya terletak di daerah pesisir pantai seperti benteng Somba Opu, Tallo, Sanrobone, Ujung Pandang, Panakkukang, Barombong, Galesong, Mariso dan Bontorannu. Fasilitas yang ada dari benteng – benteng mendukung fungsi dan peran benteng baik sebagai pertahanan dalam subsistem pertahanan sebagai mesin perang maupun pertahanan untuk melindungi pusat-pusat kegiatan masyarakat dan sumber daya alam yang ada (Iqbal, 2004:84).

Kemudian, setelah keamanan di sekitar benteng dapat dikendalikan perlahan-lahan kehidupan dalam benteng mulai ditinggalkan dan beralih di luar benteng. Selain itu akibat desakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim, alam sekeliling, demi kekuasaan dan tuntutan hidup sesuai dengan daerah tropis mereka kemudian mendirikan rumah tempat tinggal serta kelengkapannya yang disesuaikan dengan keadaan dan mengambil unsur budaya setempat (Soekiman, 1997:2). Hal ini sesuai dengan pendapat Sumalyo (1993:3), yang mengemukakan bahwa pada masa penjajahan Belanda, bentuk kota dan bangunan di Indonesia dikembangkan oleh para arsitek Belanda dengan menerapkan konsep lokal atau tradisional. Oleh karena itu, kajian tentang kota kolonial menjadi penting untuk dapat mengungkapkan unsur budaya lokal yang nampak pada bentuk dan morfologi kota yang dikembangkan oleh Belanda.

Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah salah satu kota yang memiliki warisan budaya yang cukup menonjol di antaranya adalah Benteng Ujung Pandang atau

Benteng Rotterdam. Benteng yang berada di tengah kota ini, tepatnya di jalan Ujungpandang, pada awalnya merupakan benteng milik Kerajaan Gowa-Tallo. Benteng ini menjadi salah satu di antara empat belas benteng pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo yang didirikan di pesisir Selat Makassar. Semula Benteng Ujung Pandang dibangun oleh Raja Gowa X, Karaeng Tumapakrisi Kallonna lalu diambilalih oleh Belanda melalui Perjanjian Bongayya 18 November 1667 (Yusriana, 2011:1-2).

Benteng Ujung Pandang secara administrasi terletak di Jalan Ujungpandang No. 1, yang secara administratif termasuk dalm wilayah Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar. Benteng Ujung Pandang menghadap ke Selat Makassar dengan letak astronomisnya S.05°08'10" dan E.119°24'30". Adapun batas-batas wilayah Benteng Ujung Pandang adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Keletakan Benteng Ujung Padang dan Lanskap Kota Makassar.
Sumber: BPCB Makassar dan Google Earth.

B. Pengertian tentang Lanskap

Dalam Webster's, 1963 dan Oxford English Dictionary disebutkan pengertian lansekap sebagai berikut: (a) *a picture representing a view of natural inland scenery (as of prairie, woodland, mountains, etc.)*; (b) *the landforms of region in the aggregate*; (c) *a portion of land or expanse of natural scenery over a tract of land for aesthetic effect* (Forman dan Gordon, 1986:4). Selain ketiga pengertian itu, dalam kamus tersebut juga diterangkan adanya istilah "arsitektur lansekap" sebagai gubahan dan modifikasi pemandangan alam, khususnya bidang tanah, untuk memperoleh efek estetis (Forman dan Gordon, 1986: 4).

Menurut Shackel (2003), Lanskap juga akan menunjukkan bagaimana berbagai masyarakat dapat menggunakan arkeologi untuk mengingat peristiwa sejarah tertentu dan bagaimana kelompok menggunakan simbol dan lanskap untuk memperkuat makna tertentu. Contoh disediakan lanskap yang secara historis diperebutkan, seperti tempat-tempat yang mana pertempuran melawan, dimana serangan terjadi, lanskap konflik di masa lalu, dan mereka bertahan hari ini sebagai tempat-tempat yang mana kenangan peristiwa khusus bervariasi antara kelompok yang menunjukkan makna yang tidak selalu statis. Beberapa kelompok cenderung untuk mengingat masa lalu tertentu, sementara orang lain lupa atau mengabaikan masa lalu, merupakan masalah penting untuk mengevaluasi secara kritis dan mengetahui bagaimana orang-orang memahami lanskap (Shackel, 2003:2).

Menurut Sonjaya 2005, Pada dasarnya lansekap dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

lansekap natural, lanskap budaya, dan lansekap sosial. Batasan ketiga jenis lanskap itu adalah sebagai berikut:

1. Lanskap natural (*natural landscape*), adalah bentang alam yang wujud dan kenampakannya merupakan bentang atau panorama yang masih asli seperti hutan, gurun pasir, pegunungan, danau, sungai, laut, dan sejenisnya tanpa ada bangunan dan atau karya manusia lainnya.
2. Lanskap budaya (*cultural landscape*), merupakan suatu cakupan lingkungan fisik dan budaya yang dapat mencerminkan suasana kehidupan manusia dalam suatu kesatuan wilayah, baik yang teraba maupun tidak, baik yang menggambarkan kehidupan masa lalu maupun kini. Berdasarkan batasan tersebut, maka yang termasuk dalam lanskap budaya adalah lanskap yang menggambarkan kehidupan manusia masa lalu (lanskap arkeologi) seperti candi dan bangunan-bangunan kuna lain; lansekap yang wujud dan kenampakannya sudah diisi dengan bangunan kontemporer (bukan arkeologi) seperti jembatan, bendungan, pabrik, perkebunan, lahan pertanian, jaringan jalan, dan sejenisnya; dan tradisi.
3. Lanskap sosial (*social landscape*), merupakan zona-zona yang menggambarkan struktur kehidupan sosial-ekonomi penduduk (Sonjaya, 2005 :23-24).

Menurut Gosden dan Lesly (1994) istilah 'lanskap sosial' Penekanan pada 'sosial' membawa kita menjauh dari determinisme lingkungan dan menempatkan lokus perubahan dan tindakan. Dalam masyarakat itu sendiri. Gagasan tentang 'hak guna lahan', di sisi lain, dapat membantu memberi skala waktu geomorfologi sosial. Konsep lanskap sosial menghubungkan kita dengan disiplin ilmu lainnya, namun juga menekankan bahwa proses sosial yang diapresiasi dalam rentang waktu yang jauh lebih lama daripada yang diamati pada masa kini dan masa lalu oleh arkeolog, antropolog dan ahli geografi.

C. Sejarah Lanskap Konflik, Sosial-Budaya dan Alam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam).

1. Lanskap Konflik Akibat Perang dan Jatuhnya Makassar ke Tangan Belanda

Pesatnya perkembangan Kerajaan Gowa dalam melakukan perdagangan rempah-rempah dengan pedagang Inggris dan pedagang Portugis, menimbulkan kebencian bagi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan dagang Belanda itu, ingin menguasai perdagangan di Makassar dan tidak menginginkan pedagang dari negara lain berada di Makassar (Poelinggomang, 2002). Hal inilah kemudian yang memicu terjadinya perang Makassar antara Belanda dan Kerajaan Gowa.

Menurut Iqbal (2004), usaha untuk menjamin keamanan kerajaan dibangunlah benteng-benteng pertahanan. Dalam beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa raja Gowa IX Karaeng Tumapakrisi Kallonna yang mengawali pembangunan Benteng Kale Gowa dan Benteng Somba Opu dari gundukan tanah liat dan disebutkan bahwa hampir setiap raja yang memerintah membangun benteng atau minimal memberikan penguatan-penguatan tertentu pada benteng yang telah dibangun raja. Hal inilah yang mendukung mengapa kerajaan Gowa memiliki benteng pertahanan yang cukup banyak yaitu 14 buah antara lain : Benteng Somba Opu, benteng Tallo, benteng Ujung Tanah, benteng Ujung Pandang, benteng Mariso, benteng Bontorannu, benteng Panakkukang, benteng Bayoa, benteng Garassi, benteng Barombong, benteng Kale Gowa, benteng Ana Gowa, benteng Galesong, benteng Sanrobone (Iqbal, 2004:6).

Untuk mengantisipasi serangan Belanda, kerajaan Gowa kemudian menempatkan beberapa ribu pasukan pertahanan Gowa dikerahkan untuk mempertahankan wilayah itu di bawah pimpinan Daeng Tulolo, saudara Sultan Hasanuddin bersama Sultan ar-Rasyid (raja Tallo) dan beberapa orang inti pembesar kerajaan tetap tinggal di dalam Benteng Somba Opu. Benteng Ujung Pandang dipercayakan kepada Karaeng Bontosunggu dan Benteng Panakukang dipercayakan kepada Karaeng Popo.

Gencarnya serangan balasan dari pasukan kerajaan Gowa membuat pasukan Belanda baik yang ada di darat maupun di laut untuk sementara bertahan. Serangan balasan itu membuat Speelman dan Arung (aru) Palakka meminta bantuan dari Batavia. Setelah perang berlangsung beberapa hari, akhirnya Benteng Barombong dapat ditaklukkan. Selanjutnya perhatian Speelman dan Arung Palakka di tujukan ke benteng-benteng petahanan di Makassar yaitu Panakukang, Somba Opu dan Ujung Pandang. Akhirnya, Barombong dapat di rampas, setelah terjadi pertempuran selama 4 hari, baik dari darat maupun dari laut. Setelah dilakukan beberapa kali perundingan antar pihak Sultan Hasanuddin dan

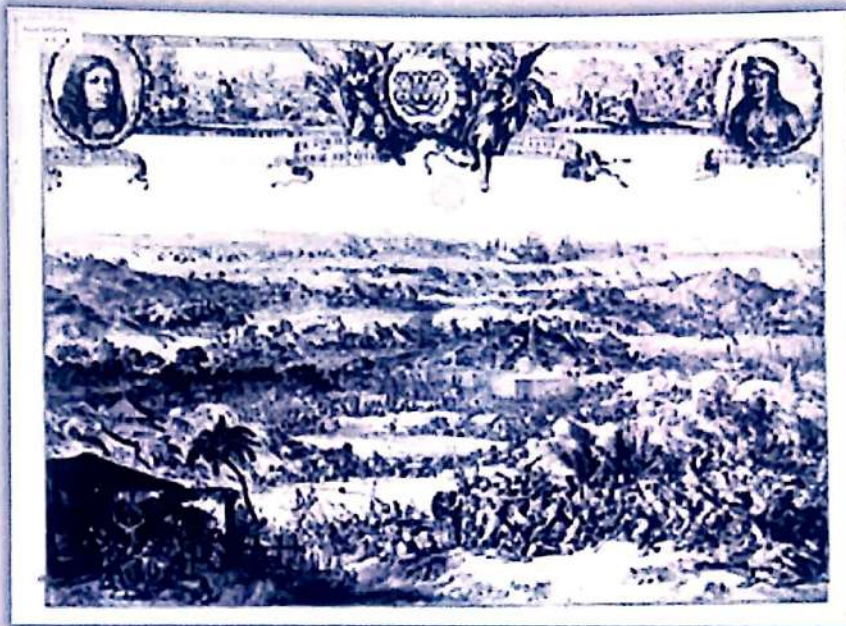
pihak Belanda, akhirnya pada hari jumat tanggal 18 November 1667 tercapailah suatu perjanjian perdamaian di suatu tempat dekat Barombong yang dinamakan Bongaya, dan orang Belanda menamakannya "*Het Bongaaish Verdrag*", atau versi Makassar "*Cappaya ri Bungaya*" (Perjanjian Bongaya), perjanjian ini sangat mencekik Kesultanan Gowa. Salah satu poin yang terkait dengan benteng-benteng pertahanan Gowa yaitu: "Semua benteng dan istana harus dihancurkan, kecuali Benteng Ujung Pandang (untuk Belanda) dan Benteng Somba Opu (untuk Sultan Hasanuddin)" (Mattulada, 1982: 86; Mappangara, 2012: 276-278).

Benteng Ujung Pandang yang diserahkan oleh pihak Gowa kepadanya kemudian dipersiapkan. Meriam-meriam baru ditempatkan di atas tembok. Peralatan perang dipersiapkan baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Nama benteng itu kemudian diresmikan menjadi Fort Rotterdam, sebagai penghormatan karena ia dilahirkan di Rotterdam. Kemudian, ia mengangkat Desmaert van der Straaten menjadi komandan benteng itu, dan dinamakannya perkampungan di sekitar benteng itu "Kota Vlaardingen". Sebelas laskar Arung Palakka diperlengkapi dengan senjata-senjata baru dan amunisi yang ditempatkan di benteng itu. Pada tanggal 21 April 1668, terjadi lagi perang. Di bawah pimpinan Karaeng Karunrung, pasukan-pasukan inti Makassar bergerak menuju Fort Rotterdam. Dalam buku harian Speelman dicatat antara lain bahwa *de eerste strijd was zeer hevig en kostte de Nederlanders vell dooden en gewonden* (pertempuran pertam sangat sengit dan banyak orang Belanda mati dan luka-luka).

Pada tanggal 5 Agustus 1668, Karaeng Karunrung sekali mengadakan pancingan. Tentaranya menyusup mendekati Fort Rotterdam. Arung Palakka mengetahui gerak penyusupan itu segera bertindak mengadangnya. Orang-orang Makassar mundur dan pasukan Arung Palakka terus mengejar, tiba-tiba ia disergap dari dua arah oleh pasukan yang telah menunggu dalam persembunyiannya. Menurut catatan pihak Belanda, Arung Palakka dan pasukannya akan musnah seandainya tidak dibantu oleh pasukan Belanda dan Ternate. Selanjutnya tanggal 12 Agustus serangan Karaeng Karunrung mengalami kegagalan, 27 pucuk meriam jatuh ke tangan Belanda. Pasukan dan laskar Arung Palakka yang berdiam di luar benteng kemudian memusnahkan sawah-sawah dan ladang-ladang. Makanan menjadi sangat berkurang dan dalam suasana demikian itulah terbuka jalan diplomasi yang menyebabkan terjadinya perundingan pada Bulan November dan Pebruari 1669. Belanda kemudian menggali parit-parit perlindungan (*loopgraven*) untuk mendekati Benteng Somba Opu.

Pada tanggal 1 November 1667, Speelman mulai tinggal di dalam Fort Rotterdam, meriam-meriam diletakkan di atas tembok, peralatan perang

dipersiapkan baik untuk pertahanan dan penyerangan serta merombak semua bangunan yang ada dalam benteng dengan corak arsitektur kolonial. Nama lain dari benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam adalah benteng *Panyua* (Penyu) sesuai dengan bentuknya apabila dilihat dari udara menyerupai seekor penyu yang hendak bergerak ke laut (Rasyid, 1983 ; 74). Speelman tidak tinggal diam, ia kemudian memperkuat Benteng Ujung Pandang yang telah ia ganti namanya menjadi "Fort Rotterdam".



Gambar 2. Lukisan yang menggambarkan perang yang terjadi antara pihak Belanda dibantu oleh sekutunya yaitu Arung Palakka dengan pihak Kerajaan Gowa. Sumber: Kitlv.



Foto 1. Kawasan Benteng Ujung Pandang Makassar tahun 1928. Sumber: Kitlv

Pada perang dunia kedua benteng ini banyak mengalami kerusakan, hampir sebagian besar bangunan dalam benteng hancur baik oleh serangan Jepang maupun serangan sekutu, serangan yang dilakukan tidak hanya di darat tetapi juga di udara. Namun setelah Jepang memenangkan peperangan benteng ini mengalami perbaikan baik pada dinding maupun pada bangunan, Jepang kemudian mendirikan sebuah bangunan baru pada sisi timur laut (berdekatan dengan Bastion Mandarsyah), konflik akibat peperangan yang terjadi dalam perebutan Benteng Ujung Pandang masih dapat dilihat pada bagian dinding berupa lubang peluru dan meriam. Kerusakan dan kehancuran bangunan akibat konflik peperangan yang hingga dapat terlihat di bagian barat Benteng, tepat di Bastion Bone, 1 buah bangunan mengalami kehancuran total dan 1 buah bangunan masih menyisahkan dinding dan pilar dan 1 buah bangunan lainnya dapat direkonstruksi walaupun pada bagian lantai 2 tidak dikembalikan ke bentuk semula, mengingat data yang diperoleh kurang memadai, selain itu reruntuhan sisa bangunan dapat menunjukkan bukti bahwa benteng ini pernah mengalami kerusakan yang hebat akibat adanya konflik peperangan.



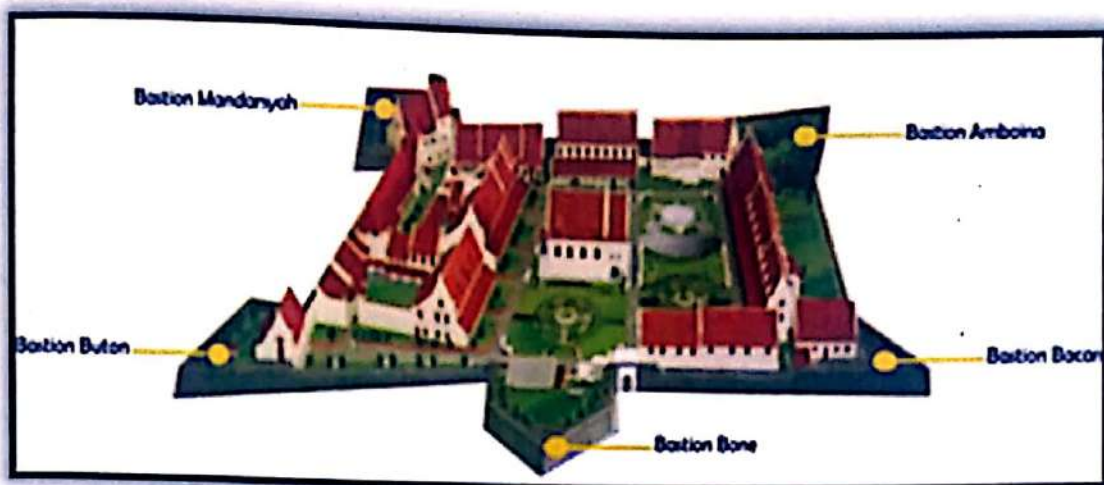
Foto 2. Bangunan yang hancur akibat konflik peperangan yang terjadi di Benteng Ujungpandang. (inset: kotak merah).

Sumber: Kitiy Bangunan-bangunan di dalam Benteng Ujung Pandang sebelum direkonstruksi.

2. Lanskap Sosial-Budaya Kawasan Benteng Ujung Pandang Cikal Bakal Kota Makassar

Lanskap sosial budaya di dalam Benteng Ujung Pandang yang terbentuk dan dapat di lihat dari penempatan bangunan dan penghuninya. Sekutu Belanda di masing-masing bastion yang ada dihuni oleh suku dan etnis yang berbeda dapat diuraikan sebagai berikut: Pasukan Arung Palakka dan orang Bone menempati Bastion bone di bagian barat (depan) sedangkan Arung Palakka sendiri adan para pengawalnya menempati tempat khusus (Istana) di Bontoala di sebelah selatan Benteng Ujung Pandang, pasukan dan tamu dari Buton menempati Bastion Buton di bagian barat laut, pasukan dan tamu dari Bacan menempati Bastion Bacan di bagian barat daya, tamu dan orang Buton menempati Bastion Buton di bagian barat laut, tamu dan pasukan dari Mandar menempati Bastion Mandarsyah di bagian

timur laut dan tamu dan pasukan dari Ambon menempati Bastion Amboina di bagian tenggara Benteng Ujung Pandang.



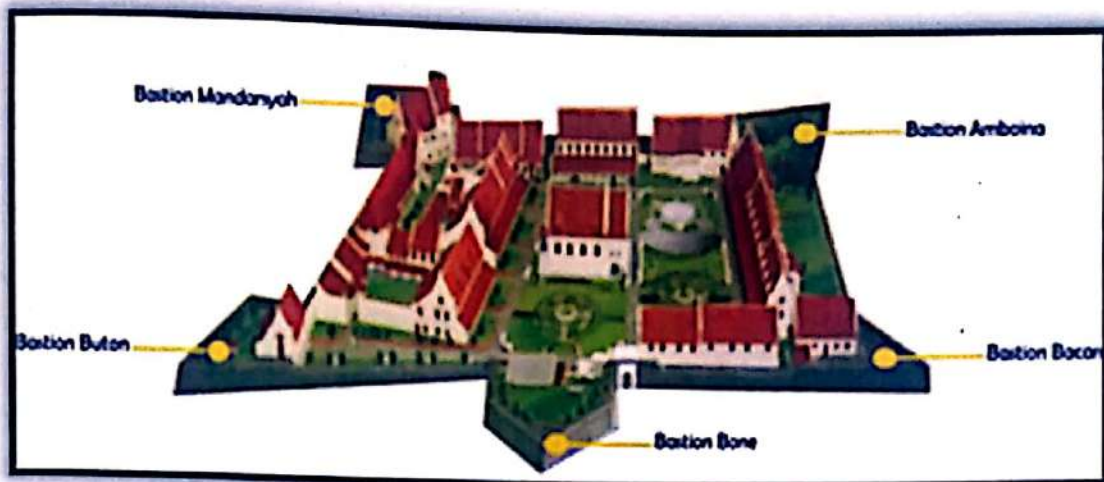
Gambar 3. Keletakan Bastion dalam Benteng Ujung Pandang

Pada bagian tengah benteng Ujung Pandang dibangun sarana dan fasilitas peribadatan bagi umat nasrani berupa bangunan Gereja. Deretan bangunan pada bagian utara di fungsikan sebagai rumah tinggal, diuraikan sebagai berikut: Kediaman Gubernur Jenderal Belanda, kediamann kepala pimpinan dagang, kediaman Capilyns, kediaman pendeta protestan/kepala pengadaian. Pada bagian timur merupakan bangunan perkantoran Gubernur Belanda dan stafnya. Pada bagian selatan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai gudang senjata dan barak militer, dll sedangkan pada bagian barat bangunan yang ada difungsikan sebagai gudang, pos jaga, dll. Sumber denah dan fungsi bangunan dalam Benteng Ujung Pandang tahun 1767.

Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC di wilayah nusantara bagian timur. Speelman menata Makassar menjadi empat elemen. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar, dengan pembagian ruang, blok - blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya.

Pertumbuhan pemukiman sebelah timur laut Benteng Rotterdam. Lokasi ini disebut "perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang" atau dikenal dengan *Negory Vlaardingen*. Penghuni kawasan ini adalah pedagang yang berasal dari Eropa, orang Tionghoa dan penduduk asli yang beragama Kristen. Ketiga , yang ikut membentuk struktur dan tata ruang

timur laut dan tamu dan pasukan dari Ambon menempati Bastion Amboina di bagian tenggara Benteng Ujung Pandang.



Gambar 3. Keletakan Bastion dalam Benteng Ujung Pandang

Pada bagian tengah benteng Ujung Pandang dibangun sarana dan fasilitas peribadatan bagi umat nasrani berupa bangunan Gereja. Deretan bangunan pada bagian utara di fungsikan sebagai rumah tinggal, diuraikan sebagai berikut: Kediaman Gubernur Jenderal Belanda, kediamann kepala pimpinan dagang, kediaman Capilyns, kediaman pendeta protestan/kepala pengadaian. Pada bagian timur merupakan bangunan perkantoran Gubernur Belanda dan stafnya. Pada bagian selatan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai gudang senjata dan barak militer, dll sedangkan pada bagian barat bangunan yang ada difungsikan sebagai gudang, pos jaga, dll. Sumber denah dan fungsi bangunan dalam Benteng Ujung Pandang tahun 1767.

Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC di wilayah nusantara bagian timur. Speelman menata Makassar menjadi empat elemen. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar, dengan pembagian ruang, blok - blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya.

Pertumbuhan pemukiman sebelah timur laut Benteng Rotterdam. Lokasi ini disebut "perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang" atau dikenal dengan *Negory Vlaardingen*. Penghuni kawasan ini adalah pedagang yang berasal dari Eropa, orang Tionghoa dan penduduk asli yang beragama Kristen. Ketiga , yang ikut membentuk struktur dan tata ruang

permukiman dalam pusat wilayah Kota Makassar adalah *Kampung Melayu* yaitu kampung yang terdapat di sebelah utara *Vlaardingen*. Nama Kampung Melayu melekat dari suku asal penghuninya yaitu orang-orang Melayu. Keempat, yakni *Kampung Beru* atau Kampung Baru, terletak di bagian selatan Benteng Rotterdam, berada di dekat pantai. Di daerah ini berdiam orang-orang dari Asia serta para bekas budak beragama Kristen yang bekerja sama dengan Belanda. Mereka ini dikenal dengan istilah *Mardijkers* (Sumalyo, 1999; 303-306) dalam Asmunandar, 2008: 31-33).

Terbentuknya pola keruangan kota Makassar, faktor keamanan menjadi alasan utama bagi pemerintah Belanda dalam merencanakan dan membentuk pola keruangannya. Hal ini dapat dilihat dengan terpusatnya berbagai fasilitas dalam kompleks benteng, selain itu bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks benteng dirancang untuk mengamati keadaan di luar benteng. Pertimbangan keamanan ini tetap berlanjut pada perkembangan pola keruangan kota selanjutnya yang ditandai dengan tetap terpusatnya fasilitas kota dalam satu kawasan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan yang dibatasi oleh Fort Rotterdam di sisi barat, Kampung Melayu di bagian utara, Fort Vredenburg di sisi timur dan kediaman gubernur pada bagian selatan.

Selain itu, penempatan berbagai daerah pemukiman bagi orang-rang pribumi baik pribumi lokal maupun yang datang dari wilayah di luar Makassar dalam perancangan kota Makassar yang menunjukkan pertimbangan faktor keamanan ini sebagai faktor utama dapat dilihat dengan penempatan pemukiman bagi mereka yang mengelilingi kota Makassar. Selain penempatan berbagai unsur tersebut, berdasarkan catatan sejarah yang mengemukakan bahwa ditempatkannya orang-orang Melayu di Kampung Melayu, orang-orang Wajo di kampung Wadjo dan Arung Palakka di Bontoala yang notabene adalah sekutu Belanda karena mudah diajak kerjasama. Khusus terhadap penempatan Arung Palakka di Bontoala dikemukakan oleh Mattulada bahwa diberikannya daerah ini kepada Arung Palakkan karena daerah ini adalah tempat persembunyian bagi orang-orang Makassar yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yang tidak setuju dengan perjanjian Bungaya. Pertimbangan keamanan ini tidak lain karena pada fase awal kekuasaan pemerintah Belanda di Makassar masih menghadapi serangan-serangan sporadis dari kerajaan Gowa-Tallo yang tidak senang dengan perjanjian Bungaya. (Mansyur, 2002).

Kerajaan Gowa-Tallo yang dulunya merupakan pusat perdagangan merupakan faktor tersendiri bagi etnis lain datang ke daerah ini, beberapa diantaranya menetap dan membentuk kawasan permukiman sendiri. Keragaman etnis di kota Makassar ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Belanda. Wiryomartono, (1995) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi tata ruang

kota pada masa ini tidak lepas dari politik pemisahan etnis yang berlangsung secara resmi setelah awal abad ke-19 (Wiryomartono, 1995;143). Politik pemisahan etnis ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan pada orang-orang Eropa yang diatur sedemikian sehingga menghilangkan kesan dualistik antara pribumi dan non pribumi. Politik pemisahan etnis inipun berlangsung di kota Makassar dengan adanya kawasan *Vlaardingen* untuk orang Eropa, Pecinaan untuk etnis Tionghoa, Kampung Melayu, Kampung Wajo dan Bontoala yang merupakan wilayah pemukiman bagi orang-orang Bugis.



Gambar 4. Peta Kota Makassar Abad 20. Sumber: Kitlv

3. Lanskap Alam (lingkungan) Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam).

Pada awal pembangunannya, Benteng Ujung Pandang dibuat menggunakan tanah liat sebagai bahan baku bangunannya. Namun, pada tahun 1634 saat masa pemerintahan raja Gowa ke-14 yaitu Tumanengga ri Gaukanna atau disebut juga dengan nama Sultan Alauddin, bahan baku bangunan diganti dengan bahan batu bata dan pada jaman Belanda, kemudian diperkuat dengan batu andesit dan lempung pasir. Terdapat beberapa pendapat mengenai sumber batuan pada benteng. Salah satu pendapat tersebut mengungkapkan bahwa batu-batu tersebut berasal dari Maros dan Pangkep, hal ini dimungkinkan mengingat bahwa dahulu merupakan kerajaan yang ada di wilayah tersebut tunduk di bawah kekuasaan

Gowa. Pendapat lain mengatakan bahwa batu-batu tersebut berasal dari Sungai Jeneberang karena di sekitar daerah itu terdapat tempat yang bernama *Pamangkulang batua* yang berarti tempat memotong batu (Tjandrasasmita, 1986:9). Berdasarkan hasil analisis data sejarah dan laboratorium yang telah dilakukan oleh Isbahuddin (2016) ia menyimpulkan bahwa sumber bahan baku batuan pada struktur Benteng Ujung Pandang (Rotterdam) kemungkinan besar diambil dari dua tempat yaitu Maros dan Gowa, hal ini ditunjukkan oleh sampel yang telah dianalisis dari tempat kedua tempat tersebut terdapat kesesuaian antara sampel batuan di batuan dan sumber bahan yang menggunakan analisis mineral dan unsur kimia dengan metode analisis *thin section* dan *X-Ray Fluorescence* (XRF) yang ada di Benteng Ujung Pandang. (Isbahuddin, 2016). Jenderal Speelman, sebagai penguasa Makassar yang baru, memilih wilayah Benteng Ujung Pandang dan daerah sekitarnya sebagai pusat pemukiman baru. Pemilihan didasarkan pada keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan pelabuhan dibanding benteng-benteng lainnya (Poelinggomang, 2002).

Berdasarkan kondisi lingkungannya, pemilihan Fort Rotterdam dan sekitarnya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan oleh pemerintah Belanda pada saat itu sangat tepat. Data lingkungan menunjukkan bahwa stratigrafi tanah di sekitar Fort Rotterdam yang merupakan endapan pantai sepanjang sekitar 2 km dan endapan sungai di daerah sekelilingnya. Menurut Ibrahim Maulana, dkk (1992), bahwa dataran pantai di kota Makassar merupakan daerah yang cocok untuk pemukiman. Daerah ini pada umumnya sangat jarang (*permeable*), kering karena tidak dapat menahan air permukaan, air hujan yang turun akan langsung meresap ke dalam tanah dan membentuk air tanah, di samping itu daerah ini bebas banjir (Maulana, dkk 1992:2-3 dalam Mansyur, 2002:106). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Fort Rotterdam dan sekitarnya tidak akan kekurangan air sebagai sumber kehidupan yang ditandai dengan adanya sumur yang berada dalam lokasi benteng. Pertimbangan lain bahwa daerah yang merupakan endapan aluvium sungai Jeneberang dan sungai Tallo yang cocok untuk daerah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah penyangga bagi kota Makassar.

Faktor geografi ini lebih menekankan pada kondisi geografi kota itu sendiri. Jika melihat keadaan geografi kota Makassar, nampak jelas bahwa bagian utara, timur dan selatan merupakan dataran yang luas dan sangat cocok untuk daerah pemukiman, selain itu wilayah ini juga sangat cocok sebagai daerah pertanian. Bagian lain yaitu barat merupakan daerah pantai, hal ini tentu saja mengakibatkan perkembangan kota cenderung ke arah timur, utara dan selatan. Kecenderungan arah perkembangan ini tidak lain karena arah timur merupakan akses kota Makassar ke wilayah Maros dan arah selatan merupakan akses ke wilayah Gowa.

Keletakan Benteng Ujung Pandang yang berada di daerah pesisir pantai yang cenderung datar, selain itu daerah ini rawan terhadap ancaman banjir. Sehingga Belanda kemudian memodifikasi lansekap disekitar benteng, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat kanal (parit) yang mengelilingi benteng (kecuali pada bagian depan yang langsung berhadapan dengan Selat Makassar, kanal ini kemudian terhubung dengan Sungai Makassar di sisi selatan benteng dan pada bagian timur dengan *Koningsplein* (Lapangan Karebosi), kedua membuat beberapa saluran air dari dalam benteng ke luar ke Selat Makassar, hal ini dilakukan sebagai sistem pembuangan air dari dalam benteng ke Selat Makassar (sistem pengendalian banjir dalam benteng).

Ketinggian Kota Makassar dari permukaan laut 0-25 M.dpl. Sedangkan di sekitar Benteng Ujung Pandang sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut. Sehingga Belanda tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga membuat sistem pengendalian air dengan mengaktifkan kembali Sungai Makassar (memperluas dan memperdalam) untuk mencegah ancaman akibat adanya banjir di Kota Makassar. Selain berapa kanal besar di buat di sisi timur kota yang terhubung langsung ke Pantai Losari (Selat Makassar), beberapa saluran air masih dapat dijumpai saat ini, namun sebagian lagi tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyempitan Sungai Makassar dari timur yang melewati pasar baru sampai bermuara ke Selat Makassar, begitu juga kanal disekitar Lapangan Karebosi yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Kondisi saat ini kanal di bagian utara lapangan Karebosi di tutup dengan pelat beton dan difungsikan sebagai pedestrian. Hal yang sama juga terjadi pada kanal di bagian timur Lapangan Karebosi yang mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi dengan baik.

D. Penutup

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) adalah salah adalah cikal bakal Kota Makassar. Benteng ini pada awalnya adalah benteng yang dibangun untuk pertahanan Kerajaan Gowa, kemudian jatuh ke tangan Belanda akibat perang Makassar pada tahun 1667-1669 (Abad XVII). Belanda kemudian mengganti nama benteng ini menjadi Fort Rotterdam, setelah perang makassar berakhir, Belanda kemudian bertempat tinggal dalam benteng dan menjalankan fungsi pemerintahan, tempat bermukim dan kontrol terhadap perdagangannya dalam benteng ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda merancang dan mengembangkan kawasan di luar benteng menjadi kota baru kolonial, ditandai dibuatnya permukiman baru bagi orang-orang Eropa di bagian utara Benteng Ujung Pandang yang disebut "*Vlaardingen*", tumbuhnya permukiman penduduk lokal di Kampong Baru pada bagian selatan, Kampong Melayu di bagian utara, di bangunnya Benteng Vredenburg di bagian timur laut Benteng Ujung Pandang.

Perkembangan kota ini terus berlanjut hingga Abad XIX dan menjelma sebagai sebuah kota besar layaknya Kota Batavia, Bandung, Semarang dan Surabaya. Hal ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya di bangun sarana dan prasana penunjang, seperti pelabuhan, jaringan jalan, sistem drainase, fasilitas militer, Gedung pemerintahan, fasilitas sosial seperti Gereja, Rumah Sakit, Tempat Hiburan, Taman-taman kota, Hotel, Sekolah, dan lain-lainnya.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010. Laporan Pemintakatan (*Zoning*) Benteng Ujung Pandang Kota Makassar. Kelompok Kerja Perlindungan. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Asmunandar. 2008. "Membangun Identitas Masyarakat melalui Kota Kuna Makassar". Tesis Program Pascasarjana Arkeologi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Forman, Richard T. T. dan Michel Gordon. 1986. *Landscape Ecology*. John Wiley & Sons. New York – Chichester – Brisbane – Toronto – Singapore.
- Gosden, Chris and Head, Lesley, 1994. *Landscape - a usefully ambiguous concept Source: Archaeology in Oceania*, Vol. 29, No. 3, Social Landscapes (Oct., 1994), pp. 113-116. Published by: Wiley on behalf of Oceania Publications, University of Sydney.
- Isbahuddin, 2016. Sumber Bahan Batuan Struktur Benteng Rotterdam (Kajian Analisis Material Batuan). Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tidak Terbit.
- Iqbal A.M., Muhammad 2004 Determinasi Lingkungan Dalam Penempatan Benteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII". *Skripsi* : Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar : Tidak Terbit.
- Mansyur, Syahrudin 2002 Kota Makassar Akhir Abad XVII hingga Awal Abad XX (Suatu Studi Arkeologi Ruang), *Skripsi*, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar : Tidak Terbit.
- Mappangara, Suriadi. 2012. Perang Makassar. *Indonesia dalam Arus Sejarah 4. Kolonisasi dan Perlawanan*. Penerbit PT. Ichtiar Baru Hoeve. Atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mattulada, 1982, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700)*, Ujung Pandang: Bhakti Baru-Berita Utama.
- Mujib, 1995. Spesifikasi Benteng-Benteng di Kawasan Berigkulu pada masa Kolonial Inggris. *Berkala Tahun XV Edisi Khusus Tahun 1995*. Balai Arkeologi : Yogyakarta.
- Mundarjito, 1999. Arkeologi keruangan : Konsep dan Cara kerjanya. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII* Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia : Jakarta

- Poelinggomang, Edward L. 2002 Makassar Abad XIX, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia Bekerjasama Dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Shackel, 2003. Archaeology, Memory, and Landscapes of Conflict dalam *Historical Archaeology*, Vol. 37 No. 3 tahun 2003. Diterbitkan oleh Society for Historical Archaeology bekerjasama dengan JSTOR. Departement of Anthropology. Woods Hall. University of Maryland. College Park.
- Soekiman, Djoko, 1997, "Seni Bangunan Gaya Indis, Pemilikan, Pelestarian, dan Pemanfaatannya", *Diskusi Ilmiah Arkeologi VII*, Yogyakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda D.I. Yogyakarta.
- Sonda, Hasir. 1999. "Benteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi-Selatan Tinjauan Bentuk dan Fungsi (Kajian Arkeologi Sejarah)". *Tesis Universitas Indonesia* : Jakarta.
- Sonjaya, Jajang Agus. 2005. Pengelolaan Warisan Budaya di Dataran Tinggi Dieng. *Tesis*. Program Studi Arkeologi. Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Tidak Terbit.
- Sumalyo, Yulianto, 1999, "Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20", dalam *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Ecole Francaise d'extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjandrasasmita, Uka. 1986. Pemugaran Benteng Ujung Pandang Sulawesi Selatan dan Benteng Malborough, Bengkulu. Benteng Durrstede, Maluku.
- Wiryomartono, A. Bagoes P, 1995, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia (Kajian Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindu-Budha, Islam Hingga Sekarang)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Yusriana, 2011. Arah Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang. Program Studi Arkeologi. Kelompok Bidang Ilmu Humaniora. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.



Kajian Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air Studi Kasus Tinggalan Pesawat di Perairan Lae-Lae Kota Makassar

Muhammad Tang

Sisa-Sisa Perang Dunia II di Selat Makassar

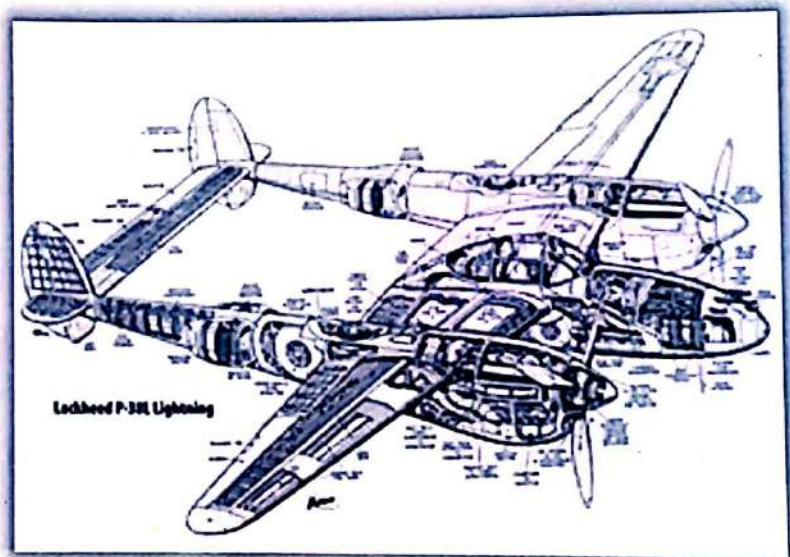
Saat terjadinya Perang Dunia II, posisi Makassar cukup strategis karena terletak di tengah-tengah Nusantara. Pada saat pendudukan Jepang di Makassar, dibuatlah titik-titik pertahanan seperti bunker di sekitar Mandai. Tujuannya adalah untuk mengamankan fasilitas vital berupa bandara, landasan pesawat dan lingkungan sekitar bandara tersebut di Mandai. Kemudian pada wilayah pedalaman, juga dibuat bunker-bunker dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber hasil bumi seperti di jalur Enrekang-Toraja.

Penguasaan Jepang bukan hanya di daratan, namun juga di lautan. Di sebelah barat kota Makassar, terdapat beberapa kapal perang Angkatan laut Jepang dengan tugas sebagai penjaga wilayah laut untuk mengamankan koloni Jepang di Makassar. Bukti dari keterlibatan kapal-kapal Jepang di Selat Makassar saat berkecamuknya Perang Dunia II adalah keberadaan bangkai kapal Jepang "Nikko Maru" di dekat pulau Samalona. Berdasarkan riwayat sejarahnya, kapal Nikko Maru tersebut merupakan kapal kargo bertenaga mesin uap berdimensi 100.9 x 14.3 x 7.9 meter. Pada tanggal 1 Juli 1944, kapal kargo Nikko Maru karam akibat menghantam ranjau laut yang kemungkinan dipasang oleh Kapal Selam Kingfish (SS-324) pada tanggal 10 Oktober 1943 (Jan Lettens, 04/12/2009 di www.wrecksite.eu).

Bukti terbaru dari sisa-sisa Perang Dunia II di Selat Makassar adalah temuan bangkai pesawat Amerika Serikat yakni *Lockheed P-38 Lightning*. Terletak di kedalaman 23-25 meter di bawah permukaan air laut, sejauh 1,2 mil laut dari kota Makassar. Badan pesawat pada saat ditemukan dalam kondisi yang terselimuti jaring dan tali-tali ukuran kecil hingga besar. Kemungkinan pernah ada yang berusaha untuk mengangkat secara ilegal. Lokasi ini merupakan titik tangkapan nelayan untuk memancing ikan. Terdapat jangkar-jangkar kecil yang tersangkut di pesawat tersebut, biasanya jangkar seperti itu dipakai nelayan sampan. Selain itu, endapan lumpur di sekitar badan pesawat juga cukup tebal hingga mencapai 30 cm. Hal ini merupakan imbas dari sedimentasi buangan lumpur dan sampah dari kota Makassar. Berbagai macam sampah seperti plastik, bungkus mie kemasan, banyak ditemukan tersangkut di badan pesawat.

Profil Pesawat Lockheed P-38 Lightning

Pesawat *Lockheed Lightning P38* merupakan jenis pesawat petarung, bomber, dokumenter dan pemburu. Terdapat beberapa varian dari type pesawat ini yakni P-38F, P-38G, P-38H, P-38J, P-38L, P-38M. Diproduksi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1939 dan terus mengalami pengembangan kemampuan sehingga



menghasilkan beberapa varian tersebut. Pesawat *Lockheed Lightning P-38* sedianya diperuntukkan untuk terlibat di Perang Eropa (*European Theater*) pada Perang Dunia Kedua, namun ternyata oleh pihak Sekutu (Amerika Serikat) dirasakan bahwa type pesawat tersebut tidak cocok untuk wilayah Eropa yang dingin. Akhirnya pesawat tempur P-38 dialihkan ke Perang Pasifik (*Pacific Theater*) dengan iklim tropis yang dominan. Keterlibatan pesawat P-38 pada Perang Pasifik sangat menonjol dan memegang peranan penting untuk menguasai udara pada lokasi-lokasi peperangan. Perannya sebagai pesawat pengintai, pengiring, pengawal, pembom, pemburu dalam menghadapi kekuatan angkatan perang Jepang yang begitu hebat di Pasifik membuktikan hal tersebut.

Salah satu kesuksesan besar dari jenis pesawat P-38 ini adalah tertembaknya pesawat tempur Panglima Angkatan Perang Jepang Laksamana Yamamoto Isoroku. Yamamoto merupakan salah seorang penyusun strategi dari Perang Pasifik yang dilancarkan oleh Jepang.



Pesawat Mitsubishi G4M1 "Betty" yang ditumpangi Laksamana Yamamoto Isoroku, tertembak jatuh oleh pesawat Sekutu Lockheed P-38 Lightning

Keterlibatan pesawat *Lockheed P-38* di Pasifik terlihat di perang Guadalcanal, Rabaul, Tulagi Kepulauan Solomon, Port Moresby Papua Nugini, Papua Barat (Irian), Morotai hingga di Filipina yang mengikuti pola *leapfrogging* (lompat kodok), bermakna melompati beberapa pulau yang diduduki tentara Jepang hingga nantinya mencapai Filipina. *Leapfrogging* merupakan pola yang diterapkan oleh Jenderal MacArthur sebagai Panglima Angkatan Darat Amerika di Perang Pasifik dengan slogannya "*I shall return!*". Saat pendudukan Jepang di Filipina, Jenderal MacArthur meninggalkan Filipina menuju Australia dan kemudian menyusun kekuatan untuk menghadapi Jepang. Sesaat sebelum meninggalkan Filipina, Jenderal MacArthur bersama Presiden Filipina mengucapkan janjinya di hadapan rakyat Filipina bahwa saya akan kembali "*I shall return!*". Spesifikasi dari pesawat Lockheed P-38 Lightning secara umum yaitu:

Nama	: <i>Lockheed P-38 Lightning</i> (the Fork-Tailed Devils)
Type	: Heavy Fighter
Mesin	: 2 Mesin piston
Max speed	: 712 km/h
Jarak max (range)	: 1770 km – 3640 km
Senjata	: 1 kanon, 4 senapan mesin, roket, bom

Lockheed P-38 Specifications			
Description			
Manufacturer:	Lockheed		
Designation:	P-38		
Nickname:	Lightning		
Type:	Fighter		
Crew:	1		
			
Basic Specifications			
Length:	37' 10"	11.53 M	
Wingspan:	52' 0"	15.85 M	
Gross Weight:	15340.0 lbs	6956.00 Kg	
Max Ceiling:	44,000 ft.		
Max Range:	2,600		
Propulsion			
No. of Engines:	2		
Powerplant:	Allison V-1710-27/29		
Horsepower (each):	1150		
Max Speed:	395.00 Mph	636.00 Km/H	343.78 Kt
Armament			
1 20mm cannon, 4 M2 .50 machine guns, 2,000 lb of bombs, rockets			
Production			
Prototype:	1939		
Production ceased:	1945		
Manufactured:	9,923		
Cost:	\$115,000 (1945)		



Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat, diperkirakan masih terdapat sekitar 78.750 personel militer Amerika Serikat yang hilang saat Perang Pasifik berkecamuk. Penyebab hilangnya personel militer tersebut misalnya karena karamnya kapal induk akibat hantaman bom, sementara kapal induk tersebut memuat ribuan awak kapal dan personel militer. Pendaratan-pendaratan pasukan dari kapal laut yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat di kepulauan Solomon, Guadalcanal hingga Pulau Iwo Jima Jepang dan beberapa tempat lainnya juga banyak menelan korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Rontoknya pesawat-pesawat tempur baik dari pihak Amerika maupun dari pihak Jepang hampir berimbang jumlahnya.

Beberapa lokasi yang menjadi "kuburan" dari pesawat-pesawat tempur Perang Dunia Kedua adalah di Morotai Maluku, kemudian di dekat pulau Toagean Sulawesi Tengah yang terdapat bangkai pesawat pembom B-52 milik Amerika Serikat. Selain itu, salah satu pesawat yang hilang di Selat Makassar adalah Lockheed P-38 Lightning milik Amerika Serikat. Berdasarkan uraian dari portal berita Pacificwreck yang khusus

mengulas Mission In Action (MIA) atau personel militer Amerika Serikat yang hilang saat terjadinya Perang Pasifik, terdapat sebuah pesawat Lockheed P-38 Lightning yang tidak kembali saat menjalankan tugasnya ke Selat Makassar.

Berdasarkan deskripsi singkat tentang pesawat tersebut yang hilang di Selat Makassar, bahwa Jenis pesawat yang dipergunakan adalah P-38J-20-LO Lightning nomor seri 44-23394, dengan nama pilot Letnan Kolonel Robert B. Westbrook, O-424187. Sang pilot bertugas di USAAF (*The United States Army Air Forces*) 13th Air Force, 347th Fighter Group, 339th Fighter Squadron. Dalam sejarahnya sebagai pilot, Letnan Colonel Westbrook merupakan pilot dengan score tertinggi di 13th Air Force, yang berhasil menembak jatuh 20 pesawat lawan sejak bergabung ke dalam 347th Fighter Group. Dia mendapatkan penghargaan "*Distinguished Service Cross (DSC), Silver Star with Oak Leaf Cluster, Distinguished Flying Cross (DFC) with Oak Leaf Cluster, Air Medal with 15 Oak Leaf Clusters*". Misinya dijalankan pada tanggal 22 November 1944 yang lepas landas dari lapangan udara Middleburg (pantai utara Papua New Guinea) untuk tugas menyerang pangkalan Jepang di Celebes (Sulawesi). Pesawat ini tertembak dan jatuh setelah diberondong oleh sekitar 140 kapal perang Jepang di perairan Makassar di sisi barat pulau. Letnan Kolonel Westbrook secara resmi dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga saat misi dilaksanakan. Dia diabadikan pada lembaran buku untuk orang hilang di Manila American Cemetery (American Mission In Action (MIA) at Pacific Theater War).

Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air

Berdasarkan database Unit Bawah Air BPCB Sul-Sel, tercatat sekitar 50 titik lokasi yang telah dilakukan survey sebagai cagar budaya bawah air. Survey terakhir yang dilaksanakan tahun 2016 adalah tinggalan berupa pesawat tempur bekas Perang Dunia Kedua dan terletak di perairan Pulau Lae-Lae Kota Makassar. Berada di kedalaman sekitar 23-



Kondisi Cockpit Pesawat Lockheed P-38

25 meter di bawah permukaan air laut dengan kondisi visibility yang sangat terbatas akibat sedimentasi lumpur dan sampah.

Hasil observasi dan identifikasi terhadap pesawat karam tersebut menghasilkan dugaan kuat bahwa jenis pesawat tempur itu adalah *Lockheed P-38 Lightning*. Hal tersebut di dasarkan pada data lapangan yang merujuk pada dua mesin yang masing-

masing terletak di samping badan pesawat. Bagian depan atau moncong terdapat empat laras senjata mesin dan 1 (satu) canon. Bagian pesawat yang memperkuat analisis tersebut adalah sebuah radiator yang terlepas dari rangka pesawat dan diangkat ke kapal sebagai bentuk pengamanan dan penyelamatan benda cagar budaya.

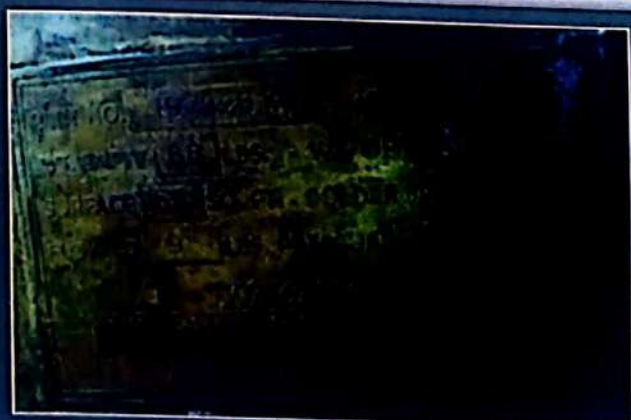


Flat yang menempel di radiator pesawat P-38

Pada radiator tersebut terdapat sebuah flat yang berisi informasi tentang nomor bagian, jenis pesawat, berat kosong, jumlah bahan bakar, tekanan serta asal perusahaan yang membuatnya. Sangat jelas bahwa jenis pesawat yang dimaksud adalah *Lockheed P-38-H Lightning*. Namun kemudian bahwa model flat yang sama juga terdapat dan ditemukan di tempat lain berdasarkan hasil penelusuran di portal internet. Nomor-nomor seri dalam dua flat ini semuanya sama termasuk kode-kode kecilnya, yang artinya bahwa flat radiator yang diproduksi oleh perusahaan Winchester lebih dari satu dengan *Part No* yang sama yakni 197325 untuk Model Pesawat *Lockheed P-38-H Lightning*.

PART NO. 197325 ^{AN}
WT. EMPTY 68 LBS. WT. OF LIQUID 36
SURFACE 1593 SQ.FT. - SOLDER SPEC. QQ-T-37
FLOW AT 9 LBS. PRESSURE 33 MIN U.S.G.P.M

WINCHESTER ^{MARK}
WINCHESTER REPEATING ARMS CO.
DIVISION OF WESTERN CARTRIDGE CO.
NEW HAVEN CONN. U.S.A.
RADIATOR DIVISION



Informasi flat dari temuan radiator

Jenis flat yang sama dari tempat lain

Tinggalan cagar budaya dalam bentuk pesawat tersebut merupakan salah satu cagar budaya bawah air yang terdapat di wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Selat Makassar dan Perairan Sulawesi Tenggara banyak menyimpan cagar budaya bawah air baik yang sudah di eksplorasi maupun yang belum tersentuh dari sisi pelestariannya.

Tantangan terbesar dalam pelestarian cagar budaya bawah air adalah dari sisi pelindungannya. Potensi ancaman terbesar untuk rusak dan hilangnya cagar budaya tersebut adalah karena aktivitas pengambilan besi kapal atau pesawat yang karam. Para pemburu besi kapal ini tidak mengenal waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Terkadang saat malam hari pun mereka melakukan pekerjaan tersebut karena dianggap lebih aman. Sisi lain, juga terkadang berkamuflase menjadi nelayan yang lagi mencari ikan untuk menutupi aksinya di bawah air. Kasus terbaru adalah kapal karam "Nikko Maru" Jepang di sekitar perairan pulau Samalona, saat ini dalam kondisi sudah hampir habis bahan besinya. Ini adalah contoh kejadian yang terjadi di depan mata kita. Lantas, pengelolaan seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan tinggalan pesawat di Perairan Lae-Lae tersebut.

Prospek Pengelolaannya

Minat wisata bawah air adalah salah satu minat terbaru dan banyak disenangi oleh penjelajah ekstrem. Istilah ekstrem di sini karena untuk sampai di titik tujuan, harus dilalui dengan perjuangan yang ditunjang dengan peralatan memadai dan nyali akan resiko. Wisata bawah air di wilayah Indonesia sekarang ini dominan ke objek wisata alam bawah laut. Meski demikian, beberapa lokasi telah menjadi objek wisata kapal karam seperti Tulamben Bali, Morotai Maluku dan Togean Sulawesi Tengah.

Selayaknya objek purbakala atau tinggalan bawah air yang ada di Selat Makassar, dapat dimanfaatkan seperti tujuan di atas untuk objek wisata selam. Tantangan terbesarnya adalah kondisi laut Makassar yang sudah sangat kotor hingga 2 mil dari daratan. Kemudian tantangan lainnya adalah tinggalan bawah air berbahan logam dan besi, menjadi incaran pemburu besi tua untuk dijual sebagai barang rongsokan.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan objek arkeologi bawah air tersebut adalah dengan memindahkan ke tempat lain. Pemindahan benda yang masuk kategori Cagar Budaya, dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pada Pasal 58 disebut:

(1) Penyelamatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk:

- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya nilai-nilai yang menyertainya; dan
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Kemudian pada Pasal 59 disebutkan bahwa:

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Berdasarkan pemahaman terhadap isi undang-undang tersebut bahwa penyelamatan cagar budaya sudah selayaknya dilakukan jika ada potensi kerusakan karena faktor manusia atau karena alam, sebagaimana disebutkan pada Pasal 58: Kemudian pada Pasal 59 ayat (1) dijelaskan bahwa Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur dan bahkan musnah (hilang) dapat dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Kondisi pesawat Lockheed P-38 Lightning berada di kedalaman 25 meter dengan visibility yang tidak bagus. Kemudian tingkat keamanan objek ini sangat rendah karena tidak dapat dijaga sebagaimana mestinya untuk menghindari pemburu besi tua.

Oleh karena itu, pemindahan objek pesawat karam ini dapat dilakukan dengan pertimbangan teknis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi yang dianggap ideal untuk pemindahan bangkai pesawat tersebut adalah di perairan pulau Samalona pada kedalaman antara 10-15 meter. Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi tersebut, sisi utara pulau Samalona yang menjadi lokasi wisata bawah air berupa snorkeling dan transplantasi karang, dapat dijadikan titik selam objek pesawat tersebut.

Dalam rangka rencana pemindahan tinggalan pesawat tersebut, maka koordinasi dengan pihak terkait terutama pemerintah daerah setempat perlu dilakukan. Perairan Lae-Lae dan Samalona secara administratif termasuk dalam wilayah pemerintahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Selain Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, koordinasi juga perlu dilakukan dengan pihak PT Pelindo IV Makassar, LANTAMAL VI Makassar, Direktorat Polair Polda Sulsel dan terakhir adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun pengampuh dari kegiatan pemindahan pesawat tersebut selayaknya dapat dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan



Permuseuman dengan melibatkan semua unit BPCB se-Indonesia yang mempunyai bidang bawah air.

Dengan demikian maka tinggalan bawah air akan dapat terselamatkan dan kemudian juga dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan bagi masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

Aji, Darma. 2007. Perang Udara di Eropa. Jakarta. PT Gramedia Kompas.

Anonim, 2015. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Makassar. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

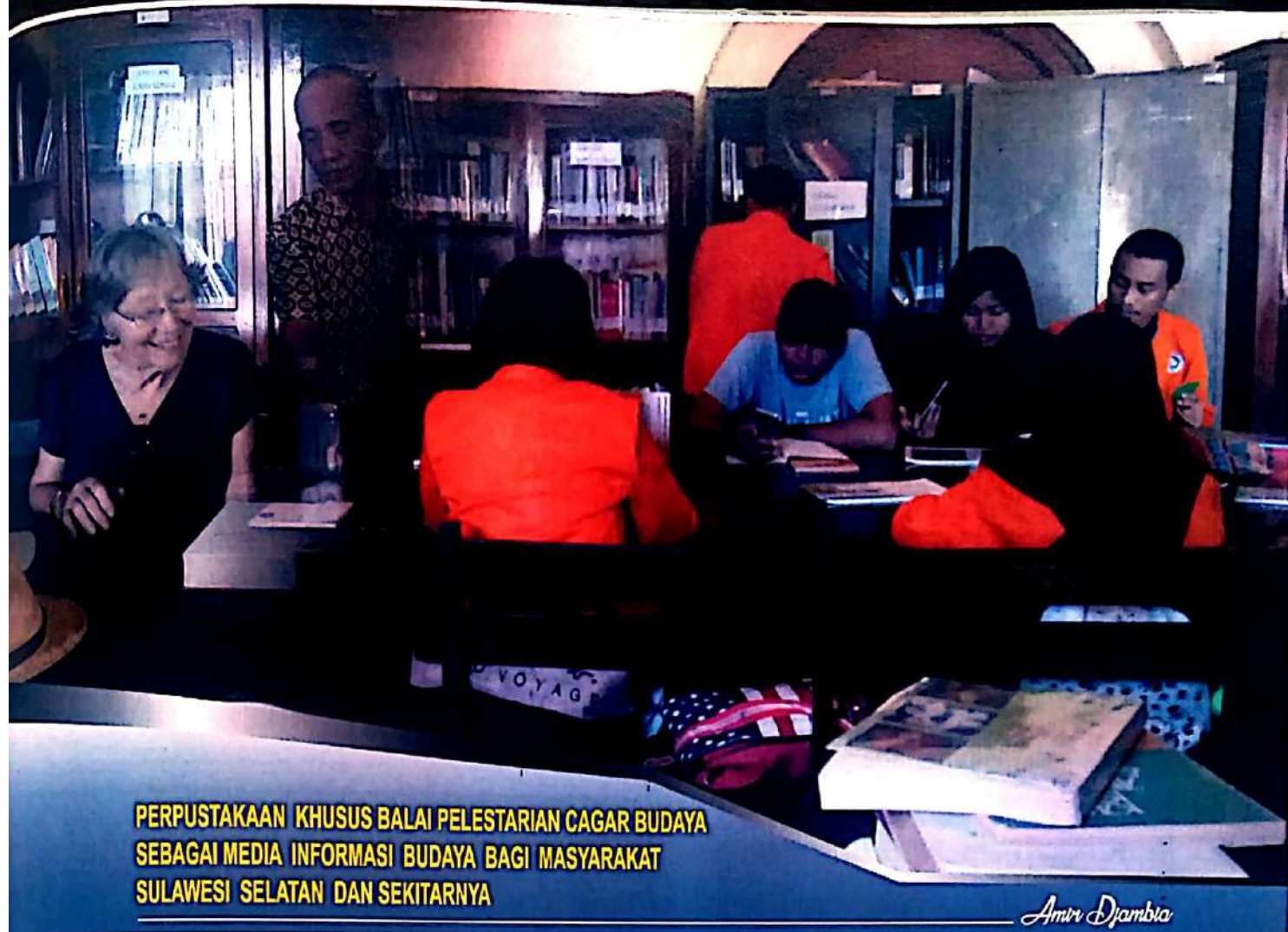
Ojong, P.K. 2001. Perang Pasifik. Jakarta. PT Gramedia Kompas.

<http://www.pacificwrecks.com/aircraft/p-38/44-23394.html>

<http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=51537>

www.wrecksite.eu

www.pacificwrecks.com



PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah salah satu kumpulan informasi yang menyimpan berbagai macam literatur yang dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah yang yang diatut secara alfabetis berupa buku-buku, Majalah, Buletin, laporan, surat kabar, leaflet, Brosur dll. Perpustakaan yang terdapat pada suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta disebut perpustakaan khusus yang menekankan koleksinya pada suatu bidang tertentu saja. Ada beberapa pengertian tentang perpustakaan khusus antara lain: adalah pertama pada buku pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan khusus tahun 1999 dijelaskan bahwa perpustakaan khusus adalah jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (Pemerintah atau Swasta) atau perusahaan atau asosiasi yang menagani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungannya baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusianya.

Selanjutnya Syahrial-Pamuncak (2000;4) mengatakan bahwa :

Perpustakaan khusus adalah merupakan bagian dari suatu lembaga penelitian, lembaga pemerintah, ataupun baguan khusus dari perpustakaan umum yang besar. Tugasnya ialah menyediakan koleksi buku untuk para ahli dan peneliti yang tergabung

pada badan itu dan memberi keterangan Bibliografi dengan cepat dan tepat serta mengadakan penelusuran literatur atas permintaan pengunjung. Sedangkan Hasugian 2009 mengatakan bahwa: perpustakaan khusus memiliki koleksi mayoritas berupa subyek khusus kajian yang mendukung kegiatan instansi atau lembaga tertentu seperti pusat kajian penelitian dan sebagainya dan masyarakat dilayaninya adalah terbatas hanya para staf organisasi atau lembaga itu dan perpustakaan tersebut berada pada lembaga atau instansi itu sendiri.

Jadi perpustakaan Khusus memiliki beberapa Ciri seperti yang disebutkan oleh Sulistiyo Basuki (1993;156) yaitu:

1. Koleksi perpustakaan lebih menekankan fungsi informasi dari pada fungsi lain
2. Setiap perpustakaan khusus memiliki sifat yang khas kembali pada badan induknya
3. Perpustakaan khusus memberikan jasanya pada pemakai tertentu saja
4. Perpustakaan khusus memberikan jasa terbatas pada ruang lingkup subjek tertentu saja.
5. Ciri khas lainnya adalah hampir semua yang bersangkutan dengan perpustakaan khusus selalu berskala mini.

1. Koleksi Perpustakaan BPCB Sulawesi selatan

Perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam koleksi tentang Cagar Budaya di Sulawesi selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara mulai dari bentuk Buku, Buletin, Leaflet Jurnal penelitian, Booklet, Abum purbakala, Klipping, dan media Audio-Visual lainnya, yang memuat informasi Pelestarian Cagar Budaya yang sangat penting artinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan khusus BPCB berdasarkan urutan nomor klasifikasi persepuluhan (*Dewey Decimal Classification*) berupa

1. 000 Karya umum	21 judul koleksi
2. 100 Filsafat	0 judul koleksi
3. 200 Agama	31 judul koleksi
4. 300 Ilmu-ilmu Sosial	1.039 judul koleksi
5. 400 Bahasa	152 judul koleksi
6. 600 Ilmu-ilmu terapan	22 judul koleksi
7. 700 Kesenian dan olah raga	89 judul koleksi
8. 800 Kesuasteraan	201 judul koleksi
9. 900 Sejarah dan Geografi	1.172 judul koleksi

Sumber Database Perpustakaan BPCB 4 juli 2017

Dari jumlah judul koleksi tersebut yang paling dominan dimiliki Perpustakaan BPCB adalah koleksi klas 900 (sejarah dan Geografi) dan koleksi klas 300 (ilmu-ilmu sosial)

karena relevan dengan visi dan misi kantor atau lembaga terkait lainnya yang khusus menangani pelestarian cagar budaya baik tinggalan Arkeologinya, Sejarahnya, Antropologinya dan kajian cagar Budaya lainnya.

2. Jenis perpustakaan khusus

Menurut Sulistiyo Basuki "setidaknya ada enam jenis perpustakaan khusus di Indonesia" antara lain:

1. Perpustakaan yang berada di bawah naungan sebuah perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang atau jasa. Perpustakaan ini sangat dominan memiliki koleksi yang relevan dengan tugas pokok perusahaan tersebut dan sesuai dengan Undang-undang no. 34 / 2007 pasal 25.26.27 dan 28 tentang perpustakaan khusus.
2. Perpustakaan yang berada di departemen atau lembaga Negara non departemen. Koleksi perpustakaan tersebut juga memiliki koleksi sesuai dengan misi departemennya untuk pengembangan Sumber Daya Manusianya
3. Perpustakaan pada lembaga penelitian dan pengembangan. Dari keseluruhan koleksi yang dimiliki sangat dominan dengan koleksi hasil penelitian dan pengembangan SDM Lembaga tersebut.
4. Perpustakaan pada pusat informasi dan dokumentasi. Perpustakaan lembaga memiliki sejumlah koleksi yang cukup sehingga menjadi media informasi dan dokumentasi.
5. Perpustakaan pada perguruan tinggi dan di bawahnya. Perpustakaan ini cukup banyak koleksi yang harus dimiliki karena memiliki pengguna perpustakaan yang sangat banyak seperti mahasiswa, dosen dan peneliti.
6. Perpustakaan yang dikelola oleh lembaga lain dengan koleksi khusus serta pemakai khusus. Contoh perpustakaan BPCB yang memiliki koleksi dominan dengan Ilmu humaniora. Dibanding dengan perpustakaan lain yang koleksi bersifat universal banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan pengguna tertentu saja misalnya perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan lainnya yang sejenis dengan perpustakaan tersebut.

3. Tugas, fungsi dan tujuan perpustakaan khusus

Setiap kantor atau organisasi yang berada dibawah lembaga induk tentunya memiliki tujuan dan fungsi yang mendukung terlaksananya tujuan dan fungsi lembaga induknya. Demikian juga halnya perpustakaan khusus yang merupakan bagian dari suatu lembaga pemerintah dan swasta, mempunyai tujuan dan fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsi lembaga tempat bernaung.

1. Tugas dan fungsi perpustakaan Khusus tercantum dalam Kepres no. 11 tahun 1989 tentang perpustakaan nasional dalam konsiderannya menyatakan bahwa perpustakaan adalah sarana pelestarian bahan pustaka hasil budaya bangsa yang berfungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan

dalam rangka merncerdaskan bangsa dan menunjang pelaksanaan tugas lembaga yang bersangkutan. (*Pedoman perlengkapan perpustakaan khusus, 1991 :3*)

Oleh karena itu peranan perpustakaan penting sekali keberadaannya dalam suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk mensukseskan pelaksanaan program kerja pada lembaga /instansi tempat perpustakaan berada.

2. Menurut pedoman perlengkapan perpustakaan khusus (1991 :3)

Bahwa perpustakaan khusus bertujuan sbb:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan serta koleksi dalam subjek tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggota staf organisasi tertentu akan informasi meliputi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- b. Menciptakan kondisi dan mendorong masyarakat atau organisasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa layanan peprustakaan organisasinya untuk kemajuan anggota dan organisasi itu sendiri.
Dari uraian penjelasan tersebut di atas telah diketahui bahwa, tugas dan fungsi perpustakaan khusus adalah melestarikan bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas lembaga yang menaungi perpustakaan tersebut.
- c. Tujuan lain perpustakaan khusus adalah menyediakan sarana dan prasarana koleksi dalam subjek khusus atau tertentu yang berkaitan dengan kebutuhandari lembaga yang menaungi perpustakaan tersebut serta menciptakan suasana yang dapat mendorong staf lembaga atau organisasi tersebut untuk mamfaatkan jasa layanan perpustakaan. Dari cakupan subjek perpustakaan khusus adalah berkaitan dengan penggunaan istilah "khusus" yang berkaitan dengan subjek tertentu dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian perpustakaan khusus sering menunjukkan pada bidang ilmu pengetahuan

4. Perencanaan strategis perpustakaan

Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam penyelenggaraan perpustakaan khusus, perpustakaan perlu membuat perencanaan strategis termasuk program kegiatan. Perencanaan strategis dibuat untuk memberi panduan umum tentang kebijakan dan arah kegiatan perpustakaan yang menjadi acuan pelaksanaan kerja sehari-hari.

Didalam buku panduan pedoman umum penyelenggaraan Perpustakaan khusus (1993:13) dikatakan bahwa dalam rencana strategis perpustakaan perlu membuat:

1. Visi/misi kebijakan mutu dan sasaran umum program perpustakaan khusus, baik program jangka panjang maupun menengah.
2. Analisis Swot (kekuatan & kemampuan, kelemahan dan kendala, peluang & tantangan) perpustakaan dalam aspek sumber daya sarana dan prasarana.

3. Rencana program jangka pendek lima tahun perpustakaan (termasuk didalamnya rencana kebutuhan anggaran, sumber pendanaan dan strategi pelaksanaannya) yang selanjutnya dijabarkan dalam usulan program rincian rencana kegiatan tahunan perpustakaan.
4. Moto/tema perpustakaan sebagai pemicu pelaksanaan kegiatan perpustakaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja yang baik pada suatu perpustakaan harus memiliki rencana strategis yang terdiri atas.

1. Visi dan misi
2. Analisis kemampuan
3. Rencana program jangka pendek dan
4. Tema perpustakaan.

5. Koleksi perpustakaan khusus

Beberapa unsur perpustakaan khusus adalah tersedianya koleksi, tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai, perpustakaan tidak akan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pemakainya. Oleh karena itu tidak akan membina dan mengembangkann koleksi perpustakaan yang efektif dan berdaya guna, pengelola dan penyelenggara perlu memahami secara baik tentang makna dan fungsi koleksi perpustakaan.

Dalam buku (pedoman umum petunjuk penyelenggaraan perpustakaan khusus 1999 : 19) dijelaskan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan (ditata) untuk disajikan kepada masyarakat pengguna dalam rangka memenuhi informasi yang dibutuhkan. Koleksi perpsustakaan selain mempunyai fungsi sebagai sumber informasi juga sebagai prasarana pendidikan, hiburan, penelitian dan pengembangan.



koleksi perpustakaan khusus yang ditata untuk kebutuhan informasi

6. Koleksi dasar perpustakaan khusus

Koleksi dasar perpustakaan adalah yang minimal harus dimiliki oleh perpustakaan tersebut agar tugas pokok dan misi perpustakaan dapat terpenuhi meskipun tidak tercapai optimal. Dalam buku referensi pedomaman umum penyelenggaraan perpustakaan khusus (1999:20-21) dijelaskan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koleksi dasar perpustakaan yaitu:

- Koleksi dasar perpustakaan yang perlu dikembangkan berupa buku referensi (hand books), kamus, majalah, booklet, laporan, buku teks yang terkait langsung dengan subjek yang menjadi lingkup misi perpustakaan dan lembaga induk perpustakaan, serta semua pustaka baik yang diterbitkan oleh institusi dimana perpustakaan itu didirikan
- Jumlah koleksi dasar minimal 70% dari ketentuan jumlah koleksi minimal pada saat perpustakaan didirikan (minimal 1000 judul), dan atau 60% jumlah koleksi yang dikembangkan.
- Koleksi dasar harus mendukung penuh kebutuhan pengguna internal intitrusi perusahaan dimana peprustakaan bernaung tanpa mengabaikan kebutuhan pustaka dari masyarakat diluar intitusi perusahaan.
- Jenis, Cakupan subjek dan kriteria bahan pustaka koleksi dasar harus tertuang dalam pedoman umum pengembangan koleksi perpustakaan.
- Penanggung jawab pengembangan koleksi dasar harus diberikan kepada pustakawan senior dan atau pejabat structural perpustakaan yang terkait.

Dari uraian penjelasan tersebut, telah dsimpulkan bahwa jenis koleksi peprustakaan khusus terdiri dari koleksi umum, koleksi referens, koleksi majalla, dan koleksi khusus lainnya, sedangkan untuk jumlah koleksi dasar perpustakaan khusus minimal 70% dari jumlah koleksi pada saat perpustakaan didirikan.

7. Alat mengakses bahan pustaka Perpustakaan BPCB Sul-Sel

Untuk memudahkan menelusuri kembali koleksi bahan pustaka, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara manual dan komputer. Menurut pedoman penyelenggara perpustakaan bahwa ada dua cara dalam pencarian kembali bahan pustaka yaitu:

1. Cara manual

Alat yang dikembangkan dalam bentuk katalog, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pengelolaan jajaran kartu katalog sebagai salah satu sistem akses koleksi bahan pustaka bagi pengguna perpustakaan.
- Pembinaan *self list* sebagai alat kontrol di rak atau lemari buku
- Verifikasi dan validasi kartu katalog sebagai pemutakhiran data/alat akses (termasuk dikaitkan dengan penyiangan bahan pustaka dalam koleksi). Catatan: susunan katalog dapat berdasarkan nomor urutan klasifikasi atau subek informasi bahan pustaka.

6. Koleksi dasar perpustakaan khusus

Koleksi dasar perpustakaan adalah yang minimal harus dimiliki oleh perpustakaan tersebut agar tugas pokok dan misi perpustakaan dapat terpenuhi meskipun tidak tercapai optimal. Dalam buku referensi pedomaman umum penyelenggaraan perpustakaan khusus (1999:20-21) dijelaskan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koleksi dasar perpustakaan yaitu:

- a. Koleksi dasar perpustakaan yang perlu dikembangkan berupa buku referensi (hand books), kamus, majalah, booklet, laporan, buku teks yang terkait langsung dengan subjek yang menjadi lingkup misi perpustakaan dan lembaga induk perpustakaan, serta semua pustaka baik yang diterbitkan oleh institusi dimana perpustakaan itu didirikan
- b. Jumlah koleksi dasar minimal 70% dari ketentuan jumlah koleksi minimal pada saat perpustakaan didirikan (minimal 1000 judul), dan atau 60% jumlah koleksi yang dikembangkan.
- c. Koleksi dasar harus mendukung penuh kebutuhan pengguna internal intitrusi perusahaan dimana peprustakaan bernaung tanpa mengabaikan kebutuhan pustaka dari masyarakat diluar intitusi perusahaan.
- d. Jenis, Cakupan subjek dan kriteria bahan pustaka koleksi dasar harus tertuang dalam pedoman umum pengembangan koleksi perpustakaan.
- e. Penanggung jawab pengembangan koleksi dasar harus diberikan kepada pustakawan senior dan atau pejabat structural perpustakaan yang terkait.

Dari uraian penjelasan tersebut, telah dsimpulkan bahwa jenis koleksi peprustakaan khusus terdiri dari koleksi umum, koleksi referens, koleksi majalla, dan koleksi khusus lainnya, sedangkan untuk jumlah koleksi dasar perpustakaan khusus minimal 70% dari jumlah koleksi pada saat perpustakaan didirikan.

7. Alat mengakses bahan pustaka Perpustakaan BPCB Sul-Sel

Untuk memudahkan menelusuri kembali koleksi bahan pustaka, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara manual dan komputer. Menurut pedoman penyelenggara perpustakaan bahwa ada dua cara dalam pencarian kembali bahan pustaka yaitu:

1. Cara manual

Alat yang dikembangkan dalam bentuk katalog, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Pengelolaan jajaran kartu katalog sebagai salah satu sistem akses koleksi bahan pustaka bagi pengguna perpustakaan.
- b. Pembinaan *self list* sebagai alat kontrol di rak atau lemari buku
- c. Verifikasi dan validasi kartu katalog sebagai pemutakhiran data/alat akses (termasuk dikaitkan dengan penyiangan bahan pustaka dalam koleksi). Catatan: susunan katalog dapat berdasarkan nomor urutan klasifikasi atau subek informasi bahan pustaka.



Bentuk laci Kartu katalog Perpustakaan khusus BPCB Sulsel

2. Komputer

Alat akses yang dikembangkan dalam bentuk pangkalan data bibliografi. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ini adalah :

- Perancangan sistem pangkalan data harus cermat dan handal.
- Penentuan titik akses dan pola penggunaan data
- Transmisi data dari bahan tercetak (Printed material) ke elektronik
- Penyuntingan dan bibliografis.
- Pengujian akses dan bibliografis
- Sistem "*Back up*"
- Verifikasi dan validitas data yaitu memeriksa kembali secara acak dan berkala data-data yang sudah masuk kedalam system.

Dari penjelasan tersebut diatas telah dinyatakan bahwa pencarian kembali bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara manual dan komputer. Pencarian dengan cara manual dapat dikembangkan dalam bentuk katalog sedangkan menggunakan komputer dapat dikembangkan dalam bentuk pangkalan data bibliografi



Sarana pelayanan katalog elektrik computer Perpustakaan BPCB sulsel

8. Sistem pelayanan dan jenis pelayanan perpustakaan khusus

Koleksi dan fasilitas perpustakaan harus digunakan secara optimal sebagai sumber daya pelayanan informasi agar koleksi tersebut tidak terkesan sebagai barang mati dan tak berharga yang selalu menunggu sentuhan seseorang. Pola layanan pasif harus diubah menjadi pola layanan proaktif dimana pihak perpustakaan yang menjemput konsumennya. Mengingat tugas perpustakaan khusus adalah melayani kebutuhan kelompok pemakai tertentu, maka petugas perpustakaan harus mengetahui potensi informasi yang tersimpan dalam bahan pustaka tersebut, serta peta minat penggunanya.

Perpustakaan khusus harus dapat memberikan layanan yang efektif, cepat dan professional terhadap semua pengunjung perpustakaan yang mengacu kepada system management mutu dan pelayanan prima yang dapat mendahulukan kepuasan konsumen sebagai tujuan sasaran perpustakaan.

Berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan khusus (1999:37-45) ada beberapa jenis layanan perpustakaan khusus antara lain:

1. Layanan sirkulasi

Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan peredaran koleksi perpustakaan di luar perpustakaan. Pelayanan ini ditujukan agar pengguna perpustakaan dapat meminjam dan membaca bahan pustaka lebih leluasa sesuai kesempatan yang ada. Yaitu:

a. System layanan bahan pustaka

System layanan bahan pustaka dapat dilaksanakan dengan system layanan terbuka atau sitem layanan tertutup

- System terbuka

Sistem ini memberikan kebebasan kepada pengguna perpustakaan untuk memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang diinginkan dari ruang koleksi.

- Sistem tertutup

Sistem ini tidak memberi kebebasan kepada pengguna perpustakaan tidak dapat mengambil sendiri bahan pustaka dari ruangan koleksi. Pengambilan bahan pustaka dilakukan oleh petugas peprustakaan. Sistem ini dtujukan untuk koleksi khusus yang keberadaannya perlu memeperoleh pengamanan.

b. Peminjaman

Layanan peminjaman adalah kegiatan pencatatan bahan pustaka yang dipinjam oleh pengguna dan segmen pelayanya hanya kepada pegawai yang ada di lingkungan kantor BPCB Sulsel

c. Pengembalian

Layanan pengembalian adalah kegiatan pencatatan bahan pustaka yang dikembalikan oleh pengguna

d. Pemberian sanksi

Apabila pengguna peprustakaan meminjam bahan pustaka melakukan pelanggaran, petugas perpustakaan memberikan sanksi kepada peminjam.

2. Layananan Rujukan

Layanan rujukan diberikan untuk membantu pengguna perpustakaan atau masyarakat yang ingin menemukan informasi secara cepat dan tepat dari koleksi yang ada diperpustakaan. Kegiatan dilakukan dengan cara menjawab langsung pertanyaan pengguna perpustakaan atau dari masyarakat dengan menggunakan sumber koleksi yang tersedia di perpustakaan

3. Layanan sekunder

Adalah system layanan perpustakaan yang bersifat rutin dan ada beberapa cara /jenis layanan yang dapat dikembangkan perpustakaan. Layanan tersebut prinsipnya untuk mendayagunakan informasi yang terkandung dalam koleksi perpustakaan



4. Pelayanan khusus

Layanan khusus dapat dikembangkan di perpustakaan antara lain

a. Terejemahan bahan pustaka

Banyak pengguna perpustakaan yang kurang paham terhadap tulisan yang digunakan dalam bahasa pustaka. Mereka biasanya ingin memperoleh dokumen terjemahannya agar lebih cepat menangkap isinya. Dalam hal ini perpustakaan perlu menyediakan jasa terjemahan.

b. Jasa silang layan pengadaan bahan pustaka

Jasa ini dilakukan melalui kerjasama antar perpustakaan. Jadi alat bantu pelayanan untuk mencari dokumen. Perpustakaan dapat menggunakan katalog induk atau alat akses terpasang bila sudah menggunakan teknologi informasi jadi tarif layanan perlu ada kesepakatan antar perpustakaan yang bekerjasama

c. Pelayanan penelusuran literatur

Penelusuran literature adalah pencarian kembali bahan pustaka yang ada di perpustakaan atau diluar perpustakaan dengan cara menggunakan alat akses kartu katalog, literatur sekunder dan atau pangkalan data online atau sumber lain

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa system layanan perpustakaan khusus terdiri dari dua system yaitu system terbuka dan system tertutup

PENUTUP

Perpustakaan khusus (*Special Library*) adalah perpustakaan yang menekankan koleksinya pada suatu bidang khusus, atau bidang-bidang tertentu saja yang berhubungan dengan kegiatan lembaga itu sendiri Contohnya: koleksi khusus bidang Arkeologi, antropologi, sejarah, agama, lingkungan hidup, Geologi, dll. Dapat juga digolongkan khusus karena bentuk koleksi yang disimpannya seperti peta, klipping koran, rekaman dan sebagainya dimanfaatkan oleh pengunjung tertentu saja. Perpustakaan khusus merupakan bagian dari suatu lembaga penelitian, assosiasi profesi, Museum dan sebagainya. Dan tentunya masyarakat yang dilayaninya juga tergolong khusus yaitu kepada karyawan /staf yang bekerja di lingkungan badan tempat perpustakaan bernaung atau kepada mereka yang bekerja dalam bidang tertentu yang merupakan tugas pokoknya pada suatu lembaga Negara maupun Swasta. Dan tentunya memiliki tujuan yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menyajikan segala bentuk informasi yang ada hubungannya dengan subjek yang dapat digunakan oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan. Sehubungan dengan masyarakat yang dilayani, maka tujuannya adalah memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan agar dapat dimanfaatkan dan mendayagunakan bahan koleksi rujukan sesuai dengan jenis layanan yang ada di perpustakaan tersebut.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berorientasi pada suatu bidang tertentu saja yang relevan Visi misi kantor saja atau lembaga yang bekerja pada bidang tertentu saja Kantor Balai pelestarian Cagar Budaya, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Badan Meteorologi Dll

Daftar Referensi

- Bafadal, Ibrahim. 1996, *Pengelolaan perpustakaan sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hamakonda, Towa P. dan Tairas, J.N.B. 1982, *Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Perpusnas RI .1992, *Perpustakaan sekolah: Petunjuk untuk membina, memakai dan memelihara perpustakaan di sekolah*, Jakarta, perpusnas RI
- Perpusnas RI, 1999. *Pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan khusus*. Jakarta, Perpusnas RI
- Rahayuningsi, F. 2007 *Pengelolaan perpustakaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Shadily, Hasan, 1984, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ictiar Baru – Van Hove dan Elsevier Publishing Projects
- Soelistiyo, Basuki 1991, *Pengantar ilmu Perpustakaan*. Jakarta, Gramedia, Pustaka utama.
- Sudarsono, Blasius, "Automasi perpusrtakaan , Dokumentasi dan informasi". Makalah pada kursus dan latihan kerja pengolahan data Bibliografi Air bersih & sanitasi , Dep PU, Depkes dan PDIN LIPI Jakarta 22 feb.- 18 Maret 1988.



**EKSPLORASI LUKISAN
DINDING GUA
DI KABUPATEN MUNA
SULAWESI TENGGARA**

Abdhamad Tang

**Pemanfaatan Warisan Budaya
Untuk Kepentingan Pariwisata
Studi Kasus: Permukiman Tradisional Kofe Kesu
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan**

Irsadi

**Potensi dan Sebaran
Cagar Budaya di Kota Baubau
Sulawesi Tenggara**

Yadi Mulyadi

B u l e t i n S O M B A O P U

**TRADISI PEMBUATAN TAU-TAU
YANG TERLUPAKAN**

Fatmanti Tana, SS

Andi Takbiran

**Upaya Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Arkeologi
(Gedung Kesenian Sulawesi Selatan
Societelt De Harmonie)**